LIURAI

PERAN PEMIMPIN TRADISIONAL DALAM SEJARAH DAN PEMBANGUNAN TIMOR-LESTE

Kajian Historis, Kultural, dan Strategis Menuju Negara Berdaulat Berbasis Budaya

Salustiano Filipe Ximenes

Powered by OpenAI

Timor-Leste, 2025

LIURAI: PERAN PEMIMPIN TRADISIONAL DALAM SEJARAH DAN PEMBANGUNAN TIMOR-LESTE

Kajian Historis, Kultural, dan Strategis Menuju Negara Berdaulat Berbasis Budaya

Dalam pusaran sejarah Timor-Leste yang panjang dan penuh gejolak, para *liurai*—pemimpin tradisional—telah menjadi penopang utama tatanan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat. Namun, peran historis dan strategis mereka kerap terpinggirkan dalam narasi resmi negara.

Buku ini hadir sebagai upaya ilmiah dan kultural untuk merekonstruksi secara sistematis dan objektif kontribusi para *liurai* sejak masa prasejarah, penjajahan Portugis, pendudukan Indonesia, hingga era kemerdekaan. Disusun dalam lima bagian dan enam belas bab, buku ini memadukan pendekatan historis, teori internasional, serta kebijaksanaan lokal yang masih hidup dalam komunitas adat. Lebih dari sekadar telaah akademik, *LIURAI* adalah manifesto budaya dan politik—sebuah seruan bahwa masa depan Timor-Leste yang berdaulat dan berkeadilan harus dibangun di atas fondasi identitas dan nilai adatnya sendiri.

Sebuah bacaan wajib bagi siapa saja yang ingin memahami Timor-Leste secara utuh—bagi akademisi, pembuat kebijakan, pelajar, dan seluruh rakyat yang mencintai tanah leluhurnya.

Penulis:
Salustiano Filipe Ximenes
Dili Timor-Leste, 20 April 2025

Kontak Saya:
No.Tlp: (+670) 77336285
Email: salustianofilipeximenes@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/SalustianoFXOfficial

Powered by OpenAI

KATA PENGANTAR

Buku ini disusun sebagai bentuk penghormatan dan refleksi atas perjalanan panjang masyarakat Timor-Leste dalam mempertahankan identitas budaya, nilai-nilai sosial, serta kearifan lokal yang berpangkal pada peran vital para *liurai*. Sejarah Timor-Leste, yang kaya akan lapisan budaya dan tradisi, tidak dapat dipisahkan dari eksistensi *liurai*—pemimpin tradisional yang selama berabad-abad menjadi penjaga adat, mediator sosial, dan penentu arah perkembangan masyarakat dari zaman prasejarah hingga era modern.

Kontribusi para *liurai* dalam berbagai fase sejarah—baik pada masa pra-kolonial, kolonial Portugis, pendudukan Indonesia, hingga pasca-kemerdekaan—merupakan kisah yang kerap terpinggirkan atau bahkan diabaikan dalam narasi resmi negara. Melalui buku ini, saya berupaya merekonstruksi dan menyoroti kembali peran strategis mereka dalam membentuk sejarah dan budaya Timor-Leste, serta relevansi kontribusi tersebut bagi pembangunan berkelanjutan di masa kini dan masa depan.

Dengan pendekatan historis dan analisis kritis, kajian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai *liurai* sebagai kekuatan sosial dan kultural yang tidak hanya melekat pada masa lampau, melainkan juga memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis dalam pembangunan negara yang inklusif dan berkeadilan. Buku ini mengajak pembaca untuk melampaui batas pemikiran tentang sistem politik dan ekonomi modern, dengan menggali kembali sumber daya sosial dan budaya yang telah terbangun di komunitas-komunitas adat Timor-Leste.

Karya ini tidak hanya ditujukan kepada kalangan akademisi, melainkan juga kepada masyarakat luas, para pembuat kebijakan, dan siapa pun yang memiliki ketertarikan terhadap bagaimana warisan tradisi dan struktur sosial adat dapat menjadi pilar penting dalam proses pembangunan nasional. Dalam konteks globalisasi yang

semakin kompleks, pemahaman mendalam tentang *liurai* dan sistem adat membuka ruang bagi lahirnya strategi pembangunan yang berakar pada jati diri bangsa—berbudaya, bersatu, dan berkelanjutan.

Saya berharap buku ini dapat memperluas wawasan dan meningkatkan penghargaan terhadap peran *liurai* dalam sejarah Timor-Leste, serta menjadi stimulus untuk diskusi-diskusi lebih lanjut tentang bagaimana nilai-nilai tradisional dapat dimanfaatkan dalam merancang masa depan yang lebih adil dan bermartabat bagi seluruh rakyat Timor-Leste.

Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penulisan dan penyusunan buku ini. Semoga karya ini bermanfaat dan memberikan kontribusi nyata dalam pemahaman serta penguatan peran *liurai* dalam sejarah dan pembangunan Timor-Leste.

Hormat Saya,
Salustiano Filipe Ximenes

AKRONIM

Akrónim	Kepanjangan	Makna Kontekstual dalam Buku
APODETI	Associação Popular Democrática Timorense	Partai politik pro-integrasi yang mendukung integrasi Timor-Leste ke dalam Indonesia.
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations	Organisasi politik dan ekonomi kawasan Asia Tenggara.
CAVR	Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação de Timor-Leste	Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor-Leste (Laporan Chega!) – dirujuk dalam konteks trauma masa *liurai* dan pendudukan.
CNRT	Congresso Nacional de Reconstrução de Timor	Kongres Nasional Rekonstruksi Timor – partai politik modern.
CPLP	Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	Komunitas Negara-Negara Berbahasa Portugis.
FALINTIL	Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor-Leste	Angkatan Bersenjata Pembebasan Nasional Timor-Leste.
FRETILIN	Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente	Front Revolusioner untuk Kemerdekaan Timor-Leste.
INTERFET	International Force for East Timor	Pasukan penjaga perdamaian multinasional yang dikerahkan setelah referendum 1999.
NGO	Non-Governmental Organization	Organisasi non-pemerintah – digunakan dalam diskusi tentang pembangunan lokal dan aktor masyarakat sipil.
PNTL	Polícia Nacional de Timor-Leste	Kepolisian Nasional Timor-Leste.
RDTL	República Democrática de Timor-Leste	Negara berdaulat Timor-Leste – sering digunakan sebagai rujukan hukum-politik.
TNI	Tentara Nasional Indonesia	Tentara Nasional Indonesia – dibahas secara kritis dalam bab pendudukan.
UDT	União Democrática Timorense	Partai politik pada masa dekolonisasi; rival dari FRETILIN.

Akrónim	Kepanjangan	Makna Kontekstual dalam Buku
UNAMET	United Nations Mission in East Timor	Misi PBB yang menyelenggarakan referendum 1999.
UNDP	United Nations Development Programme	Dirujuk dalam konteks tata kelola dan keadilan adat.
UNTAET	United Nations Transitional Administration in East Timor	Pemerintahan transisi PBB di Timor-Leste (1999–2002).
WHO	World Health Organization	Disebut dalam konteks pengobatan tradisional dan sistem kesehatan global.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

AKRONIM 4

DAFTAR ISI 6

BAGIAN I: TIMOR-LESTE DARI ZAMAN PRA-SEJARAH HINGGA ERA PRA-KOLONIAL PORTUGIS 18

BAB 1: SEJARAH GEOLOGIS PULAU TIMOR 18

1.1. Pendahuluan 18

1.2. Asal-Usul Geologis dan Struktur Tektonik Pulau Timor 19

1. Batuan Penyusun Timor 19

2. Struktur Tektonik dan Relief 20

3. Implikasi Sosial dan Ekonomi 20

1.3. Iklim, Topografi, dan Pengaruh Terhadap Permukiman di Pulau Timor 21

1. Iklim dan Musim 21

2. Topografi dan Geografi 22

3. Adaptasi terhadap Lingkungan 22

4. Komunitas dan Struktur Sosial 23

1.4. Dampak Geologis terhadap Struktur Sosial Tradisional 24

1. Pengaruh Geologi terhadap Pembentukan Komunitas 24

2. Struktur Sosial dan Kekuasaan Lokal 24

3. Strategi Pertahanan dan Perlindungan Teritorial 25

1.5. Kesimpulan 26

BAB 2: MIGRASI KE PULAU TIMOR 27

2.1. Pendahuluan 27

2.2. Gelombang Migrasi Awal dan Bukti Arkeologis 28

1. Kedatangan Awal Homo Sapiens ke Pulau Timor 28

2. Adaptasi Ekologis dan Kehidupan Sosial Awal 29

3. Gelombang Migrasi Austronesia dan Pembentukan Masyarakat Hibrid 29

4. Integrasi Budaya dan Evolusi Sosial-Politik 30

2.3. Asal-Usul Klan dan Identitas Leluhur dalam Tradisi Lisan Timor 30

1. Tradisi Lisan sebagai Sumber Epistemologis 30

2. Mitos Asal-Usul dan Sakralitas Geografis 31
3. Struktur Sosial: Genealogi, Totemisme, dan Aliansi 31
4. Peran *Liurai* dan Legitimasi Kepemimpinan 32
5. Mobilitas Antarklan dan Dinamika Identitas 32
2.4. Konsolidasi Klan dan Cikal-Bakal Kepemimpinan *Liurai* Awal 33
1. Dinamika Awal Konsolidasi Klan di Timor 33
2. Munculnya Figur *Liurai*: Kepemimpinan Spiritual dan Politik 33
3. Struktur Sosial dan Aliansi Politik Tradisional 34
4. Peran Adat, Spiritualitas, dan Mobilisasi Sosial 35
5. Signifikansi Sejarah Konsolidasi Klan 35
2.5. Kesimpulan 36
BAB 3: BENTUKNYA KOMUNITAS KLAN DAN *LIURAI* AWAL DI PULAU TIMOR 37
3.1. Pendahuluan 37
3.2. Struktur Sosial Komunitas Klan 38
1. Struktur Internal Komunitas Klan 39
2. Sistem Hubungan Antarklan 39
3. Kepemimpinan Klan dan Peran *Liurai* 40
3.3. Fungsi *Uma Lulik* dan Relasi Sosial-Kosmologis Klan 40
1. Pusat Spiritual dan Identitas Klan 41
2. Legitimasi Kekuasaan dan Sistem Adat 41
3. Relasi Kosmologis dan Ekologis 42
4. Simbol Integrasi dan Ketahanan Sosial 42
3.4. Pembentukan Kerajaan Lokal dan *Liurai* sebagai Pemimpin Tertinggi 43
1. Evolusi Sosial Menuju Struktur Kerajaan 43
2. *Liurai*: Figur Pemimpin Sakral dan Politik 43
3. Jejaring Diplomatik dan Konflik Antar-Kerajaan 44
4. Warisan Politis dan Budaya *Liurai* 45
3.5. Kesimpulan 45
BAB 4: PRA KEDATANGAN KOLONIALISME 47
4.1. Pendahuluan 47
4.2. Struktur Sosial-Politik Mandiri 48
1. Unit Sosial Dasar: Klan dan Uma Lulik 49

2. Hierarki Kekuasaan Tradisional 49
3. Mekanisme Hukum dan Keadilan 49
4. Otonomi Lokal dan Kedaulatan Wilayah 50
4.3. Hubungan Perdagangan dan Pengaruh Asing 50
1. Kayu Cendana: Komoditas Strategis Timor 51
2. Jaringan Dagang Maritim Regional 51
3. Adaptasi dan Negosiasi Kultural 52
4.4. Sistem Kepercayaan dan Hukum Adat 52
1. Konsep *Lulik*: Sakralitas sebagai Pusat Kehidupan 53
2. Peran Tetua Adat dan Spiritualis 53
3. Hukum Adat (*Tara Bandu*) dan Mekanisme Sanksi 54
4. Keseimbangan Kosmis dan Etika Ekologis 54
4.5. Kesimpulan 54
BAGIAN II: PENJAJAHAN PORTUGIS 57
BAB 5: PENJAJAHAN AWAL BANGSA PORTUGIS 57
5.1. Pendahuluan 57
5.2. Latar Belakang Ekspansi Portugis ke Timor 58
1. Cendana sebagai Pendorong Utama Ekspansi 59
2. Motif Evangelisasi dan Semangat Reconquista 59
3. Fragmentasi Politik Lokal sebagai Peluang Kolonial 60
4. Sebuah Proyek Geopolitik, Ekonomi, dan Spiritual 60
5.3. Mekanisme Penetrasi Awal: Aliansi dan Fragmentasi 61
1. Aliansi Politik dan Kooptasi Religius 61
2. Fragmentasi Internal dan Politik Pecah Belah 61
3. Peran Ganda *Liurai*: Kolaborator dan Pelindung Tradisi 62
4. Konsolidasi Awal Kekuasaan Kolonial 62
5.4. Peran Misionaris dalam Proses Penjajahan 63
1. Fungsi Ganda: Religius dan Politik 63
2. Baptisan sebagai Legitimasi Kekuasaan 63
3. Pendidikan, Asimilasi, dan Penanaman Ideologi 64
4. Gereja sebagai Instrumen Penetrasi Budaya 64
5.5. Reaksi dan Respons *Liurai* Lokal 65

1. **Penerimaan Taktis: Strategi Adaptif dan Alat Konsolidasi Kekuasaan** 65
2. **Perlawanan Terbuka dan Terselubung** 66
3. **Otonomi Spiritual dan Budaya sebagai Bentuk Perlawanan** 66
4. ***Liurai* sebagai Mediator antara Dunia Lokal dan Dunia Kolonial** 67

5.6. Penutup 67

BAB 6: DINAMIKA PENJAJAHAN SELAMA 450 TAHUN 69

6.1. Pendahuluan 69

6.2. Transformasi Struktur Kekuasaan Tradisional 70

1. **Institusionalisasi Kekuasaan Tradisional sebagai "Reino"** 71
2. **Rekonstruksi Mekanisme Pewarisan Kekuasaan** 71
3. **Lahirnya Kelas *Liurai* Baru dan Akomodasi Strategis** 72
4. **Antara Erosi dan Transfigurasi Tradisi** 72

6.3. Peran Ganda *Liurai*: Kolaborator dan Penyeimbang Lokal 73

1. **Kolaborasi Strategis dalam Struktur Kekuasaan Kolonial** 73
2. **Jembatan antara Sistem Kolonial dan Tatanan Adat** 74
3. **Fungsi Adat dan Spiritualitas Tetap Dipertahankan** 74
4. **Penggunaan Institusi Kolonial untuk Kepentingan Lokal** 74
5. **Ambivalensi dan Ketegangan Internal** 75

6.4. Warisan Kolonialisme dalam Struktur Sosial dan Politik Lokal 75

1. **Integrasi Kekuasaan Adat dalam Sistem Kolonial** 76
2. **Stratifikasi Sosial dan Warisan Elitisme Kolonial** 76
3. **Asimilasi Budaya dan Ketahanan Nilai Lokal** 77
4. **Birokrasi dan Sistem Pemerintahan Pascakolonial** 77
5. **Warisan Psikososial dan Budaya Politik** 77

6.5. Kesimpulan 78

BAB 7: POST-KOLONIALISME PORTUGIS 80

7.1. Pendahuluan 80

7.2. Dekolonisasi Mendesak dan Krisis Transisi 81

1. **Proses Dekolonisasi yang Tiba-Tiba** 81
2. **Ketidaksiapan Struktural dan Fragmentasi Politik** 82
3. **Dilema Otoritas Tradisional dalam Dinamika Politik Modern** 82
4. **Celah Bagi Intervensi Eksternal** 83

7.3. Peran *Liurai* dalam Masa Transisi 84
1. Penjaga Tatanan Sosial dan Keamanan Komunitas 84
2. Simbol Legitimasi Lokal dan Identitas Komunal 84
3. Perantara antara Struktur Tradisional dan Politik Modern 85
4. Ketahanan Budaya dan Hukum Adat dalam Masa Kekosongan Institusional 85
5. Keterbatasan dalam Historiografi Nasional 86
7.4. Penutupan Masa Post-Kolonial dan Awal Pendudukan Indonesia 86
1. Runtuhnya Struktur Kolonial Portugis dan Kekosongan Institusional 86
2. Invasi Militer Indonesia dan Krisis Kedaulatan 87
3. Nasib *Liurai* dan Struktur Adat 87
4. Simbolisasi Krisis Nasional dan Kompleksitas Geopolitik 88
7.5. Penutup 89
BAGIAN III: PENJAJAHAN INDONESIA 90
BAB 8: INVASI DAN PENDUDUKAN MILITER INDONESIA (1975–1999) 90
8.1. Pendahuluan 90
8.2. Alasan Politik dan Strategis Invasi Indonesia 91
1. Ketakutan terhadap Komunisme dan Stabilitas Nasional 92
2. Kepentingan Geopolitik dan Ekspansi Regional 92
3. Dukungan Diam-Diam dari Negara-Negara Barat 92
4. Krisis Politik Internal Timor-Leste dan Manuver Integrasi 93
5. Konsekuensi dan Reaksi Internasional 93
8.3. Dinamika Kekuasaan Lokal: *Liurai* dalam Rezim Pendudukan 94
1. Kooptasi *Liurai* oleh Struktur Administratif Militer 94
2. Ambiguitas Peran: Kolaborasi atau Resistensi Terselubung 95
3. Marginalisasi Otoritas Tradisional 96
4. Fragmentasi Sosial dan Polarisasi Komunitas 96
5. Ketahanan dan Adaptasi *Liurai* di Tengah Rezim Represif 97
8.4. Kekerasan Terstruktur dan Resistensi Sosial 97
1. Kekerasan Sistematis dan Disrupsi Sosial 98
2. Peminggiran Bahasa dan Budaya Lokal 98
3. Transformasi Tanah dan Struktur Ekonomi 99
4. Perlawanan Gerilya dan Dukungan Komunitas Adat 99

5. Resistensi Kultural dan Diplomasi Sosial 100
8.5. Penutup 101
BAB 9: PERLAWANAN LOKAL DAN INTERNASIONAL TERHADAP PENDUDUKAN INDONESIA (1975–1999) 103
9.1. Pendahuluan 103
9.2. Gerakan Perlawanan Bersenjata: Falintil dan Peran Rakyat 104
1. Pembentukan dan Evolusi Falintil 105
2. Strategi Gerilya dan Dukungan Komunitas Lokal 105
3. Keterlibatan *Liurai* dan Struktur Sosial Tradisional 105
4. Partisipasi Perempuan dalam Jaringan Perlawanan 106
5. Ketahanan Moral dan Ideologis Rakyat Timor-Leste 106
9.3. Perlawanan Sipil dan Budaya 107
1. Peran Gereja Katolik dalam Perlindungan dan Resistensi 107
2. Pendidikan Alternatif dan Kesadaran Identitas 108
3. Pelestarian Budaya sebagai Bentuk Resistensi 108
4. Seni dan Sastra sebagai Medium Perlawanan 109
5. Mobilisasi Sosial dan Jaringan Solidaritas 109
9.4. Solidaritas Internasional: Diplomasi dan Opini Global 110
1. Peran Diaspora Timor-Leste dan Diplomasi Rakyat 110
2. Dampak Tragedi Santa Cruz terhadap Opini Global 111
3. Peran Organisasi Non-Pemerintah dan Aktivis HAM 111
4. Sikap PBB dan Legitimasi Hukum Internasional 111
5. Kemenangan Diplomasi dan Referendum 1999 112
9.5. Kesimpulan 112
BAB 10: REFERENDUM, TRANSISI, DAN KEKERASAN 1999 114
10.1. Pendahuluan 114
10.2. Proses Menuju Referendum dan Peran Internasional 115
1. Konteks Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru 115
2. Pembentukan dan Mandat UNAMET 116
3. Pelaksanaan Referendum: Partisipasi Rakyat dan Hasil 116
4. Peran Aktif Komunitas Internasional 117
5. Signifikansi Referendum dalam Sejarah Penentuan Nasib Sendiri 117

10.3. Kekerasan Pasca-Referendum dan Krisis Kemanusiaan 118
1. Latar Belakang Kekerasan Terorganisir 118
2. Pola Kekerasan: Pembantaian, Pengungsian, dan Kehancuran Infrastruktur 119
3. Tanggung Jawab Militer dan Pelanggaran HAM Berat 119
4. Krisis Kemanusiaan dan Respons Internasional 120
5. Ketahanan Komunitas Lokal dan Peran *Liurai* 120
10.4. Intervensi Internasional dan Masa Transisi ke Kemerdekaan 121
1. Respons Internasional terhadap Krisis 121
2. Operasi INTERFET dan Pemulihan Stabilitas 121
3. Pembentukan UNTAET dan Pemerintahan Transisi 121
4. Partisipasi Lokal dalam Rekonstruksi dan Reintegrasi 122
5. Deklarasi Kemerdekaan dan Warisan Intervensi 122
10.5. Kesimpulan 123
BAGIAN IV: ZAMAN KEMERDEKAAN TIMOR-LESTE 125
BAB 11: PROKLAMASI DAN PENGAKUAN INTERNASIONAL ATAS KEMERDEKAAN TIMOR-LESTE 125
11.1. Pendahuluan 125
11.2. Proklamasi Resmi 20 Mei 2002 126
1. Latar Belakang Transisi dari Administrasi UNTAET 126
2. Pelaksanaan Upacara Proklamasi di Tasi Tolu 126
3. Pelantikan Presiden dan Simbolisme Kepemimpinan Nasional 127
4. Pengesahan Konstitusi Nasional 127
5. Dimensi Budaya dan Moral Proklamasi 128
11.3. Pengakuan Internasional dan Keanggotaan Global 128
1. Penerimaan Diplomatik Segera Setelah Proklamasi 128
2. Keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 129
3. Partisipasi dalam Komunitas Negara-Negara Berbahasa Portugis (CPLP) 129
4. Hubungan dengan ASEAN dan Kawasan Asia Tenggara 130
5. Makna Strategis Pengakuan Internasional 130
11.4. Peran *Liurai* dan Simbol Budaya dalam Kemerdekaan 131
1. Integrasi Tradisi dalam Proklamasi Kemerdekaan 131
2. Representasi *Liurai* sebagai Jembatan Sejarah 131

3. **Simbolisme Budaya sebagai Fondasi Identitas Nasional** 131
4. **Peran *Liurai* dalam Rekonsiliasi dan Rekonstruksi Sosial** 132
5. **Ketahanan Budaya dalam Proses Pembangunan Nasional** 132

11.5. Kesimpulan 133

BAB 12: REVITALISASI BUDAYA DAN ADAT DALAM NEGARA MODERN 135

12.1. Pendahuluan 135

12.2. Pengakuan Konstitusional dan Revitalisasi Nilai Budaya serta Sistem Adat di Timor-Leste 137

1. **Kerangka Hukum dan Konstitusional** 137
2. **Program Pendidikan Berbasis Budaya** 138
3. **Pelestarian Warisan Budaya Tangible dan Intangible** 138
4. **Rekognisi dan Integrasi Struktur Adat** 139
5. **Tantangan dan Prospek Keberlanjutan** 139

12.3. Implementasi Kebijakan Budaya dalam Pembangunan Nasional 139

1. **Pendidikan Berbasis Budaya** 140
2. **Pelestarian dan Penguatan Warisan Budaya** 140
3. **Integrasi Struktur Adat dalam Tata Kelola Lokal** 141
4. **Rekonsiliasi dan Keadilan Sosial Berbasis Adat** 141
5. **Budaya sebagai Motor Ekonomi Lokal** 141

12.4. Peran Generasi Muda dan Digitalisasi Warisan Budaya 142

1. **Keterlibatan Generasi Muda dalam Revitalisasi Budaya** 142
2. **Digitalisasi Warisan Budaya** 142
3. **Tantangan dalam Revitalisasi Budaya** 143
4. **Prospek Strategis untuk Revitalisasi Budaya** 143

12.5. Penutup 144

BAB 13: *LIURAI* DAN PERANANNYA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH 146

13.1. Pendahuluan 146

13.2. Konteks Sosial-Politik Kewenangan *Liurai* 147

1. **Akar Historis dan Legitimasi Tradisional** 147
2. **Transformasi dalam Masa Kolonial dan Pendudukan** 148
3. **Kewenangan De Facto dalam Negara Modern** 148
4. ***Liurai* dan Identitas Lokal dalam Pembangunan Nasional** 149

5. Tantangan dan Peluang dalam Integrasi Tata Kelola 149
13.3. Peran *Liurai* dalam Bidang Sosial dan Budaya 150
1. Penjaga Warisan Budaya dan Identitas Lokal 150
2. Mediator Sosial dan Penjaga Kohesi Komunitas 151
3. Agen Edukasi Budaya dan Pelestari Nilai Lokal 151
4. Diplomat Budaya Antar-Klan dan Suku 151
5. Pilar Stabilitas Sosial dalam Pembangunan Berkelanjutan 152
13.4. Peran *Liurai* dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur 152
1. Mobilisasi Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Proyek Infrastruktur 152
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Adat dan Berkelanjutan 153
3. Mediator Akses terhadap Tanah untuk Pembangunan 153
4. Advokasi Kepentingan Lokal kepada Pemerintah dan LSM 154
5. Dukungan terhadap Ekonomi Tradisional dan Inovasi Sosial 154
6. Peran Strategis dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Inklusif 154
13.5. Tantangan dan Peluang Integrasi *Liurai* dalam Sistem Pembangunan Negara 155
1. Tantangan Integrasi 155
2. Peluang Integrasi 156
13.6. Penutup 157
BAGIAN V: VISI HISTORIS DAN STRATEGIS MASA DEPAN 159
BAB 14: *LIURAI* DALAM NARASI SEJARAH NASIONAL 159
14.1. Pendahuluan 159
14.2. *Liurai* Sebagai Aktor Sejarah Sejak Pra-Kolonial 160
1. Struktur Sosial dan Legitimasi Kekuasaan 161
2. Fungsi Politik dan Sosial *Liurai* 161
3. Hubungan Antar-*Liurai* dan Konfederasi Lokal 161
4. Kontribusi Terhadap Identitas dan Struktur Bangsa 162
5. Relevansi Historis dalam Narasi Nasional 162
14.3. *Liurai* dalam Konteks Kolonialisme dan Perlawanan 163
1. Strategi Kooptasi dan Koeksistensi 163
2. *Liurai* sebagai Aktor Perlawanan 163
3. Transformasi Struktur Kekuasaan Tradisional 164

4. **Posisi *Liurai* dalam Pendudukan Indonesia** 164
5. **Warisan Historis dan Reinterpretasi Peran *Liurai*** 165
14.4. Penghilangan dan Marginalisasi dalam Sejarah Resmi 165
1. **Narasi Sentralistik dan Proyek Modernisasi** 165
2. **Reduksi Peran *Liurai* dalam Historiografi Nasional** 166
3. **Dampak Marginalisasi terhadap Generasi Muda dan Identitas Budaya** 166
4. **Upaya Revitalisasi dan Rekonsiliasi Historis** 167
5. **Pentingnya Rekonstruksi Sejarah yang Inklusif** 167
14.5. Reinterpretasi Historis untuk Rekonsiliasi Nasional 168
1. **Menjembatani Narasi Lokal dan Nasional** 168
2. **Mengakui Kompleksitas Sejarah *Liurai*** 169
3. **Landasan untuk Rekonsiliasi Sosial-Budaya** 169
4. **Implikasi terhadap Pendidikan dan Kebijakan Publik** 169
5. **Strategi Menuju Narasi Sejarah yang Inklusif** 170
14.6. Kesimpulan 170
BAB 15: INSTITUSIONALISASI PERAN ADAT DALAM TATA NEGARA 172
15.1. Pendahuluan 172
15.2. Rasionalisasi Konstitusional dan Budaya 173
1. **Pengakuan Konstitusional terhadap Nilai Tradisional** 173
2. **Legitimasi Sosial, Budaya, dan Historis Institusi Adat** 174
3. **Urgensi Integrasi Adat dalam Tata Negara Modern** 174
4. **Prinsip-prinsip Normatif Integrasi** 175
5. **Perspektif ke Depan: Dari Toleransi ke Integrasi Aktif** 176
15.3. Model-model Integrasi: Studi Perbandingan 176
1. **Model Koeksistensi: Studi Kasus Afrika Barat** 176
2. **Model Integrasi Formal: Pengalaman Botswana** 177
3. **Model Otonomi Budaya: Bolivia dan Ekuador** 177
4. **Model Representasi Adat: Vanuatu dan Samoa** 178
5. **Implikasi dan Relevansi untuk Timor-Leste** 178
15.4. Strategi Institusionalisasi di Timor-Leste 179
1. **Pengakuan Konstitusional dan Legislasi Adat** 180
2. **Pembentukan Lembaga Adat Nasional dan Daerah** 180

3. Integrasi Tokoh Adat dalam Sistem Pemerintahan Lokal 181
4. Pendidikan, Sertifikasi, dan Pemberdayaan Kepemimpinan Adat 181
5. Digitalisasi dan Dokumentasi Sistem Adat 182
6. Harmonisasi antara Hukum Negara dan Hukum Adat 182
15.5. Tantangan dan Risiko 183
1. Tantangan Konseptual dan Ideologis 183
2. Risiko Instrumentalisasi Politik dan Klanisme 184
3. Ketimpangan Representasi dan Risiko Marginalisasi 185
4. Fragmentasi Sistem Hukum dan Tata Kelola 186
5. Ketahanan Institusional dan Sumber Daya 187
15.6. Kesimpulan 188
BAB 16: KONTRIBUSI STRATEGIS *LIURAI* BAGI MASA DEPAN TIMOR-LESTE 189
16.1. Pendahuluan 189
16.2. Pilar Strategis: Kebudayaan, Perdamaian, dan Pembangunan Berkelanjutan 190
1. Pilar Kebudayaan: Revitalisasi Identitas Nasional 190
2. Pilar Perdamaian: Mediasi Sosial dan Resolusi Konflik Berbasis Adat 191
3. Pilar Pembangunan Berkelanjutan: Integrasi Nilai Lokal dalam Pembangunan 191
4. Peran *Liurai* dalam Pendidikan Kultural dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal . 192
5. Sinergi antara Negara Modern dan Institusi Adat 192
16.3. Rekonstruksi Peran *Liurai* dalam Tata Kelola Negara 193
1. Rasionalisasi Sosial-Politik: Kebutuhan Integrasi Budaya 194
2. Dimensi Rekonstruksi: Legislasi, Kelembagaan, dan Fungsi 194
3. Model Hybrid Governance: Sinergi Negara dan Adat 195
4. Prasyarat Keberhasilan Rekonstruksi 195
5. Kontribusi Strategis terhadap Masa Depan Negara 196
16.4. Diplomasi Budaya dan Posisi Global Timor-Leste 196
1. Konsep Diplomasi Budaya dalam Konteks Timor-Leste 197
2. Peran Strategis *Liurai* dalam Diplomasi Budaya 198
3. Diplomasi Identitas dan Keunggulan Komparatif Timor-Leste 198
4. Tantangan dan Strategi Penguatan 199

5. Peluang Masa Depan: Soft Power Timor-Leste di Dunia 200
16.5. Rekomendasi Strategis dan Kebijakan Publik 200
1. Pengakuan Konstitusional dan Penguatan Yuridis 201
2. Integrasi dalam Sistem Pemerintahan Lokal dan Pembangunan Partisipatif . 201
3. Reformasi Pendidikan Berbasis Budaya Lokal 202
4. Pemberdayaan Ekonomi Adat dan Diplomasi Budaya 202
5. Pembentukan Lembaga Nasional dan Forum Adat 203
6. Monitoring, Evaluasi, dan Standarisasi Peran Adat 203
7. Pelindungan Hak Kolektif dan Wilayah Adat 204
16.6. Penutup: Menuju Negara Berdaulat Berbasis Budaya 204
1. *Liurai* sebagai Pilar Rekonsiliasi Sejarah dan Fondasi Identitas Nasional 205
2. Negara Adat-Demokratis: Paradigma Kedaulatan Baru 205
3. Integrasi Strategis: Dari Dokumentasi Menuju Transformasi 206
4. Menuju Timor-Leste yang Merdeka, Adil, no Berbuday 206
GLOSARIUM 208
DAFTAR PUSTAKA 212

BAGIAN I: TIMOR-LESTE DARI ZAMAN PRA-SEJARAH HINGGA ERA PRA-KOLONIAL PORTUGIS

BAB 1: SEJARAH GEOLOGIS PULAU TIMOR

1.1. Pendahuluan

Pemahaman terhadap sejarah geologis Pulau Timor merupakan fondasi penting dalam menafsirkan perjalanan historis, budaya, serta perkembangan struktur sosial masyarakat Timor-Leste, termasuk munculnya komunitas lokal dan sistem kepemimpinan tradisional *liurai*. Pulau Timor, yang terletak di ujung tenggara kepulauan Nusantara, berada di perbatasan tektonik aktif antara Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia. Proses geodinamika yang kompleks ini telah membentuk lanskap fisik yang sangat memengaruhi pola migrasi manusia dan pemukiman sejak masa prasejarah (Charlton, 2000; Hall, 2002).

Keberadaan pegunungan terjal, lembah curam, dan zona patahan aktif di Timor menyebabkan fragmentasi geografis yang mendorong pembentukan komunitas-komunitas yang terisolasi. Geologi Timor bukan hanya berfungsi sebagai latar belakang fisik, melainkan juga sebagai struktur dasar yang membentuk ekologi sosial dan politik masyarakat lokal (Audley-Charles, 1986). Hal ini menjelaskan mengapa struktur kepemimpinan tradisional, seperti sistem *liurai*, berkembang secara lokal dan terhubung dengan karakteristik geopolitik serta ekologis yang khas.

Sebagaimana dijelaskan oleh Fox (1980), hubungan antara bentang alam dan tata kelola masyarakat di Timor bersifat organik dan berakar pada kosmologi lokal. Sistem *liurai* tidak hanya berdasarkan keturunan, tetapi juga pada kontrol terhadap wilayah, sumber daya alam, dan kemampuan mediasi dalam komunitas yang terisolasi oleh medan geografis. Oleh karena itu, memahami geologi Timor berarti memahami logika

teritorial, legitimasi kepemimpinan adat, dan kontinuitas sosial budaya yang dipertahankan di tengah perubahan politik sepanjang sejarah.

Lanskap geologis Pulau Timor yang dipengaruhi oleh aktivitas tektonik regional menjadi aspek esensial dalam memahami akar sejarah bangsa ini. Sejarah geologi pulau ini membentuk fondasi material bagi lahirnya peradaban lokal, struktur sosial awal, serta sistem *liurai* yang memegang peran vital dalam menjaga kesinambungan sosial-politik. Pemahaman mendalam terhadap geologi membuka jalan bagi analisis holistik yang mengaitkan interaksi antara alam, manusia, dan kuasa dalam konteks historis serta kultural Timor-Leste.

1.2. Asal-Usul Geologis dan Struktur Tektonik Pulau Timor

Pulau Timor terbentuk melalui proses tumbukan lempeng tektonik antara Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia, yang dimulai sejak periode Miosen Akhir, sekitar 10 juta tahun yang lalu, dan masih berlangsung hingga saat ini (Charlton, 2002; Hall, 2002). Tumbukan ini menghasilkan zona orogenik aktif yang dikenal sebagai Timor Trough, yang menciptakan pegunungan lipatan, sesar aktif, serta kompleks batuan terangkat (Audley-Charles, 1986). Proses geologis ini memainkan peran utama dalam pembentukan bentang alam dan struktur tektonik Timor, yang secara signifikan mempengaruhi kondisi geohidrologi serta pola sosial dan politik di wilayah tersebut.

1. Batuan Penyusun Timor

Batuan dasar Pulau Timor didominasi oleh formasi sedimen laut dalam, seperti serpih dan batu gamping, serta kompleks ofiolit dan batuan metamorf tingkat rendah. Formasi ofiolit, yang merupakan bagian dari kerak samudera yang terangkat akibat subduksi dan obduksi, merupakan salah satu ciri khas geologi Timor (Harris, 2011). Kehadiran batuan vulkanik di wilayah ini mencerminkan dinamika geotektonik yang

aktif, yang terus berlangsung hingga saat ini. Selain itu, Timor juga memiliki batuan metamorf yang menunjukkan bukti proses subduksi yang intensif di kawasan ini. Keunikan komposisi geologis ini menjadikan Timor kaya akan potensi sumber daya alam, termasuk marmer, mangan, dan potensi hidrokarbon, meskipun eksplorasi ekonomisnya masih terbatas.

2. Struktur Tektonik dan Relief

Timor memiliki struktur tektonik yang sangat kompleks, ditandai oleh adanya sesar-sesar utama seperti Lolotoi Fault dan Wetar Thrust. Bersama dengan lipatan dan patahan lainnya, struktur ini menciptakan relief yang ekstrem di berbagai bagian pulau. Kondisi geologis ini juga memengaruhi sistem geohidrologi, seperti persebaran mata air dan sungai yang tidak merata, serta keterbatasan lahan subur di wilayah pegunungan (Audley-Charles, 1986; Charlton, 2002).

Struktur tektonik ini membentuk berbagai zona patahan yang berperan penting dalam membatasi wilayah dan membentuk batas-batas alamiah antara komunitas. Sistem sesar dan lipatan ini juga mempengaruhi pola aliran air, yang berkontribusi pada terbentuknya jalur sungai dan mata air yang terdistribusi secara tidak merata. Kondisi ini menjadi faktor penting dalam pembentukan ekosistem lokal, serta memengaruhi ketersediaan lahan pertanian dan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh komunitas lokal.

3. Implikasi Sosial dan Ekonomi

Proses geologis yang panjang ini tidak hanya memengaruhi kondisi fisik dan ekologi Pulau Timor, tetapi juga berkontribusi pada struktur sosial dan politik tradisional masyarakat. Fragmentasi spasial yang disebabkan oleh morfologi pegunungan dan sesar-sesar aktif membentuk batas wilayah alami, yang pada gilirannya mempengaruhi

pola interaksi sosial antara komunitas yang tersebar di berbagai daerah. Dalam konteks sosiopolitik, keterbatasan akses geografis akibat topografi ekstrem turut membentuk sistem kepemimpinan lokal berbasis otonomi dan kedaulatan wilayah. Hal ini terlihat pada munculnya institusi *liurai*, yang merupakan sistem kepemimpinan tradisional yang terbentuk seiring dengan perkembangan geografi dan ekologi wilayah tersebut (Fox, 1980).

Keberadaan sumber daya alam seperti marmer, mangan, dan potensi hidrokarbon telah memengaruhi pola ekonomi lokal serta menjadi faktor penting dalam dinamika kolonialisme dan eksploitasi sumber daya oleh kekuatan eksternal. Meskipun eksplorasi modern masih terbatas, sumber daya alam ini tetap menjadi bagian dari narasi panjang yang menghubungkan geologi, kekuasaan, dan ketahanan komunitas di Timor (Harris, 2011).

Secara keseluruhan, asal-usul geologis dan struktur tektonik Pulau Timor memberikan dasar bagi karakter geografis dan ekologis yang khas di wilayah ini. Lanskap yang terfragmentasi dan relief yang ekstrem mempengaruhi struktur sosial, ekonomi, dan politik lokal, serta membentuk sistem kepemimpinan dan interaksi antar komunitas. Kondisi geologis ini tidak hanya membentuk bentuk fisik pulau, tetapi juga menjadi faktor pembentuk dalam sejarah sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Timor-Leste, termasuk pembentukan institusi *liurai* yang masih bertahan hingga saat ini.

1.3. Iklim, Topografi, dan Pengaruh Terhadap Permukiman di Pulau Timor

1. Iklim dan Musim

Pulau Timor, yang mencakup wilayah Timor-Leste, memiliki iklim tropis monsun dengan dua musim utama yang sangat mempengaruhi pola permukiman manusia

sejak masa prasejarah. Musim hujan berlangsung dari sekitar bulan November hingga April, sementara musim kemarau terjadi antara Mei hingga Oktober. Pola iklim ini dipengaruhi oleh angin monsun Asia dan Australia yang sangat variabel dari tahun ke tahun (Monk et al., 1997; Fox, 2003). Selain itu, curah hujan yang tidak merata dan distribusi air tanah yang terbatas di sebagian besar wilayah menjadikan ketersediaan air sebagai faktor utama dalam penentuan lokasi pemukiman manusia di Timor.

2. Topografi dan Geografi

Topografi Pulau Timor sangat beragam, dengan dominasi pegunungan terjal, perbukitan karst, dan lembah sempit yang menciptakan fragmentasi ekologis yang signifikan. Wilayah dataran tinggi yang terletak di bagian tengah dan selatan pulau memiliki tanah yang relatif subur dan iklim mikro yang lebih sejuk. Di kawasan ini, terdapat sumber air alami yang berkelanjutan, seperti mata air abadi, sungai pegunungan, dan danau vulkanik, yang menjadikan kawasan ini sebagai pusat pemukiman awal masyarakat prasejarah dan leluhur masyarakat adat modern (Fox, 1980; McWilliam, 2007). Sebaliknya, dataran pantai utara, yang lebih kering dan rentan terhadap kekeringan musiman, sering dimanfaatkan sebagai jalur perdagangan, pelayaran, dan migrasi antar kelompok, meskipun wilayah ini kurang cocok untuk pertanian menetap skala besar.

3. Adaptasi terhadap Lingkungan

Kondisi geografi yang keras dan terfragmentasi mempengaruhi perkembangan pola permukiman yang terdesentralisasi dan otonom. Di daerah dataran tinggi, masyarakat mengembangkan teknik pertanian yang sangat adaptif terhadap lingkungan, seperti sistem ladang berpindah, terasering, dan konservasi hutan sakral sebagai bentuk ekologi spiritual yang juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam (Fox, 2003; McWilliam, 2007). Sementara itu, di wilayah dataran rendah, masyarakat lebih

mengandalkan aktivitas maritim, pertukaran antar komunitas, dan pengelolaan kolektif tanah kering untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

4. Komunitas dan Struktur Sosial

Geografi yang terisolasi mendorong pembentukan komunitas-komunitas lokal yang mandiri dan otonom. Masing-masing komunitas atau klan membentuk struktur sosial dan politik berdasarkan wilayah ekologis mereka, sering kali dipimpin oleh *liurai*, atau pemimpin tradisional, yang memperoleh legitimasi melalui garis keturunan, penguasaan wilayah strategis, dan hubungan spiritual dengan tanah leluhur (rai lulik). Posisi geografis yang strategis, seperti di puncak bukit atau dekat sumber air, menjadi faktor penting dalam legitimasi sosial-politik para *liurai* sebagai pemimpin lokal (Traube, 1986).

Kondisi ini menciptakan sistem sosial-politik yang otonom, di mana setiap komunitas memiliki struktur pemerintahan dan tradisi yang kuat, berlandaskan pada hubungan yang dalam antara manusia, alam, dan leluhur. Struktur *liurai*, yang lahir dari relasi mendalam ini, bukan hanya berfungsi sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan ekologis yang melibatkan hubungan spiritual dengan alam dan leluhur.

Iklim, topografi, dan kondisi geografis Pulau Timor memiliki pengaruh besar terhadap pola permukiman, struktur sosial, dan organisasi politik di wilayah ini. Pengaruh iklim yang dipengaruhi oleh angin monsun, serta kondisi geografis yang terfragmentasi dan sulit diakses, mendorong pembentukan komunitas-komunitas yang mandiri dan otonom. Adaptasi terhadap kondisi ini menghasilkan sistem pertanian yang berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam secara kolektif. Lebih dari itu, hubungan spiritual dengan alam dan leluhur memberikan fondasi bagi struktur sosial yang mengakar kuat dalam budaya masyarakat Timor.

1.4. Dampak Geologis terhadap Struktur Sosial Tradisional

1. Pengaruh Geologi terhadap Pembentukan Komunitas

Kondisi geologis Pulau Timor telah memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan struktur sosial tradisional masyarakatnya. Relief alam yang terdiri atas pegunungan terjal, lembah dalam, dan kawasan berbatu menciptakan isolasi ekologis antar komunitas. Keadaan ini mendorong berkembangnya kelompok-kelompok sosial yang mandiri, yang berakar pada sistem kekerabatan serta kontrol terhadap sumber daya lokal. Komunitas-komunitas ini biasanya membentuk sistem kepemimpinan berdasarkan klan (*uma*) dan secara geografis bermukim di lokasi strategis seperti puncak bukit, mata air, atau kawasan dengan pertahanan alami. Hal ini memberi mereka keunggulan dalam mempertahankan diri dari potensi serangan eksternal maupun internal (McWilliam, 2003; Therik, 2004).

Di kawasan ini, muncul struktur rumah adat (*uma lulik*) yang menjadi simbol kekuasaan dan identitas komunitas. *Liurai*, sebagai pemimpin tradisional, tidak hanya berfungsi sebagai kepala klan atau pemimpin militer, tetapi juga sebagai penjaga spiritualitas wilayah dan pemelihara keseimbangan antara manusia, leluhur, dan alam. Oleh karena itu, posisi *liurai* sangat terkait dengan legitimasi yang diperoleh melalui hubungan spiritual dengan wilayah geografis tertentu—seperti gunung, batu karang, gua, mata air, dan hutan yang dianggap sakral (*lulik*). Elemen-elemen geologis ini menjadi simbol kekuasaan dan identitas kolektif yang dijaga dalam ritus-ritus adat, seperti tarabandu (larangan adat), upacara kesuburan, dan perjanjian antarklan (Fox, 2003; Traube, 1986).

2. Struktur Sosial dan Kekuasaan Lokal

Geologi yang beragam juga menciptakan batas-batas alamiah yang memperkuat segmentasi teritorial di Timor. Segmentasi ini mendorong terbentuknya federasi atau

konfederasi suku yang biasanya dipimpin oleh seorang *liurai* agung, yang berfungsi sebagai tokoh pemersatu antar komunitas. Struktur ini didasarkan pada relasi antarwilayah dan konsensus antar *liurai*, mencerminkan model proto-demokrasi lokal yang tumbuh organik dari kondisi geografis yang menantang (Niner, 2009). Dengan demikian, sistem sosial di Timor-Leste bukan hanya bersifat terpusat, tetapi juga didasarkan pada hubungan antara komunitas yang saling menghormati batas-batas geografis dan peran yang dimiliki oleh masing-masing *liurai*.

Kekuasaan *liurai* tidak bersifat absolut, melainkan berbasis pada konsensus dan hubungan spiritual yang mendalam antara manusia dan alam. Hal ini menandakan bahwa pemimpin tradisional ini memegang peran sebagai mediator antara dunia manusia dan dunia roh, serta penjaga keharmonisan dalam hubungan antarmanusia dan dengan alam. Konsep ini juga terhubung dengan sistem pertanian dan pengelolaan sumber daya alam, yang sering kali berlandaskan pada prinsip-prinsip ekologi spiritual dan konservasi sumber daya alam yang sakral (McWilliam, 2005).

3. Strategi Pertahanan dan Perlindungan Teritorial

Selain peran sosial dan spiritual, kondisi geologi juga berpengaruh pada strategi pertahanan tradisional masyarakat Timor. Lokasi pemukiman yang dipilih di daerah tinggi atau terjal memberikan keuntungan strategis dalam pengawasan dan pertahanan terhadap ancaman dari luar. Pemukiman-pemukiman yang terletak di puncak bukit atau lembah sempit, yang secara alami sulit dijangkau, memungkinkan komunitas untuk mempertahankan diri dengan lebih mudah (Fox, 1980). *Liurai* bertindak sebagai penjaga batas teritorial, sekaligus sebagai juru damai yang merundingkan perbatasan wilayah dengan komunitas tetangga.

Dengan demikian, geologi Pulau Timor tidak hanya membentuk lanskap fisik, tetapi juga struktur sosial dan politik yang kompleks. Para *liurai*, yang muncul sebagai entitas

historis dan kultural, memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas dan ketahanan komunitas lokal sepanjang sejarah Timor. Peran mereka tidak dapat dipisahkan dari konteks ekologis, spiritual, dan geopolitik yang khas Timor-Leste.

1.5. Kesimpulan

Sejarah geologis Pulau Timor memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk identitas geografis, ekologis, dan sosial budaya Timor-Leste. Proses-proses tektonik dan geomorfologis yang terjadi selama jutaan tahun telah menciptakan bentang alam yang unik dan menantang, yang tidak hanya menghasilkan lingkungan fisik yang kompleks, tetapi juga menyediakan kerangka ekologis yang menjadi dasar bagi lahirnya komunitas-komunitas tradisional di wilayah ini.

Topografi yang terjal, iklim musiman yang keras, dan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas membentuk pola hidup dan pola pemukiman masyarakat Timor. Kondisi geografis yang isolatif memicu perkembangan kelompok-kelompok sosial yang mandiri, dengan sistem kepemimpinan yang khas. Dalam konteks ini, *liurai*, sebagai pemimpin tradisional, memegang peran sentral tidak hanya dalam fungsi administratif atau militer, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur. Mereka memperoleh legitimasi melalui hubungan kosmologis dan ekologis yang mendalam dengan tanah dan lingkungan tempat mereka tinggal.

Penting untuk memahami sejarah geologis Timor, karena hal ini tidak hanya memberikan wawasan tentang masa lalu fisik pulau ini, tetapi juga merupakan langkah awal yang krusial dalam menyusun sejarah yang lebih holistik. Sejarah ini mengintegrasikan dimensi fisik, ekologis, spiritual, dan sosial yang membentuk struktur sosial tradisional Timor-Leste. Dalam perjalanan panjang bangsa Timor-Leste, geologi menjadi panggung peradaban, dan *liurai* memainkan peran utama sebagai aktor yang tidak terpisahkan dari konteks lanskap tempat mereka hidup dan memimpin.

BAB 2: MIGRASI KE PULAU TIMOR

2.1. Pendahuluan

Migrasi manusia ke Pulau Timor merupakan bagian integral dari sejarah panjang pembentukan identitas etnis, linguistik, dan struktur sosial masyarakat Timor-Leste. Pulau Timor, yang terletak di jalur migrasi manusia dari Asia Tenggara menuju Oseania, telah menjadi titik strategis dalam lintasan mobilitas populasi manusia prasejarah, baik sebagai tujuan akhir maupun titik perlintasan dan persinggahan berbagai kelompok sejak ribuan tahun silam (Bellwood, 2007; Spriggs, 2011).

Bukti arkeologis dan linguistik menunjukkan bahwa proses migrasi ke Timor terjadi secara bertahap dalam beberapa gelombang besar, dimulai sejak periode Paleolitikum sekitar 40.000 tahun lalu hingga zaman Neolitikum dan prasejarah akhir (Bellwood, 2005; O'Connor, 2003). Migrasi awal ini ditandai oleh masuknya kelompok-kelompok pemburu-pengumpul Austro-Melanesoid, diikuti oleh migrasi besar masyarakat penutur Austronesia yang membawa teknologi pertanian, teknologi maritim seperti perahu, serta sistem sosial yang lebih kompleks.

Setiap gelombang migrasi membawa manusia, teknologi, budaya, sistem nilai, dan struktur kekerabatan yang kemudian beradaptasi dengan kondisi geografis dan ekologis Pulau Timor yang unik. Interaksi antara pendatang dan komunitas lokal menghasilkan proses etnogenesis, yaitu pembentukan komunitas etnokultural baru yang memadukan unsur-unsur budaya dari berbagai asal-usul (Fox, 1996). Dari sinilah berkembang komunitas-komunitas awal yang kemudian membentuk struktur klan, rumah adat (*uma lulik*), dan institusi *liurai* sebagai pemimpin tradisional.

Migrasi ini juga berkontribusi pada kemunculan keberagaman linguistik di Timor-Leste. Saat ini terdapat kombinasi bahasa Austronesia dan non-Austronesia (Papuan),

yang masing-masing memiliki distribusi wilayah dan fungsi sosial berbeda (Hull, 2004; Schapper, 2021). Keberagaman ini mencerminkan jejak historis dari interaksi migrasi, kontak antarbudaya, dan adaptasi lokal yang kompleks.

Selain aspek linguistik dan budaya, narasi asal-usul *liurai* dalam banyak komunitas Timor-Leste juga mencerminkan dimensi migrasi sebagai legitimasi kekuasaan. Klaim asal-usul dari tempat jauh atau "tanah leluhur trans-lokal" sering digunakan untuk memperkuat posisi spiritual dan politik seorang *liurai* (Therik, 2004). Dengan demikian, migrasi manusia ke Pulau Timor tidak hanya berfungsi sebagai proses demografis, tetapi juga menjadi fondasi mitologis dan politik dalam struktur sosial masyarakat.

Bagian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematik jalur dan gelombang migrasi manusia ke Pulau Timor berdasarkan bukti arkeologis, linguistik, dan etnografis, serta menganalisis bagaimana dinamika migrasi membentuk struktur sosial awal dan nilai-nilai budaya yang berkelanjutan dalam masyarakat Timor-Leste. Analisis ini penting untuk memahami akar dari sistem kekuasaan tradisional, terutama peran para *liurai* sebagai simbol kontinuitas budaya yang berakar dari mobilitas manusia di masa lalu.

2.2. Gelombang Migrasi Awal dan Bukti Arkeologis

1. Kedatangan Awal Homo Sapiens ke Pulau Timor

Migrasi awal ke Pulau Timor merupakan bagian dari ekspansi manusia modern (Homo sapiens) yang bermigrasi dari daratan Asia Tenggara menuju wilayah Wallacea dan Oseania bagian barat, termasuk Nusa Tenggara (O'Connor, 2007; O'Connor, Ono, & Clarkson, 2011). Berdasarkan bukti arkeologis yang ditemukan di situs-situs gua seperti Jerimalai, Lene Hara, dan Matja Kuru di kawasan Lautém, Timor-Leste, manusia telah menghuni pulau ini setidaknya sejak sekitar 42.000 tahun yang lalu.

Gelombang migrasi pertama ini diperkirakan terdiri dari kelompok pemburu-pengumpul Australomelanesoid yang menempuh jalur laut melalui Kepulauan Sunda Kecil. Mereka bermukim di gua-gua pesisir dan sangat bergantung pada sumber daya laut. Temuan alat batu, sisa makanan laut, dan tulang ikan pelagis seperti tuna dan marlin menunjukkan kemampuan tinggi dalam teknologi maritim, termasuk penangkapan ikan laut dalam sejak periode awal (O'Connor et al., 2011; Anderson, 2017).

2. Adaptasi Ekologis dan Kehidupan Sosial Awal

Penduduk awal Timor menunjukkan tingkat kecanggihan adaptasi terhadap lingkungan keras dan berbatu. Mereka mengembangkan teknik pengelolaan sumber daya laut, pertanian musiman di tanah kering, serta membangun sistem sosial berbasis klan dan spiritualitas leluhur. Struktur sosial ini ditandai dengan praktik-praktik ritual sakral dan hubungan erat antara manusia dengan elemen alam, seperti gunung, batu besar, dan mata air (McWilliam, 2007).

Bukti arkeologis tidak hanya memperlihatkan kehadiran manusia secara fisik, tetapi juga dinamika sosial-ekologis yang memungkinkan mereka bertahan dan membangun komunitas-komunitas stabil dalam kondisi geografis yang menantang.

3. Gelombang Migrasi Austronesia dan Pembentukan Masyarakat Hibrid

Sekitar 4.000 hingga 3.000 tahun yang lalu, gelombang migrasi kedua tiba di Timor melalui ekspansi Austronesia. Kelompok ini membawa bahasa Austronesia, teknologi pertanian, domestikasi tanaman seperti padi, ubi, dan keladi, serta hewan seperti ayam dan babi (Bellwood, 2005; Spriggs, 2011). Mereka menetap terutama di pesisir dan dataran rendah, memperkenalkan sistem sosial yang lebih hierarkis, termasuk struktur rumah adat (uma lulik) sebagai pusat kehidupan sosial.

Interaksi antara penduduk asli dan migran Austronesia membentuk masyarakat hibrid, dengan sintesis budaya yang unik. Struktur kepemimpinan lokal, seperti sistem *liurai*, berkembang sebagai adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial dan kebutuhan organisasi komunitas yang lebih kompleks (Fox, 1996; Traube, 1986).

4. Integrasi Budaya dan Evolusi Sosial-Politik

Narasi-narasi asal-usul lokal seringkali menggabungkan memori migrasi leluhur dengan simbol-simbol geologis sakral, memperlihatkan hubungan erat antara migrasi, spiritualitas, dan legitimasi kekuasaan. Legitimasi sosial-politik *liurai*, misalnya, dibangun di atas fondasi simbolik yang menghubungkan asal-usul komunitas dengan elemen-elemen alam dan sejarah migrasi panjang nenek moyang mereka.

Dengan demikian, migrasi-migrasi awal ini merupakan fondasi historis pembentukan komunitas-komunitas lokal di Timor yang kemudian berkembang menjadi unit-unit kekuasaan tradisional. Evolusi struktur sosial seperti *liurai* adalah hasil dari proses sosial panjang yang berakar dalam mobilitas manusia, adaptasi ekologis, dan kontinuitas budaya selama ribuan tahun (McWilliam, 2007).

2.3. Asal-Usul Klan dan Identitas Leluhur dalam Tradisi Lisan Timor

1. Tradisi Lisan sebagai Sumber Epistemologis

Dalam masyarakat Timor, tradisi lisan berperan sebagai sumber pengetahuan utama mengenai asal-usul klan, migrasi leluhur, dan struktur sosial awal, mengingat ketiadaan catatan tertulis sebelum kedatangan kolonialisme (Traube, 1986; Fox, 1988). Narasi-narasi ini diwariskan lintas generasi melalui syair ritual, mitos penciptaan, dan

kisah-kisah leluhur, yang bukan hanya membangun identitas komunitas, tetapi juga menopang struktur sosial dan legitimasi kepemimpinan lokal.

Tradisi lisan tidak hanya berfungsi sebagai alat penceritaan sejarah, tetapi juga membentuk struktur ruang, waktu, dan kuasa dalam komunitas Timor. Ia menjadi sistem epistemologis yang mengatur hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan kekuatan spiritual yang mengikat komunitas secara kolektif (McWilliam, 2003).

2. Mitos Asal-Usul dan Sakralitas Geografis

Setiap klan (*uma*) memiliki mitos asal-usul yang biasanya berkaitan erat dengan fitur geologis seperti gunung, batu besar, gua, atau mata air, yang dianggap sebagai titik kedatangan atau kelahiran leluhur (Traube, 1986; Fox, 1988). Lokasi-lokasi ini dinilai *lulik* (sakral) dan menjadi pusat pembentukan rumah adat (*uma lulik*), yang berfungsi sebagai ruang kosmologis penghubung antara manusia, alam, dan dunia roh.

Dalam banyak komunitas, terdapat narasi tentang leluhur yang datang "dari laut" atau "dari arah timur", yang merepresentasikan gelombang migrasi awal dari wilayah luar Timor. Para leluhur ini digambarkan sebagai tokoh sakti yang mampu membuka hutan, menundukkan roh penjaga alam, dan mendirikan pemukiman pertama sebagai pusat ritus, hukum, dan memori kolektif komunitas (McWilliam, 2003).

3. Struktur Sosial: Genealogi, Totemisme, dan Aliansi

Struktur klan dalam masyarakat Timor didasarkan pada prinsip genealogis-patrilineal, di mana garis keturunan dan kepemimpinan diwariskan melalui laki-laki tertua. Namun, dalam praktiknya, relasi afinitas melalui perkawinan antar-klan, aliansi kosmologis, serta pengakuan asal-usul bersama juga berperan penting dalam memperkuat kohesi sosial (Fox, 1996).

Banyak klan memiliki relasi simbolik dengan totem tertentu—binatang, tumbuhan, atau elemen alam—yang dianggap sebagai penjelmaan roh leluhur atau entitas pelindung spiritual. Sistem totemisme ini menegaskan pentingnya ekologi spiritual dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Timor.

4. Peran *Liurai* dan Legitimasi Kepemimpinan

Dalam tatanan sosial tradisional, *liurai* muncul sebagai figur sentral yang dianggap keturunan langsung dari leluhur agung. Legitimasi mereka berasal dari narasi asal-usul, kepemilikan tanah, kekuasaan ritual, dan otoritas dalam menjaga hukum adat (tara bandu) (Therik, 2004; Traube, 1986). *Liurai* bukan hanya pemimpin politik, melainkan juga penjaga keseimbangan spiritual komunitas, penafsir kosmologi, dan penjaga kontinuitas hubungan antara manusia, alam, dan roh leluhur.

Struktur kekuasaan lokal sejak awal bersifat kosmoteokratis, menggabungkan otoritas spiritual dan administratif, yang berakar pada hak warisan tanah dan legitimasi naratif kosmologis.

5. Mobilitas Antarklan dan Dinamika Identitas

Tradisi lisan juga mencerminkan mobilitas klan dalam konteks migrasi sekunder, konflik, atau pembentukan aliansi baru. Banyak klan mengklaim asal-usul dari luar Timor seperti Wetar, Ambon, Flores, atau wilayah Nusantara lainnya, menunjukkan bahwa identitas Timor terbentuk dalam dinamika trans-lokal yang aktif namun tetap berakar kuat pada sakralitas tanah leluhur.

Dengan demikian, asal-usul klan dan identitas leluhur dalam tradisi lisan Timor tidak dapat dipandang sebagai sekadar folklor atau mitos. Ia merupakan sistem

epistemologis dan legitimatif yang menopang struktur sosial, membentuk memori kolektif, serta memperkuat kekuasaan *liurai* sebagai simbol kontinuitas budaya dan spiritualitas masyarakat Timor.

2.4. Konsolidasi Klan dan Cikal-Bakal Kepemimpinan *Liurai* Awal

1. Dinamika Awal Konsolidasi Klan di Timor

Proses konsolidasi klan di Pulau Timor tidak berlangsung seragam atau serentak, melainkan melalui dinamika historis panjang yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, interaksi antarkelompok, serta adaptasi terhadap faktor ekologis (Fox, 1980; McWilliam, 2003). Setelah gelombang awal migrasi dan pembentukan komunitas berbasis *uma* (klan), kebutuhan akan struktur sosial yang lebih stabil dan terorganisir muncul untuk mengatur hak atas tanah, mengelola sumber daya, serta menjaga harmoni dengan dunia spiritual dan sosial.

Seiring meningkatnya populasi dan intensitas relasi antarklan, terjadi proses hierarkisasi internal, di mana beberapa klan berkembang menjadi dominan karena penguasaan wilayah strategis, sumber air, atau lokasi ritus sakral (Fox, 1993; McWilliam, 2005). Aliansi antar-klan juga terbentuk secara bertahap, bertujuan memenuhi kebutuhan keamanan, pertanian kolektif, pengelolaan sumber daya, serta memperkuat identitas terhadap kelompok luar (McWilliam, 2007).

2. Munculnya Figur *Liurai*: Kepemimpinan Spiritual dan Politik

Dalam konteks konsolidasi ini, muncul figur-figur kepemimpinan yang memiliki kharisma spiritual, kekuatan magis, dan kapasitas administratif, yang kemudian dikenal sebagai *liurai* (Traube, 1986; Niner, 2009). Gelar *liurai*, yang secara harfiah berarti "yang

memerintah di darat", mencerminkan otoritas atas tanah, sumber daya, serta komunitas dalam lingkup wilayah tertentu.

Liurai awal tidak hanya bertindak sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai penjaga hubungan kosmologis antara manusia dan alam. Otoritas *liurai* bersumber dari garis keturunan yang dikaitkan dengan leluhur sakral, diperkuat oleh narasi asal-usul klan, peran dalam ritus adat, dan kemampuan menjaga keseimbangan sosial (Therik, 2004).

Dalam banyak narasi tradisional, *liurai* adalah keturunan tokoh pendiri *uma lulik* pertama atau orang yang membuka tanah pertama (*rai hun*). Legitimasi politik *liurai* sangat bergantung pada pengakuan spiritual terhadap tanah leluhur, serta keberhasilan dalam memediasi konflik dan menjaga kohesi komunitas.

3. Struktur Sosial dan Aliansi Politik Tradisional

Institusi *liurai* awal terbentuk bukan sebagai monarki absolut, melainkan sebagai formasi kekuasaan kolektif berbasis konsensus adat. Struktur sosial politik berbasis klan berkembang menjadi unit-unit politik semi-otonom yang dikenal sebagai *reinu* atau kerajaan kecil, dipimpin oleh seorang *liurai* yang didukung oleh penasihat adat, tetua klan, dan pemimpin ritual.

Hubungan antar *reinu* bersifat dinamis—terkadang kooperatif melalui sistem *feto sanan–umane* (aliansi pernikahan dan pertukaran ritus), dan di waktu lain kompetitif melalui perang lokal. Di beberapa wilayah seperti Wehali, Biboki, atau Lamaknen, struktur kekuasaan bersifat dualistik dan simbolik, dengan pemisahan peran antara pemimpin spiritual (*feto*) dan pemimpin politik (*nain*) (McWilliam, 2007; Fox, 1993).

Struktur kekuasaan ini juga berlapis dan hierarkis, dengan adanya *liurai* besar yang mengoordinasikan wilayah yang lebih luas, seperti di Wehale (sekarang Timor Tengah Selatan) dan Likusaen (kini Liquiçá), yang berfungsi sebagai pusat kekuasaan simbolik dan spiritual (McWilliam, 2007).

4. Peran Adat, Spiritualitas, dan Mobilisasi Sosial

Kekuatan seorang *liurai* tidak hanya dinilai dari penguasaan militer, tetapi lebih pada otoritas moral, kapasitas spiritual, dan kemampuan memelihara keseimbangan kosmos. Fungsi *liurai* tercermin dalam pengelolaan *tara bandu* (hukum adat), distribusi lahan, dan penyelesaian sengketa antar komunitas (Therik, 2004; Traube, 1986).

Mobilisasi kekuasaan dilakukan secara terbatas dan lokal, menekankan prinsip harmoni dan kohesi sosial ketimbang dominasi fisik. Rumah adat menjadi pusat genealogis dan tempat pengambilan keputusan strategis, menegaskan pentingnya hubungan spiritual dengan leluhur dalam struktur kekuasaan lokal (Fox, 1993; McWilliam, 2003).

5. Signifikansi Sejarah Konsolidasi Klan

Proses konsolidasi klan dan pembentukan institusi *liurai* membuktikan kapasitas masyarakat Timor dalam membangun sistem pemerintahan berbasis nilai-nilai adat dan spiritualitas, jauh sebelum kedatangan kekuasaan kolonial. Model kekuasaan ini menjadi fondasi struktur pemerintahan lokal yang bertahan hingga masa kolonial dan bahkan mempengaruhi struktur sosial-politik Timor-Leste pascakemerdekaan.

2.5. Kesimpulan

Sejarah migrasi ke Pulau Timor merupakan fondasi utama bagi pembentukan identitas etnis, struktur sosial, dan kepemimpinan tradisional masyarakat Timor-Leste. Dari gelombang awal manusia modern yang menghuni gua-gua pesisir sejak 42.000 tahun lalu hingga kedatangan kelompok Austronesia dengan sistem sosial dan teknologi pertanian, proses migrasi ini menghasilkan interaksi budaya yang kompleks dan dinamis (O'Connor, 2007; Bellwood, 2007).

Tradisi lisan masyarakat Timor memainkan peran sentral dalam menjaga dan mereproduksi memori kolektif mengenai asal-usul klan dan leluhur. Melalui mitos-mitos asal-usul, syair ritus, serta narasi kosmologis, masyarakat membangun legitimasi sosial dan spiritual atas ruang, identitas, serta kepemimpinan lokal. Klan-klan berkembang sebagai unit sosial-politik berbasis tanah dan spiritualitas leluhur, yang menjadi basis munculnya sistem *liurai* sebagai pemimpin adat dan pelindung hukum alam (Traube, 1986; McWilliam, 2003).

Konsolidasi antarklan dan pembentukan institusi *liurai* tidak hanya merepresentasikan struktur kekuasaan, tetapi juga mencerminkan ekologi budaya yang berakar kuat pada pengalaman migrasi, adaptasi ekologis, dan pengelolaan kolektif atas ruang sakral. Dalam konteks ini, *liurai* tidak muncul sebagai raja dalam pengertian feodal, melainkan sebagai penjaga kosmos lokal—pemimpin yang menggabungkan otoritas genealogis, spiritual, dan sosial (Niner, 2009; Therik, 2004).

Dengan demikian, bab ini menunjukkan bahwa sejarah migrasi ke Pulau Timor bukan hanya kisah perpindahan manusia, melainkan proses panjang pembentukan struktur sosial yang hidup, yang hingga kini tercermin dalam keberadaan *liurai* sebagai simbol kontinuitas sejarah, identitas kolektif, dan kearifan lokal di Timor-Leste.

BAB 3: BENTUKNYA KOMUNITAS KLAN DAN *LIURAI* AWAL DI PULAU TIMOR

3.1. Pendahuluan

Sejarah sosial Pulau Timor tidak dapat dipahami secara utuh tanpa menelaah pembentukan komunitas berbasis klan (*uma*) dan munculnya struktur kekuasaan lokal yang terwujud dalam institusi *liurai*. Sebelum kedatangan kolonialisme Eropa, masyarakat Timor telah membangun sistem sosial-politik yang kompleks dan berakar kuat pada tatanan adat, spiritualitas leluhur, serta konfigurasi geografis wilayah (Fox, 1980; Traube, 1986). Struktur klan di Timor mencerminkan organisasi masyarakat segmenter, di mana unit dasar sosial dibentuk melalui garis keturunan patrilineal. Namun, dalam praktik sosial-budaya, sistem ini berpadu dengan jaringan afinitas, seperti pernikahan antar klan, perjanjian spiritual, dan aliansi ritus, yang memperkuat kohesi sosial sekaligus membentuk struktur kekuasaan fleksibel dalam ruang adat yang kompleks (McWilliam, 2003; Niner, 2009).

Pemimpin klan dan *liurai* memegang peran yang tidak hanya administratif, tetapi juga ritual, yuridis, dan diplomatik. Dalam tatanan ini, mereka berfungsi sebagai penjaga stabilitas internal dan antar-komunitas, menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan spiritualitas, serta memastikan harmoni antar klan yang seringkali terfragmentasi karena kondisi geografis dan ekologis yang tidak seragam. Topografi Timor yang berbukit-bukit, serta fragmentasi geografis yang tinggi, menciptakan kebutuhan akan sistem sosial yang fleksibel namun kohesif. Dalam konteks ini, kemampuan pemimpin lokal untuk mengelola konflik, mempertahankan akses sumber daya alam, dan menjembatani relasi antar klan menjadi kompetensi utama dalam legitimasi sosial-politik *liurai* (Therik, 2004; McWilliam, 2005).

Pembentukan komunitas klan dan institusionalisasi *liurai* awal juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang memperkuat struktur sosial ini. Konfigurasi wilayah yang terfragmentasi, keberagaman bahasa, serta nilai-nilai adat yang mengutamakan hubungan genealogis dan spiritual, menjadikan *liurai* bukan sekadar pemimpin administratif, tetapi juga penjaga kosmos lokal, yang menggabungkan otoritas genealogis, spiritual, dan sosial (Fox, 1996; Niner, 2009). Uma lulik berfungsi sebagai pusat kosmologi sosial, simbol kekuasaan adat yang juga mempengaruhi relasi antar klan dalam sistem sosial yang lebih luas.

Bab ini akan mengkaji secara sistematis bagaimana komunitas klan terbentuk dan bagaimana uma lulik berfungsi sebagai pusat kosmologi sosial dan simbol kekuasaan adat. Selain itu, akan dibahas pula struktur hirarki *liurai*, mulai dari tingkat komunitas kecil hingga sistem kerajaan lokal yang muncul di kawasan strategis seperti Wehali, Biboki, Fohorem, dan Lamaknen, yang menunjukkan bentuk awal pemerintahan lokal yang terorganisir secara adat dan berfungsi secara efektif sebelum intervensi kolonialisme (Fox, 1996; McWilliam, 2007). Melalui pendekatan ini, kita dapat melihat bahwa institusi *liurai* bukanlah produk kolonial, melainkan hasil evolusi sosial masyarakat Timor yang berbasis pada kebijaksanaan lokal, relasi genealogis, dan struktur ritual-spiritual. Pemahaman mendalam atas bentuk awal komunitas klan dan *liurai* menjadi landasan penting dalam merekonstruksi sejarah sosial-politik Timor-Leste secara holistik dan kontekstual.

3.2. Struktur Sosial Komunitas Klan

Komunitas klan di Pulau Timor merupakan unit dasar dalam struktur sosial tradisional yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk spiritual, politik, ekonomi, dan budaya. Setiap klan (uma) terdiri dari kelompok keturunan patrilineal yang memiliki rumah adat (uma lulik) sebagai pusat simbolik dan spiritual. Uma lulik ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemujaan leluhur, tetapi juga sebagai titik

awal legitimasi kekuasaan dan identitas kolektif klan tersebut (Fox, 1980; McWilliam, 2003).

1. Struktur Internal Komunitas Klan

Struktur sosial dalam komunitas klan bersifat hierarkis dan ditentukan oleh garis keturunan dan usia. Pemimpin tertinggi dalam klan, yang biasanya berasal dari garis utama keturunan, disebut *katuas, na'in*, atau *dato*, tergantung pada wilayah etnografisnya. Pemimpin ini memiliki tanggung jawab dalam urusan ritus pemujaan leluhur, penetapan norma adat, serta penyelesaian konflik dalam komunitas. Ia juga berfungsi sebagai penghubung antara dunia manusia dan alam spiritual, dalam konsep matebian yang mengintegrasikan ekologi dan kosmologi masyarakat Timor (Traube, 1986; Therik, 2004).

Klan terdiri dari sub-klan atau rumah tangga turunan yang memiliki tanggung jawab sosial-ekonomi tertentu, seperti pertanian, pengolahan pangan, pengelolaan sumber daya alam, dan pertahanan wilayah. Semua kegiatan ini dijalankan dalam sistem kerja kolektif yang dikenal dengan istilah *mutual aid system* atau *musán ba moris*, di mana setiap anggota klan diharapkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan komunal seperti pembangunan *uma lulik*, pembukaan ladang, atau pelaksanaan upacara adat (McWilliam, 2005).

2. Sistem Hubungan Antarklan

Dalam hubungan antarklan, prinsip-prinsip simetri dan resiprositas sangat dijunjung tinggi. Salah satu mekanisme utama yang digunakan untuk menjalin aliansi sosial dan politik adalah sistem *feto sanan–umane*, yaitu pertukaran perempuan dalam perkawinan. Sistem ini tidak hanya memiliki dimensi keluarga, tetapi juga merupakan mekanisme politik dan spiritual yang memperkuat jaringan kekerabatan antar-klan.

Pemberian perempuan dianggap sebagai perjanjian sakral yang mengikat kedua belah pihak dalam hubungan timbal balik, yang meliputi perlindungan, kerja sama, dan penyelesaian konflik (Fox, 1988).

3. Kepemimpinan Klan dan Peran *Liurai*

Di dalam banyak komunitas, struktur kepemimpinan klan terkait erat dengan sistem *liurai*, yang berfungsi sebagai pemimpin sekuler dan pengatur urusan eksternal. Di beberapa wilayah seperti Tetun Wehali atau Mambai, terdapat pembagian antara *liurai* sebagai pemimpin administratif (sekuler) dan *dato* atau *na'in* sebagai pemimpin spiritual (ritual). Meskipun keduanya memiliki peran yang berbeda, mereka bekerja dalam harmoni dan keduanya didasarkan pada legitimasi adat dan kosmologis yang sama (McWilliam, 2007; Niner, 2009).

Struktur sosial klan di Timor, dengan segala keragamannya, menunjukkan tingginya kemampuan masyarakat dalam menciptakan sistem tatanan yang stabil dan berkelanjutan. Hal ini terbukti dapat bertahan dan berkembang dalam kondisi geografis yang keras dan terfragmentasi, serta menjadi fondasi yang memungkinkan terbentuknya kerajaan-kerajaan lokal. Peran para *liurai* sebagai aktor sentral dalam sejarah kekuasaan adat dan pembangunan lokal menjadi elemen penting dalam keberlanjutan tatanan sosial dan politik di Timor-Leste.

3.3. Fungsi *Uma Lulik* dan Relasi Sosial-Kosmologis Klan

Uma lulik atau rumah suci adalah pusat spiritual, sosial, dan politik dalam masyarakat tradisional Timor, berfungsi lebih dari sekadar bangunan fisik. Sebagai simbol kekuasaan, memori kolektif, dan koneksi transendental antara manusia, leluhur, dan alam semesta, *uma lulik* menjadi elemen integral dalam struktur kehidupan klan. Rumah sakral ini berperan sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia roh,

serta memainkan peranan sentral dalam menjaga keseimbangan sosial dan kosmologis (Fox, 1980; Traube, 1986).

1. Pusat Spiritual dan Identitas Klan

Uma lulik menyimpan benda-benda sakral (*lulik*) seperti pusaka leluhur, artefak spiritual, dan simbol kerajaan yang menjadi penanda memori kolektif dan legitimasi identitas klan. Di dalamnya, berbagai ritus penting dilaksanakan, seperti *lisan mate* (ritus kematian), *hori-uluk* (ritus pembukaan tanah), dan *han-natar* (ritus pertanian), yang mengatur siklus kehidupan serta relasi komunitas dengan *matebian* (roh leluhur) (Traube, 1986; McWilliam, 2005). Melalui ritus-ritus ini, uma lulik membangun kesadaran spiritual kolektif dan mengikat anggota klan dalam kontinuitas intergenerasional.

2. Legitimasi Kekuasaan dan Sistem Adat

Dalam masyarakat Timor, pemimpin adat atau *liurai* tidak dapat mengklaim otoritas tanpa hubungan spiritual dan ritus penobatan di dalam *uma lulik*. Kepemimpinan di Timor bersifat kosmoteokratis, yaitu perpaduan antara otoritas sosial dan validasi spiritual yang berasal dari rumah suci tersebut (Fox, 1996; Therik, 2004). Penobatan pemimpin selalu disertai ritus khusus yang tidak hanya meneguhkan garis keturunan, tetapi juga mengafirmasi hubungan antara pemimpin, leluhur, dan tanah warisan. Selain itu, *uma lulik* berfungsi sebagai semacam "konstitusi tak tertulis" yang mengatur keputusan kolektif, seperti penggunaan sumber daya, penyelesaian konflik, dan aliansi politik, yang semua divalidasi melalui norma adat yang dijaga di dalam *uma lulik*. Pelanggaran terhadap tatanan ini akan dikenai sanksi spiritual (*lulik badak*) dan sosial yang berat.

3. Relasi Kosmologis dan Ekologis

Kosmologi masyarakat Timor memandang dunia dalam tiga lapisan: *rai-laran* (langit), *rai-diak* (bumi baik), dan *rai-mean* (dunia roh). Uma lulik terletak di pusat simbolik dari tiga ranah ini, menjadi portal antara dunia manusia dan alam gaib (McWilliam, 2003; Fox, 1988). Oleh karena itu, hampir semua aktivitas utama komunitas—seperti berburu, bertani, hingga berperang—dimulai dengan ritus permohonan restu kepada leluhur yang dipimpin dari rumah suci tersebut. Fungsi kosmologis ini juga berkaitan erat dengan fungsi ekologis, di mana *uma lulik* menjadi pusat pengumuman dan pelaksanaan *tara bandu*, yaitu larangan adat terhadap eksploitasi berlebihan terhadap hutan, sungai, dan binatang sakral. Dengan demikian, *uma lulik* berperan sebagai aktor ekologis yang memediasi hubungan harmonis antara manusia dan alam melalui spiritualitas kolektif yang hidup (Therik, 2004; McWilliam, 2007).

4. Simbol Integrasi dan Ketahanan Sosial

Sebagai simbol integrasi sosial, *uma lulik* memperkuat kohesi internal klan dan solidaritas eksternal. Ia berfungsi sebagai tempat rekonsiliasi setelah konflik, mediasi dalam sengketa antarklan, dan ruang kolektif untuk perundingan politik lokal. Keberadaan *uma lulik* turut menentukan posisi tawar komunitas dalam struktur federatif kerajaan lokal atau dalam sistem kekuasaan *liurai* yang lebih besar (Niner, 2009). Fungsi integratif ini memungkinkan komunitas bertahan dalam kondisi alam yang keras dan sejarah yang penuh tantangan, menjadikan *uma lulik* sebagai mekanisme adaptasi sosial-kosmologis sekaligus institusi pemelihara stabilitas jangka panjang.

Dengan demikian, *uma lulik* dalam tradisi masyarakat Timor bukan hanya simbol budaya, tetapi juga institusi multidimensional yang mengatur ritus, kekuasaan, spiritualitas, dan ekologi. Kekuatan sosial-politik para *liurai* sangat bergantung pada

hubungan mereka dengan rumah suci ini, yang menjadi fondasi utama struktur kekuasaan tradisional Timor-Leste sebelum intervensi kolonial.

3.4. Pembentukan Kerajaan Lokal dan *Liurai* sebagai Pemimpin Tertinggi

Sebelum kedatangan bangsa Portugis pada awal abad ke-16, Pulau Timor telah dihuni oleh berbagai komunitas klan yang kemudian berkembang menjadi entitas politik yang lebih besar, yakni kerajaan-kerajaan lokal. Transformasi ini merupakan respons terhadap kebutuhan akan stabilitas sosial, perlindungan kolektif, serta regulasi pengelolaan sumber daya dan mediasi konflik di wilayah yang secara geografis terpencar, berbukit, dan ekologi kompleks (Fox, 1980; McWilliam, 2007).

1. Evolusi Sosial Menuju Struktur Kerajaan

Awalnya, masyarakat Timor bersifat egaliter dan berbasis kekerabatan. Namun, dalam proses waktu, terbentuklah struktur yang lebih hierarkis melalui aliansi strategis, penaklukan simbolik, dan pengakuan spiritual terhadap satu klan sebagai pusat kekuasaan. Melalui proses ini, muncul kerajaan-kerajaan lokal seperti Wehali di Belu (Timor Barat), Likusaen di Liqu iça, Luca di Viqueque, serta Biboki dan Sonbai di bagian barat dan utara Pulau Timor (Therik, 2004; Fox, 1996). Proses ini menunjukkan adanya kapasitas politik lokal dalam membentuk sistem pemerintahan berbasis adat yang terstruktur secara organik.

2. *Liurai*: Figur Pemimpin Sakral dan Politik

Dalam sistem kerajaan lokal, *liurai* adalah gelar tertinggi yang diberikan kepada pemimpin yang menggabungkan otoritas politik, administratif, dan spiritual. Secara etimologis, kata "*liurai*" berasal dari kata yang berarti "mengelilingi bumi",

mencerminkan cakupan kekuasaannya atas wilayah dan komunitas yang luas (Fox, 1980). *Liurai* tidak hanya bertugas mengatur urusan administratif dan militer, tetapi juga menjadi pelindung hukum adat (*tara bandu*), penjaga keharmonisan spiritual, dan simbol persatuan kerajaan.

Peran *liurai* mencakup:

- *Dato* atau *Nai Lulik*: Penjaga *uma lulik* dan penasihat spiritual tertinggi.
- *Katuas Lia*: Penutur adat dan pelaksana ritus serta hukum adat.
- *Moro* (Tuan Perang): Pemimpin militer yang menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah.
- *Aifoho*: Duta atau utusan yang membina hubungan dengan kerajaan lain.

Struktur ini mencerminkan sistem pemerintahan tradisional dengan prinsip checks and balances, di mana kekuasaan *liurai* dibatasi oleh hukum adat dan ritus spiritual, bukan bersifat absolut (McWilliam, 2005; Niner, 2009).

3. Jejaring Diplomatik dan Konflik Antar-Kerajaan

Para *liurai* menjalin jejaring diplomatik dan aliansi antarkerajaan melalui pernikahan politik, pertukaran simbol suci, dan perjanjian adat. Namun, kerajaan-kerajaan ini juga mengalami konflik perebutan legitimasi spiritual, batas wilayah, dan bahkan perang antarklan. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut, Wehali menempati posisi khusus sebagai kerajaan pusat kosmologis, dengan gelar *liurai*nya sebagai *Maromak Oan* (Anak Tuhan), yang menjadi sumber legitimasi bagi kerajaan-kerajaan lainnya, termasuk yang berada di Timor-Leste saat ini (Therik, 2004).

4. Warisan Politis dan Budaya *Liurai*

Sistem *liurai* meninggalkan warisan politis dan budaya yang mendalam dalam struktur sosial Timor. Prinsip-prinsip kepemimpinan seperti servisialitas (pengabdian), keberanian, moralitas, dan spiritualitas menjadi nilai-nilai utama yang membentuk karakter pemimpin tradisional. Warisan ini terus hidup dalam memori kolektif masyarakat, bahkan hingga zaman kemerdekaan dan pembentukan negara Timor-Leste modern (Niner, 2009).

Interaksi awal antara bangsa Portugis dan masyarakat Timor terjadi bukan dengan entitas amorf, tetapi dengan kerajaan-kerajaan lokal yang mapan, yang dipimpin oleh para *liurai*. Dalam hal ini, struktur kekuasaan tradisional memainkan peran penting dalam menentukan arah interaksi kolonial, dan menjadi dasar resistensi budaya dan politik terhadap dominasi asing.

Dengan demikian, *liurai* bukan hanya kepala pemerintahan adat, tetapi simbol kontinuitas peradaban Timor yang berakar pada spiritualitas, etika leluhur, dan keterikatan tanah. Sistem kerajaan lokal pra-kolonial memperlihatkan bahwa masyarakat Timor telah memiliki kapasitas kelembagaan dan kecanggihan sosial-politik jauh sebelum dikenalkan kepada model pemerintahan kolonial modern.

3.5. Kesimpulan

Pembentukan komunitas klan dan institusi *liurai* di Pulau Timor menunjukkan kecanggihan sosial-politik masyarakat pra-kolonial yang berakar pada struktur adat, spiritualitas leluhur, dan adaptasi terhadap kondisi geografis yang kompleks. Sistem sosial berbasis klan (*uma*) tidak hanya membentuk unit genealogis, tetapi juga menjadi kerangka normatif dan kosmologis yang menyatukan anggota masyarakat dalam jaringan ritual, kewajiban sosial, dan solidaritas komunal (Fox, 1980; McWilliam, 2003).

Uma lulik, sebagai pusat spiritual dan simbol otoritas leluhur, berperan penting dalam mengukuhkan identitas dan kekuasaan klan. Fungsinya yang multidimensional—spiritual, ekologis, politik, dan simbolik—menunjukkan bahwa struktur sosial Timor tidak bisa dipisahkan dari sistem nilai sakral yang mengatur relasi antara manusia, alam, dan roh leluhur (Traube, 1986; Therik, 2004).

Di atas fondasi ini, lahir sistem kerajaan lokal yang dipimpin oleh para *liurai*, pemimpin sakral yang tidak hanya memegang kekuasaan administratif, tetapi juga otoritas spiritual dan kosmologis. Struktur pemerintahan adat yang berkembang mencerminkan prinsip checks and balances dalam bentuk peran-peran adat yang terpisah namun saling melengkapi: dari penutur adat, pemuka spiritual, hingga pemimpin perang (McWilliam, 2007). Kerajaan-kerajaan seperti Wehali, Sonbai, Biboki, dan lainnya bukan hanya entitas politik, tetapi juga pusat-pusat ritus dan diplomasi antar-komunitas yang membentuk sistem geopolitik lokal pra-kolonial. Para *liurai*, melalui aliansi, perjanjian adat, dan jejaring spiritual, menciptakan sistem pemerintahan yang terintegrasi dan tahan terhadap gangguan eksternal.

Dengan demikian, Bab 3 menunjukkan bahwa jauh sebelum intervensi kolonial, masyarakat Timor telah membangun tatanan sosial dan politik yang mapan, berdasarkan kearifan lokal, struktur genealogis, dan spiritualitas kosmologis. Para *liurai* merupakan figur historis yang tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai leluhur, simbol kontinuitas budaya, dan landasan bagi pembentukan identitas politik Timor-Leste hingga era modern.

BAB 4: PRA KEDATANGAN KOLONIALISME

4.1. Pendahuluan

Sebelum masuknya pengaruh kolonial Eropa pada awal abad ke-16, masyarakat di Pulau Timor telah mengembangkan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang mandiri dan terstruktur, berbasis pada prinsip adat, spiritualitas kosmologis, dan relasi antarkomunitas yang dinamis. Konteks pra-kolonial ini menunjukkan bahwa Timor bukan wilayah yang terisolasi atau tanpa struktur, melainkan bagian dari jaringan interaksi regional yang aktif, terutama melalui jalur perdagangan maritim dan pertukaran budaya (Fox, 1980; Hägerdal, 2012).

Masyarakat Timor telah membentuk berbagai kerajaan lokal yang dikelola melalui sistem pemerintahan tradisional berbasis klan dan rumah adat, dengan *liurai* sebagai pusat kekuasaan administratif sekaligus spiritual. Kehidupan sosial dijalankan melalui hukum adat (*tara bandu*), struktur ritus yang ketat, serta sistem kekerabatan yang kompleks dan berorientasi pada relasi sakral dengan leluhur (McWilliam, 2005; Traube, 1986).

Narasi kolonial sering menggambarkan wilayah Timor sebagai liar, terpecah, dan belum beradab. Namun, kajian antropologis dan historiografi pascakolonial menunjukkan sebaliknya: masyarakat Timor pra-kolonial memiliki tatanan sosial-politik yang stabil, sistem pertanian berbasis ekologi lokal, serta jejaring diplomatik dan perdagangan yang aktif, terutama dalam komoditas berharga seperti kayu cendana, lilin lebah, dan budak (Boxer, 1947; Hägerdal, 2012).

Perdagangan maritim yang melibatkan pedagang dari Jawa, Makassar, Maluku, Tiongkok, dan kemudian Portugis, menjadikan Pulau Timor sebagai ruang interaksi ekonomi dan politik yang penting di kawasan Nusa Tenggara. Dalam konteks ini,

meskipun tidak membentuk negara dalam pengertian modern, kerajaan-kerajaan lokal seperti Wehali, Sonbai, dan Likusaen menunjukkan kemampuan negosiasi, diplomasi, dan mobilisasi kekuasaan secara efektif dan berdaulat (Therik, 2004; Fox, 1996).

Bab ini bertujuan untuk menggambarkan secara objektif dan kritis struktur masyarakat Timor sebelum intervensi kolonial, serta membongkar asumsi-asumsi euro-sentris yang mengabaikan kompleksitas lokal. Dengan menelusuri dinamika kerajaan lokal, struktur spiritual, pola perdagangan, dan prinsip hukum adat, bagian ini membentuk kerangka konseptual untuk memahami proses transformasi sosial dan politik yang akan terjadi pada masa kolonialisasi berikutnya. Dengan demikian, pemahaman tentang masyarakat pra-kolonial Timor menjadi langkah mendasar untuk membangun narasi sejarah yang lebih adil dan akurat, yang mengakui agensi, otonomi, dan kecanggihan sosial-politik masyarakat Timor sebelum kedatangan dominasi asing.

4.2. Struktur Sosial-Politik Mandiri

Sebelum kedatangan kolonialisme Eropa, masyarakat Timor telah membentuk sistem sosial-politik yang mandiri, berbasis komunitas adat, dan berakar kuat pada nilai-nilai spiritualitas leluhur, kedaulatan lokal, serta struktur konsensus kolektif. Pulau Timor dihuni oleh berbagai kerajaan kecil (*reinu*) yang otonom, terhubung melalui aliansi adat, perkawinan antarbangsawan, dan jejaring persekutuan spiritual, tanpa satu entitas yang hegemonik secara permanen (Fox, 1980; Therik, 2004). Kerajaan-kerajaan seperti Wehali, Luca, dan Likusaen memainkan peran strategis sebagai poros politik dan spiritual regional, namun tetap mempertahankan prinsip subsidiaritas kekuasaan di mana klan-klan lokal memegang kendali penuh atas wilayah dan tatanan sosial mereka sendiri (McWilliam, 2005; Hägerdal, 2012).

1. Unit Sosial Dasar: Klan dan Uma Lulik

Unit dasar masyarakat Timor adalah klan patrilineal (*uma*), yang menjadi pusat identitas sosial, kosmologi, dan legitimasi kekuasaan. Setiap *uma* memiliki asal-usul mitologis yang dikaitkan dengan leluhur spiritual dan entitas geografis tertentu. Pusat simbolik dan spiritual dari setiap klan adalah *uma lulik* (rumah adat suci), tempat penyimpanan pusaka, naskah lisan, serta relik suci. Di uma lulik dilangsungkan upacara-upacara ritus yang membentuk memori kolektif dan tata hukum adat komunitas (Traube, 1986; McWilliam, 2003).

2. Hierarki Kekuasaan Tradisional

Struktur kekuasaan bersifat hierarkis namun tidak absolut, dijalankan dalam semangat musyawarah adat dan restu spiritual. Pemimpin tertinggi adalah *liurai*, namun kekuasaannya bergantung pada legitimasi dari struktur adat yang mendampinginya:

1. *Dato / Nai Lulik* – Penjaga spiritual, penghubung antara *liurai* dan leluhur.
2. *Katuas Lia* – Penegak hukum adat, ahli ritus, dan juru bicara adat.
3. *Moro* / Tuan Perang – Pemimpin militer dan pengawal kehormatan komunitas.
4. *Aifoho* – Duta adat dan penghubung diplomatik antar kerajaan atau klan.

Kepemimpinan seorang *liurai* bergantung pada pengakuan adat, kemampuan menjaga keseimbangan dengan alam, dan konsistensi dalam merawat tatanan spiritual dan sosial (Fox, 1996; Niner, 2009).

3. Mekanisme Hukum dan Keadilan

Masyarakat Timor menjalankan sistem hukum berbasis adat yang dikenal sebagai *tara bandu*, yaitu larangan atau norma sakral yang mengatur tatanan hidup. Pelanggaran terhadap *tara bandu* dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehendak leluhur dan

roh penjaga alam, yang dapat mengakibatkan gangguan spiritual dan sosial. Penyelesaian konflik dilakukan melalui ritus *sala ho tulun* (pemulihan dan perdamaian), yang difasilitasi oleh tetua adat dan pemuka spiritual, menjadikan keadilan adat sebagai sistem pemulihan, bukan pembalasan (Therik, 2004; McWilliam, 2007).

4. Otonomi Lokal dan Kedaulatan Wilayah

Tidak terdapat kekuasaan tunggal yang mengatur seluruh Pulau Timor. Sebaliknya, kerajaan-kerajaan dan konfederasi klan menjalankan kedaulatan lokal berdasarkan teritori adat, relasi spiritual, dan perjanjian kolektif. Hubungan antarkomunitas diatur melalui aliansi pernikahan, pertukaran simbol sakral, dan diplomasi adat, membentuk suatu sistem yang dapat dianalogikan sebagai federasi tradisional (Hägerdal, 2012). Model ini menunjukkan tingkat kedewasaan politik lokal yang tidak memusat, namun menjamin stabilitas, ketertiban, dan koeksistensi antarklan. Pola ini berbeda dari model negara modern, namun efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat multietnis dan multiklan di Timor.

Struktur sosial-politik mandiri yang dikembangkan masyarakat Timor pra-kolonial menjadi fondasi ketahanan budaya dan institusional, yang memungkinkan komunitas-komunitas adat mempertahankan identitas, kedaulatan, dan spiritualitas lokal ketika menghadapi gelombang kolonialisasi. Sistem ini tidak hanya efektif dalam mengatur kehidupan sosial dan spiritual, tetapi juga menjadi dasar resistensi terhadap dominasi eksternal dan penanda keunikan kedaulatan tradisional Timor-Leste.

4.3. Hubungan Perdagangan dan Pengaruh Asing

Meskipun Pulau Timor sering dianggap sebagai wilayah periferal dalam konteks geopolitik Asia Tenggara, pada kenyataannya masyarakat Timor pra-kolonial menunjukkan kapasitas tinggi dalam membangun hubungan perdagangan dan

diplomasi dengan dunia luar. Interaksi dengan pedagang dari Makassar, Bugis, Ternate, Tidore, Jawa, dan bahkan Tiongkok dan India membuktikan bahwa masyarakat Timor merupakan bagian dari jaringan maritim regional yang dinamis (Hägerdal, 2012; Boxer, 1947). Salah satu komoditas utama yang menjadikan Timor dikenal luas di dunia Asia adalah kayu cendana (Santalum album), yang permintaannya tinggi untuk keperluan ritual keagamaan, pengobatan, dan kosmetik di dunia Hindu, Buddha, dan Islam (Fox, 1980).

1. Kayu Cendana: Komoditas Strategis Timor

Kayu cendana (Santalum album) merupakan komoditas utama yang membuat Pulau Timor dikenal di kalangan pedagang Asia sejak awal milenium pertama. Cendana digunakan secara luas di India, Tiongkok, dan dunia Islam sebagai bahan dupa, pengobatan, dan parfum, sehingga permintaannya tinggi. Kerajaan-kerajaan di Timor, seperti Wehali, Luca, dan Likusaen, mengontrol daerah-daerah penghasil cendana dan mengenakan pajak atau upeti terhadap para pedagang luar yang ingin mengakses sumber daya ini (Fox, 1980; Hägerdal, 2012). Cendana menjadi simbol kekayaan dan sumber kekuasaan bagi para *liurai*, yang mengelola distribusinya secara bijaksana untuk mempertahankan pengaruh politik mereka. Oleh karena itu, kontrol atas wilayah cendana sering menjadi sumber konflik maupun aliansi antar kerajaan.

2. Jaringan Dagang Maritim Regional

Pedagang dari Makassar, Bugis, Ternate, dan Tidore secara rutin mengunjungi Timor untuk membeli cendana, lilin, madu, dan hasil bumi lainnya. Sebagai gantinya, mereka membawa kain, besi, keramik, manik-manik, dan senjata. Pelabuhan-pelabuhan kecil seperti Vemasse, Laleia, dan Batugade berfungsi sebagai titik masuk perdagangan ini. Timor juga memiliki hubungan terbatas namun signifikan dengan pedagang Tiongkok dan India, sebagaimana dibuktikan oleh temuan artefak keramik Dinasti Ming dan

perhiasan Asia Selatan di situs arkeologi tertentu (O'Connor & Veth, 2000; Christie, 1995). Bukti arkeologis ini menunjukkan jejak perdagangan maritim lintas regional yang signifikan, meskipun tidak membentuk koloni dagang tetap. Hal ini memperlihatkan bahwa Timor bukanlah wilayah yang tertutup atau pasif dalam pertukaran antarbudaya.

3. Adaptasi dan Negosiasi Kultural

Masyarakat Timor tidak menerima pengaruh asing secara pasif. Mereka melakukan seleksi budaya, mengadopsi teknologi seperti logam, senjata api, dan tekstil, namun tetap mempertahankan struktur adat dan spiritualitas lokal. Para *liurai* menunjukkan kapasitas diplomatik, dengan kemampuan bernegosiasi dan menyusun strategi politik untuk mempertahankan kedaulatan wilayah dan struktur sosial-komunal (McWilliam, 2007). Pengaruh luar juga memperkaya elemen budaya lokal seperti pola tekstil tais, instrumen musik, kosakata bahasa, dan sistem simbolik, yang diserap tanpa menghapus identitas kultural dan spiritual masyarakat Timor.

Interaksi dengan dunia luar pada masa pra-kolonial menunjukkan bahwa masyarakat Timor bukanlah entitas tertutup, melainkan bagian dari jaringan dinamis perdagangan dan pertukaran budaya regional. Hal ini membentuk fondasi historis penting yang mempengaruhi respon masyarakat lokal terhadap kedatangan kolonialisme Eropa.

4.4. Sistem Kepercayaan dan Hukum Adat

Sebelum pengaruh agama-agama Abrahamik dan kolonialisme, masyarakat Timor telah memiliki sistem kepercayaan animistik yang terstruktur dan menyeluruh, berfungsi sebagai landasan kosmologis, etis, dan politis. Kepercayaan ini tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan leluhur dan kekuatan kosmis, tetapi juga membentuk tata hukum dan tata kelola masyarakat yang bersifat restoratif dan

ekologis (Traube, 1986; Therik, 2004). Pusat dari sistem ini adalah konsep *lulik*—yang dalam bahasa Tetun dan berbagai dialek lokal merujuk pada hal-hal sakral, tak tersentuh, dan diberi batas moral serta spiritual. *Lulik* tidak hanya menjadi fondasi spiritual komunitas, tetapi juga instrumen yang menjamin kohesi sosial dan perlindungan ekologis.

1. Konsep *Lulik*: Sakralitas sebagai Pusat Kehidupan

Lulik merujuk pada segala sesuatu yang dianggap keramat dan berhubungan langsung dengan kekuatan supranatural. Ia hadir dalam bentuk benda, tempat, ritus, dan norma sosial. Rumah adat (*uma lulik*), batu leluhur, pohon besar, dan situs pengorbanan adalah pusat kegiatan ritus penting seperti pernikahan, pelantikan *liurai*, upacara kesuburan, hingga pemurnian pascakonflik (Fox, 1980; McWilliam, 2003). Kepercayaan terhadap *matebian* (roh leluhur), *Maromak* (Tuhan pencipta), dan *rai lulik* (tanah suci) menanamkan rasa takut yang produktif (*metan*) sebagai mekanisme sosial yang menjaga ketaatan terhadap norma komunal dan keseimbangan kosmos.

2. Peran Tetua Adat dan Spiritualis

Para *katuas lia* (tetua adat) dan *matan dook* (dukun spiritual) memegang peran sentral dalam menafsirkan pesan leluhur, memimpin ritus, dan menegakkan hukum adat. Dalam struktur adat, kedudukan mereka setara bahkan lebih tinggi secara spiritual dibanding *liurai*, karena merekalah yang menjembatani dunia manusia dengan alam roh. Mereka adalah penjaga moralitas kolektif dan penyelenggara keadilan berbasis spiritualitas (Therik, 2004; McWilliam, 2007).

3. Hukum Adat (*Tara Bandu*) dan Mekanisme Sanksi

Tara bandu merupakan sistem hukum adat yang mengatur seluruh aspek kehidupan: kepemilikan tanah, larangan ekologi, etika sosial, hingga konflik domestik. Pelanggaran terhadap *tara bandu* dianggap bukan hanya sebagai pelanggaran hukum sosial, melainkan juga sebagai pelanggaran spiritual yang mengundang kutukan kolektif—seperti gagal panen, penyakit, atau konflik berkelanjutan (Niner, 2009). Sanksi adat bersifat restoratif, bukan retributif. Pelaku pelanggaran diwajibkan untuk memberikan kompensasi (kerbau, tanah, kerja komunitas) dan menjalani ritual pemurnian yang dilaksanakan secara komunal. Mekanisme ini menjamin pemulihan keharmonisan, bukan hanya hukuman.

4. Keseimbangan Kosmis dan Etika Ekologis

Sistem kepercayaan Timor sangat menghargai keseimbangan antara manusia dan alam. Alam tidak dipandang sebagai objek eksploitasi, tetapi sebagai makhluk hidup dalam jaringan kosmis yang harus dihormati. Hukum adat melarang: menebang pohon sakral, berburu di musim kawin, dan membuka lahan tanpa ritus permohonan izin pada roh penjaga hutan. Dalam hal ini, *tara bandu* berfungsi sebagai aturan ekologis berbasis spiritualitas, menjadikan masyarakat Timor sebagai pelopor konsep konservasi adat jauh sebelum hadirnya ekologi ilmiah modern (McWilliam, 2007; Therik, 2004).

4.5. Kesimpulan

Bab ini telah menunjukkan bahwa sebelum kedatangan kolonialisme Eropa, masyarakat Timor telah memiliki struktur sosial-politik yang mandiri, sistem ekonomi yang adaptif, serta sistem spiritual yang kompleks dan kohesif. Masyarakat Timor menunjukkan kapasitas untuk mengatur diri, menjalin hubungan luar negeri secara

selektif, dan membangun struktur kekuasaan yang berlandaskan spiritualitas dan keadilan komunal. Jauh dari gambaran primitif atau terbelakang sebagaimana yang sering diimplikasikan oleh narasi kolonial, masyarakat Timor pra-kolonial justru menampilkan keunikan peradaban adat yang otonom, resilien, dan penuh makna (Fox, 1980; Hägerdal, 2012).

Sistem pemerintahan adat dijalankan melalui kepemimpinan para *liurai*, yang memimpin berdasarkan legitimasi spiritual dan konsensus sosial, bukan dominasi kekuasaan tunggal. Struktur kekuasaan ini ditopang oleh jaringan aliansi klan, sistem hukum adat (*tara bandu*), serta nilai-nilai spiritualitas kosmologis yang mengatur setiap aspek kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, *uma lulik* bukan hanya simbol budaya, melainkan pusat legitimasi hukum, spiritualitas, dan etika ekologi (Therik, 2004; Traube, 1986).

Perdagangan regional, khususnya dalam komoditas kayu cendana, menunjukkan keterlibatan aktif Timor dalam jaringan maritim Asia Tenggara dan Asia Timur. Kerajaan-kerajaan seperti Wehali, Likusaen, dan Luca menjadi aktor utama dalam mengelola hubungan diplomatik dan ekonomi dengan pihak luar—dari pedagang Bugis dan Makassar hingga pengaruh awal dari Tiongkok dan India. Ini membuktikan bahwa masyarakat Timor bukanlah entitas tertutup, melainkan komunitas kosmopolitan yang berdaulat secara lokal namun terbuka secara selektif (Boxer, 1947; McWilliam, 2007).

Lebih jauh, sistem kepercayaan animistik yang terstruktur dengan konsep *lulik* sebagai pusat kehidupan spiritual membentuk tidak hanya praktik religius, tetapi juga sistem hukum, moralitas, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dimensi ekologi dari hukum adat memperlihatkan kesadaran ekologis yang tinggi jauh sebelum munculnya konsep lingkungan modern dalam hukum negara (McWilliam, 2003; Niner, 2009).

Dengan demikian, pemahaman terhadap masa pra-kolonial Timor memberikan landasan penting untuk menafsirkan resistensi budaya, adaptasi strategis, dan kontinuitas identitas lokal yang akan membentuk dinamika sosial-politik Timor di masa kolonial. Bab selanjutnya akan mengulas bagaimana sistem adat yang telah mapan ini berinteraksi, menyesuaikan diri, dan menentang penetrasi kolonialisme Portugis yang berlangsung selama lebih dari empat abad.

BAGIAN II: PENJAJAHAN PORTUGIS

BAB 5: PENJAJAHAN AWAL BANGSA PORTUGIS

5.1. Pendahuluan

Kedatangan bangsa Portugis ke Pulau Timor pada awal abad ke-16 menandai permulaan dari salah satu bentuk kolonialisme terlama dalam sejarah dunia, yang berlangsung selama lebih dari empat setengah abad. Tidak seperti pola penjajahan yang langsung menggunakan kekuatan militer dan dominasi kekuasaan, kedatangan Portugis ke Timor berlangsung bertahap, melalui jalur perdagangan, misi Katolik, dan diplomasi adat (Boxer, 1947; Hägerdal, 2012). Motivasi utama Portugis bersifat ekonomi dan religius, yaitu mengejar sumber daya strategis seperti kayu cendana, serta menyebarkan agama Katolik sebagai bagian dari agenda global Imperium Iberia pasca-Reconquista. Dalam konteks ini, Pulau Timor dipandang sebagai wilayah pinggiran yang kaya, namun sulit dikendalikan secara politik karena struktur sosialnya yang terfragmentasi dan sistem kekuasaan adat yang otonom (Gunn, 1999).

Tidak adanya negara-bangsa yang terpusat di Timor membuat bangsa Portugis harus berinteraksi secara langsung dengan para *liurai*—pemimpin tradisional lokal yang memiliki otoritas spiritual dan administratif dalam sistem klan dan kerajaan adat. Para *liurai* memainkan peran kunci sebagai aktor mediasi, perlawanan, maupun kolaborasi, dan dinamika relasi ini sangat menentukan arah penjajahan Portugis ke depan (Therik, 2004; McWilliam, 2007). Dalam fase awal penjajahan ini, Portugis tidak menguasai Timor melalui kekuatan militer langsung, tetapi melalui penanaman pengaruh simbolik dan institusional, seperti pembangunan benteng, pengangkatan *liurai* sekutu, penyebaran agama, dan monopoli perdagangan.

Hubungan dengan kerajaan-kerajaan seperti Wehali, Luca, dan Likusaen dibangun melalui aliansi taktis dan negosiasi diplomatik, sering kali dimediasi oleh misionaris Jesuit dan Dominikan (Fox, 1980; Hägerdal, 2012). Penting untuk dicatat bahwa kolonialisme Portugis di Timor bukanlah narasi tunggal tentang dominasi, tetapi sebuah proses relasional yang penuh dengan resistensi, negosiasi ulang, dan hibriditas budaya. Para *liurai* tidak hanya menjadi pelengkap sistem kolonial, tetapi sering tampil sebagai penentu arah sejarah lokal, baik dalam membela kedaulatan tradisional maupun dalam menyusun strategi adaptif terhadap struktur kolonial yang sedang berkembang (Niner, 2009).

Dengan demikian, bagian ini akan mengkaji secara rinci tahap awal kolonialisasi Portugis di Timor, dengan fokus pada strategi penetrasi kekuasaan, peran perdagangan dan agama, serta interaksi dinamis antara kekuatan kolonial dan kepemimpinan lokal *liurai*. Memahami fase ini sangat penting untuk melihat bagaimana fondasi dari kolonialisme Portugis dibangun melalui proses kompleks yang tidak selalu didominasi oleh kekuatan asing, tetapi juga oleh agensi masyarakat lokal.

5.2. Latar Belakang Ekspansi Portugis ke Timor

Ekspansi Portugis ke Pulau Timor merupakan bagian integral dari proyek imperialisme global yang dilaksanakan oleh Kerajaan Portugal sejak akhir abad ke-15. Setelah keberhasilan Vasco da Gama mencapai India pada 1498 dan penaklukan Malaka pada 1511, Portugis menancapkan kekuasaannya di jantung perdagangan Asia. Hal ini mendorong mereka untuk mencari komoditas langka, termasuk cendana (Santalum album), yang melimpah di Timor (Boxer, 1965; Gunn, 1999). Cendana Timor sangat diminati oleh pasar India, Tiongkok, dan Eropa, baik untuk keperluan ritual keagamaan, pengobatan, maupun parfum. Hal ini menjadikannya sebagai komoditas strategis dalam jaringan perdagangan global awal modern (Fox, 1980). Oleh karena itu, kedatangan Portugis di Timor didorong oleh motivasi ekonomi yang kuat, tetapi juga

didasari oleh agenda evangelisasi Katolik dan penguatan kontrol maritim di wilayah timur Nusantara.

Setelah penaklukan Malaka, Portugis menyadari bahwa wilayah timur Indonesia, termasuk Timor, memiliki kekayaan alam yang belum dimanfaatkan oleh kekuatan Eropa lainnya. Kayu cendana Timor yang memiliki kualitas aromatik yang unggul dan tahan lama menjadi komoditas unggulan yang menghubungkan Timor dengan pasar-pasar elit di Goa, Guangzhou, dan Lisboa (Hägerdal, 2012). Kehadiran Portugis bertujuan untuk mengamankan sumber daya cendana dan jalur distribusinya sebelum dikuasai oleh saingan mereka seperti Belanda dan pedagang Asia lainnya.

1. Cendana sebagai Pendorong Utama Ekspansi

Sebagai komoditas yang sangat dicari, cendana Timor menjadi faktor pendorong utama ekspansi Portugis ke wilayah ini. Penguasaannya terhadap Malaka dan jaringan pelabuhan di sepanjang Samudra Hindia memberi Portugis keunggulan dalam mengendalikan jalur perdagangan rempah-rempah dan komoditas lainnya, termasuk cendana. Hal ini menjadikan Timor sebagai wilayah yang sangat strategis dalam konteks globalisasi ekonomi awal, yang menghubungkan Asia dan Eropa dalam perdagangan internasional.

2. Motif Evangelisasi dan Semangat Reconquista

Selain kepentingan ekonomi, ekspansi Portugis ke Timor juga dipengaruhi oleh semangat religius Katolik yang kuat, yang merupakan bagian dari proyek Reconquista, yaitu upaya penyebaran agama Katolik setelah penaklukan wilayah Muslim di Semenanjung Iberia. Misi ini dilaksanakan oleh ordo-ordo religius, terutama Dominikan sejak 1556, yang berperan sebagai agen evangelisasi dan mediator politik antara Portugis dan pemimpin lokal (Gunn, 1999; Therik, 2004). Evangelisasi dan

kolonialisme bagi Portugis adalah dua aspek yang tak terpisahkan, dengan tujuan untuk mengubah penduduk lokal yang dianggap "pagan" menjadi penganut agama Katolik.

3. Fragmentasi Politik Lokal sebagai Peluang Kolonial

Kondisi internal Pulau Timor yang terpecah dalam sistem kerajaan-kerajaan kecil dan konfederasi klan tanpa otoritas sentral yang dominan memberikan peluang besar bagi Portugis untuk memperluas pengaruhnya. Tidak adanya kekuatan militer yang menyatukan seluruh pulau memudahkan Portugis untuk membangun aliansi strategis dengan berbagai pemimpin lokal. Pangkalan awal Portugis di Solor dan Lifau berfungsi sebagai pos perdagangan dan misi Katolik, yang menjadi titik awal untuk memperluas pengaruh mereka lebih lanjut.

4. Sebuah Proyek Geopolitik, Ekonomi, dan Spiritual

Ekspansi Portugis ke Timor tidak hanya dapat dipahami sebagai penjajahan teritorial semata, melainkan sebagai bagian dari logika imperialisme abad ke-16 yang menyatukan kekuatan maritim, doktrin religius, dan kepentingan ekonomi dalam satu kesatuan yang saling mendukung. Timor, meskipun terletak di pinggiran dunia, menjadi bagian dari sistem globalisasi awal, di mana hubungan antara penduduk lokal dan penjajah Eropa dibentuk oleh interaksi yang kompleks antara kolaborasi dan resistensi (Fox, 1996; Hägerdal, 2012). Oleh karena itu, penting untuk memahami latar belakang ekspansi Portugis ini sebagai fondasi untuk menganalisis karakter unik kolonialisme Portugis di Timor, yang berlangsung lama, tidak sepenuhnya terpusat, dan melibatkan peran aktif masyarakat lokal, terutama para *liurai*, dalam menentukan jalur sejarah mereka.

5.3. Mekanisme Penetrasi Awal: Aliansi dan Fragmentasi

Fase awal penjajahan Portugis di Pulau Timor tidak ditandai oleh invasi militer besar-besaran, melainkan oleh strategi penetrasi bertahap yang bersandar pada mekanisme aliansi politik, kooptasi spiritual, dan fragmentasi sosial. Mengingat tidak adanya eksistensi negara terpusat di Timor pra-kolonial, Portugis harus beroperasi dalam konteks sistem klan dan kerajaan-kerajaan kecil yang dipimpin oleh para *liurai* yang bersifat otonom (Hägerdal, 2012; Gunn, 1999).

1. Aliansi Politik dan Kooptasi Religius

Portugis menggunakan pendekatan kooptasi simbolik untuk membangun jaringan kekuasaan lokal, melalui perjanjian dagang, perlindungan militer terbatas, dan yang paling signifikan, baptisan massal oleh ordo religius Dominikan. Para *liurai* yang bersedia dibaptis dan menunjukkan loyalitas pada Portugis diberikan status istimewa, dukungan dalam menghadapi rival internal, serta akses terhadap sumber daya dan jaringan perdagangan yang dikendalikan oleh Portugis (Boxer, 1965; Therik, 2004). Sebagai hasilnya, terbentuklah kelas bangsawan lokal berafiliasi kolonial, yang tidak hanya menjadi penerus tradisi lokal, tetapi juga bertindak sebagai agen lokal dari otoritas asing. Dalam konteks ini, agama Katolik tidak hanya berfungsi sebagai misi spiritual, tetapi juga sebagai alat legitimasi kekuasaan baru.

2. Fragmentasi Internal dan Politik Pecah Belah

Strategi aliansi tersebut secara perlahan menciptakan fragmentasi internal di antara para *liurai* dan kerajaan-kerajaan lokal. Tidak semua pemimpin menerima kehadiran Portugis. Kerajaan besar seperti Wehali, yang mengklaim supremasi spiritual atas seluruh Pulau Timor, memilih menjaga jarak dan mempertahankan kemerdekaan ritual. Sebaliknya, kerajaan seperti Likusaen dan Luca menjadi sekutu awal Portugis dan

memperoleh keuntungan politik darinya (McWilliam, 2007). Portugis secara oportunistik memanfaatkan persaingan antar-*liurai*, mendorong polaritas lokal untuk menghindari resistensi kolektif. Perjanjian yang semula bersifat kooperatif dapat dengan cepat berubah menjadi sumber konflik, tergantung pada dinamika internal antar komunitas. Dalam konteks ini, penjajahan berjalan melalui mekanisme internalisasi konflik lokal, bukan hanya dominasi eksternal.

3. Peran Ganda *Liurai*: Kolaborator dan Pelindung Tradisi

Para *liurai* tidak dapat digambarkan secara simplistik sebagai korban kolonialisme. Mereka adalah aktor politik strategis yang mampu membaca dan memanfaatkan kehadiran Portugis untuk memperkuat kekuasaan atas wilayah mereka, mengalahkan rival domestik, atau memperoleh legitimasi baru. Kolaborasi sering kali merupakan pilihan taktis, bukan bentuk penyerahan total. Di sisi lain, banyak *liurai* tetap menjalankan fungsi mereka sebagai pelindung adat dan kedaulatan spiritual, mempertahankan ritus lokal, hukum adat, dan sistem *lulik* sebagai bentuk resistensi kultural terselubung terhadap asimilasi kolonial penuh. Hal ini menciptakan ketegangan laten antara struktur kolonial dan kosmologi lokal, yang akan terus berlangsung dalam bentuk negosiasi terbuka maupun tertutup sepanjang masa penjajahan.

4. Konsolidasi Awal Kekuasaan Kolonial

Melalui pendekatan aliansi dan fragmentasi ini, Portugis berhasil membangun fondasi kekuasaan kolonial yang bersifat fleksibel, adaptif, dan tidak memerlukan pendudukan militer luas. Mereka bergantung pada mediator lokal, terutama *liurai* yang bersedia menjadi jembatan antara dunia kolonial dan dunia adat. Pola ini sangat khas dalam sejarah kolonial Timor dan menjelaskan ketahanan panjang kekuasaan Portugis yang bertahan selama lebih dari 450 tahun.

5.4. Peran Misionaris dalam Proses Penjajahan

Para misionaris Katolik, khususnya dari Ordo Dominikan, memainkan peran penting dalam proses penjajahan Portugis di Timor-Leste. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penyebar agama, tetapi juga sebagai agen politik, mediator budaya, dan instrumen ideologis bagi kekuasaan kolonial. Kehadiran mereka di Timor dimulai pada abad ke-16, dengan pusat-pusat misi pertama di Solor dan kemudian Lifau, yang mencerminkan integrasi antara agama dan kekuasaan kolonial Portugis (Boxer, 1965; Hägerdal, 2012; Gunn, 1999).

1. Fungsi Ganda: Religius dan Politik

Misionaris Dominikan hadir di Timor sebagai bagian dari kebijakan resmi kerajaan Portugis, yang menyatukan agama dan negara dalam ekspansi kolonial. Dalam praktiknya, misi Katolik berfungsi sebagai lengan spiritual dari administrasi kolonial, memberikan justifikasi moral untuk dominasi asing dan merestrukturisasi legitimasi kekuasaan lokal melalui narasi Kristen. Sebagai mediator konflik antar kerajaan lokal, mereka memperantarai diplomasi antara *liurai* dan menyampaikan pesan-pesan resmi dari otoritas kolonial. Namun, peran ini juga memperkuat posisi *liurai* yang telah dibaptis, menciptakan kelas elite Kristen yang terikat ideologis dan politis dengan kolonialisme Portugis (Fox, 1980; Niner, 2009).

2. Baptisan sebagai Legitimasi Kekuasaan

Proses pembaptisan para *liurai* seringkali bukan hanya konversi spiritual, tetapi juga pengesahan politik. *Liurai* yang dibaptis menerima legitimasi baru sebagai pemimpin Kristen, yang diakui sebagai perpanjangan dari otoritas Raja Portugal dan Gereja Roma. Dalam banyak kasus, pembaptisan ini menandai berakhirnya otonomi politik

tradisional dan integrasi *liurai* ke dalam sistem kekuasaan kolonial. Hal ini juga menciptakan perubahan dalam otoritas spiritual masyarakat, menggantikan atau menegosiasikan ulang nilai-nilai adat seperti *lulik, tara bandu*, dan *uma lulik* (McWilliam, 2007).

3. Pendidikan, Asimilasi, dan Penanaman Ideologi

Selain itu, para misionaris juga memperkenalkan pendidikan dasar berbasis literasi Latin dan ajaran Katolik sebagai sarana formalisasi identitas Kristen sebagai identitas sosial-politik baru. Pendidikan ini membuka akses sosial bagi kelompok elite tertentu, namun juga menciptakan hierarki nilai antara "Kristen beradab" dan "pagan tradisional", memperkuat segregasi dalam masyarakat kolonial (Gunn, 1999). Para misionaris tidak hanya menyebarkan agama, tetapi juga mendefinisikan ulang struktur sosial, gender, dan kekuasaan dalam komunitas lokal.

4. Gereja sebagai Instrumen Penetrasi Budaya

Gereja berfungsi sebagai alat yang sangat efektif dalam penetrasi budaya dan kontrol sosial. Ia menyediakan kerangka simbolik bagi kolonialisme, membentuk narasi bahwa kolonisasi adalah misi suci untuk menyelamatkan jiwa-jiwa pagan. Dalam konteks ini, para misionaris membentuk ulang pemahaman masyarakat tentang kekuasaan, waktu, ruang suci, dan otoritas (Traube, 1986; Therik, 2004). Meskipun terjadi hibridisasi dan resistensi, terutama di kalangan masyarakat yang masih menjunjung tinggi *lulik* dan hukum adat, Gereja tetap menjadi pengatur utama norma sosial dalam wilayah kekuasaan Portugis.

Peran misionaris dalam proses penjajahan Portugis tidak hanya terbatas pada aktivitas keagamaan. Mereka berfungsi sebagai aktor politis dan struktural yang memainkan peran sentral dalam membangun kerangka ideologis kolonialisme, mengukuhkan

kekuasaan Portugis melalui konversi spiritual, kontrol sosial, dan transformasi nilai-nilai adat. Proyek kolonial Portugis di Timor-Leste harus dipahami sebagai integrasi antara salib dan mahkota, antara doktrin religius dan kekuasaan duniawi, dengan *liurai* sebagai aktor kunci dalam proses negosiasi kekuasaan tersebut (Therik, 2004).

5.5. Reaksi dan Respons *Liurai* Lokal

Kedatangan bangsa Portugis ke Pulau Timor sejak awal abad ke-16 memicu berbagai respons dari para *liurai* lokal, yang merupakan pemimpin tradisional dan simbol kedaulatan komunitas-komunitas adat. Respons mereka tidak bersifat homogen, melainkan sangat bergantung pada konteks politik, geografis, ekonomi, serta spiritual yang melingkupi setiap kerajaan atau konfederasi lokal (Hägerdal, 2012; McWilliam, 2007).

1. Penerimaan Taktis: Strategi Adaptif dan Alat Konsolidasi Kekuasaan

Sebagian *liurai* menyambut kehadiran Portugis sebagai peluang strategis untuk memperkuat posisi mereka di antara rival lokal. Bantuan Portugis berupa senjata, perlindungan militer, dan legitimasi religius melalui baptisan Katolik dijadikan modal untuk konsolidasi kekuasaan atas wilayah-wilayah yang masih berada dalam sengketa antarkerajaan. Dalam kasus seperti Luca dan Likusaen, para *liurai* menjalin hubungan afiliasi yang saling menguntungkan dengan Portugis, menjadikan mereka bagian dari jaringan kekuasaan kolonial yang sedang tumbuh (Gunn, 1999). Namun, hubungan ini bersifat pragmatis, bukan sepenuhnya ideologis. Para *liurai* tetap mempertahankan ritus lokal, sistem klan, dan hukum adat, meskipun secara simbolik telah berafiliasi dengan struktur kolonial.

2. Perlawanan Terbuka dan Terselubung

Di sisi lain, banyak *liurai* menunjukkan resistensi aktif maupun pasif terhadap kehadiran Portugis. Resistensi terbuka terjadi dalam bentuk serangan terhadap pos misi, penolakan terhadap pembaptisan, pemutusan aliansi, serta pengusiran agen kolonial dari wilayah kekuasaan adat. Wilayah seperti Wehali di bagian tengah dan selatan Timor, yang memiliki klaim sebagai pusat spiritual pulau, cenderung menolak dominasi asing secara konsisten, mempertahankan struktur sosial dan spiritual mereka tanpa kompromi (Therik, 2004). Bentuk perlawanan juga hadir dalam cara yang tidak langsung, seperti memindahkan pusat kekuasaan ke wilayah-wilayah lebih terpencil, menolak tunduk pada norma hukum kolonial, atau menyembunyikan praktik adat di balik liturgi Katolik. Strategi ini menunjukkan tingkat adaptasi dan kamuflase budaya yang tinggi dalam menjaga kelangsungan identitas komunitas.

3. Otonomi Spiritual dan Budaya sebagai Bentuk Perlawanan

Bagi para *liurai*, mempertahankan otonomi spiritual dan budaya merupakan inti dari perjuangan mereka. Meskipun secara politis mereka mungkin menjalin aliansi, secara kultural banyak di antara mereka menolak sepenuhnya penyerahan identitas lokal kepada kolonialisme. Mereka terus menjalankan ritual-ritual adat, memelihara *uma lulik*, dan menegakkan hukum adat (*tara bandu*) di tengah tekanan dari sistem moral dan hukum kolonial yang dibawa misionaris dan administrasi Portugis (Fox, 1980). Dengan mempertahankan relasi spiritual dengan leluhur, para *liurai* tidak hanya menjaga legitimasi mereka sebagai pemimpin, tetapi juga mempertahankan struktur makna sosial yang menjadi fondasi komunitas mereka. Dalam konteks ini, resistensi menjadi tindakan kosmologis, bukan semata politis.

4. *Liurai* sebagai Mediator antara Dunia Lokal dan Dunia Kolonial

Respons para *liurai* juga memperlihatkan peran mereka sebagai mediator kompleks antara dunia adat dan dunia kolonial. Dalam posisi ini, mereka sering harus bernegosiasi antara kepentingan komunitasnya dan tekanan dari otoritas kolonial, termasuk dalam urusan pajak, hukum, dan konversi agama. Keberhasilan mereka dalam memainkan peran ini menentukan derajat otonomi lokal yang masih dapat dipertahankan selama periode awal penjajahan.

Respons para *liurai* terhadap penjajahan Portugis mencerminkan beragam strategi lokal dalam menghadapi kekuasaan asing—dari penerimaan taktis hingga perlawanan spiritual yang mendalam. Para *liurai* bukanlah subjek pasif kolonialisme, melainkan aktor historis yang adaptif, strategis, dan resistif, yang terus berusaha mempertahankan integritas budaya dan politik komunitas mereka dalam menghadapi proyek imperialisme yang panjang dan kompleks.

5.6. Penutup

Fase awal penjajahan Portugis di Pulau Timor merupakan periode transisi kritis yang ditandai oleh interaksi kompleks antara kekuatan kolonial dan masyarakat adat. Tidak seperti model kolonialisme yang mengedepankan dominasi militer langsung, penjajahan Portugis berkembang melalui strategi penetrasi simbolik, negosiasi diplomatik, kooptasi religius, dan fragmentasi internal. Penjajahan ini bukanlah proses dominasi tunggal, melainkan interaksi dinamis yang melibatkan negosiasi, aliansi, konflik, dan adaptasi.

Dalam konfigurasi ini, *liurai* lokal tidak dapat direduksi sebagai korban pasif dari kolonialisme, melainkan tampil sebagai aktor historis strategis yang memainkan peran kunci dalam menavigasi kekuasaan asing, mempertahankan otonomi adat, serta dalam

beberapa kasus, memanfaatkan kehadiran Portugis untuk memperkuat posisi mereka dalam sistem kekuasaan lokal (Gunn, 1999; Hägerdal, 2012; McWilliam, 2007). Para *liurai* terlibat dalam aliansi taktis, menunjukkan adaptasi politik yang fleksibel, dan dalam banyak konteks, mengelola resistensi kultural dan spiritual terhadap proyek imperialisme yang mencoba menstruktur ulang tata nilai lokal.

Gereja Katolik—melalui misi Dominikan—memainkan peran ganda sebagai agen evangelisasi sekaligus sebagai perpanjangan tangan kekuasaan kolonial, memperkuat struktur hegemonik sekaligus menjadi medan negosiasi antara iman baru dan sistem kepercayaan lokal. Oleh karena itu, penjajahan awal Portugis tidak dapat dipahami sebagai proses linier kolonisasi dari luar ke dalam, melainkan sebagai jaringan relasional yang dibentuk oleh konflik, kolaborasi, resistensi, dan akomodasi.

Pengalaman Timor dalam fase ini menegaskan bahwa kolonialisme adalah proyek yang dinegosiasikan secara lokal, dan bahwa *liurai* merupakan elemen vital dalam mempertahankan kontinuitas budaya, hukum adat, dan kedaulatan spiritual masyarakat Timor-Leste.

BAB 6: DINAMIKA PENJAJAHAN SELAMA 450 TAHUN

6.1. Pendahuluan

Penjajahan Portugis di Timor-Leste merupakan salah satu periode kolonial terpanjang dalam sejarah dunia, berlangsung hampir empat setengah abad—dari kedatangan bangsa Portugis pada awal abad ke-16 hingga kepergian mereka pada tahun 1975. Sepanjang periode ini, relasi kekuasaan antara pemerintah kolonial dan masyarakat lokal mengalami berbagai transformasi, dari dominasi dagang berbasis misi keagamaan, hingga formalisasi sistem administrasi kolonial modern. Dinamika ini tidak statis; ia bergerak melalui fase-fase konflik dan kompromi, akulturasi dan resistensi, serta perubahan struktur sosial dan politik lokal yang cukup signifikan.

Penjajahan Portugis di Timor-Leste memperlihatkan karakteristik kolonialisme yang paradoksal: lemah secara administratif, tetapi kuat secara simbolik dan ideologis (Gunn, 1999; Hägerdal, 2012). Kekuasaan mereka tidak pernah sepenuhnya mengontrol seluruh wilayah Timor, melainkan terbatas pada kantong-kantong tertentu seperti Lifau, Dili, dan beberapa daerah yang bersedia bersekutu. Meskipun demikian, melalui peran Gereja Katolik, para misionaris, dan jaringan patronase dengan *liurai* lokal, sistem kolonial mampu bertahan dalam jangka panjang.

Relasi antara kolonialis dan masyarakat lokal di Timor bukanlah bentuk dominasi tunggal, melainkan proses dialektik yang melibatkan resistensi, adaptasi, dan akomodasi. *Liurai* lokal, sebagai pemimpin adat, memainkan peran ganda dalam sistem ini, baik sebagai kolaborator maupun sebagai penentang. Mereka berfungsi sebagai perantara antara kekuasaan kolonial dan komunitas adat, serta menjadi agen penting dalam mempertahankan otonomi adat dan struktur kekuasaan lokal.

Bab ini bertujuan untuk membedah dinamika tersebut secara sistematis dan historis, dengan fokus pada empat fase utama: 1) transisi dari dominasi religius ke administrasi kolonial formal; 2) peran ganda para *liurai* dalam sistem patron-klien kolonial; 3) resistensi dan pemberontakan lokal terhadap tekanan kolonial; serta 4) dampak struktural kolonialisme terhadap tatanan sosial-politik lokal. Penekanan akan diberikan pada bagaimana *liurai* mempertahankan peran strategis mereka sepanjang sejarah kolonial ini, baik sebagai penjaga kesinambungan adat maupun sebagai agen perubahan dalam arus kekuasaan kolonial.

6.2. Transformasi Struktur Kekuasaan Tradisional

Selama lebih dari empat abad penjajahan Portugis di Timor-Leste, struktur kekuasaan tradisional berbasis adat mengalami transformasi fundamental yang membentuk wajah politik lokal hingga era kemerdekaan. Sebelum kedatangan kolonialisme, otoritas lokal berpusat pada figur *liurai*, pemimpin adat yang tidak hanya memegang kendali administratif atas komunitasnya, tetapi juga memikul tanggung jawab spiritual dan kosmologis. Kedudukan *liurai* dipahami sebagai manifestasi dari hubungan sakral dengan leluhur (*matebian*) dan bumi (*rai*), yang diperkuat melalui ritus adat dan struktur genealogis klan (Therik, 2004; Traube, 1986).

Namun, sejak abad ke-17, intervensi kolonial secara bertahap menggantikan otoritas adat dengan sistem pemerintahan kolonial, yang memperkenalkan nilai, struktur, dan praktik kekuasaan yang bersumber dari model birokrasi Eropa. Melalui strategi aliansi politik, konversi agama, dan penataan administratif, kekuasaan Portugis mereduksi *liurai* menjadi agen lokal dalam struktur kolonial, mengubah mereka dari pemimpin otonom menjadi penghubung antara masyarakat adat dan negara kolonial (Gunn, 1999; Hägerdal, 2012).

1. Institusionalisasi Kekuasaan Tradisional sebagai “Reino”

Salah satu langkah paling signifikan dalam proses ini adalah klasifikasi kerajaan-kerajaan adat menjadi unit administratif kolonial yang disebut "*reino*". Tiap *reino* dipimpin oleh seorang *liurai* yang secara formal diakui oleh otoritas Portugis dan diberi gelar administratif seperti *chefe de suco* atau *chefe de posto*, tergantung tingkatannya (McWilliam, 2007). Pengakuan resmi ini bersifat strategis—Portugis hanya menunjuk pemimpin lokal yang loyal dan efektif dalam menjaga ketertiban, mengumpulkan pajak, serta menyebarkan pengaruh kolonial melalui sistem patron-klien. Kebijakan ini membentuk tatanan kekuasaan baru yang hierarkis dan bergantung pada relasi politis, bukan pada sistem nilai adat. Proses ini secara efektif mengikis mekanisme pemilihan atau penunjukan *liurai* berdasarkan konsensus klan atau ritus leluhur, menggantikannya dengan legitimasi yang berasal dari penguasa kolonial.

2. Rekonstruksi Mekanisme Pewarisan Kekuasaan

Transformasi juga terjadi dalam aspek pewarisan kekuasaan. Sebelum kolonialisme, posisi *liurai* sering kali ditentukan melalui mekanisme ritual dan konsensus klan, mempertimbangkan legitimasi genealogis, spiritualitas, dan kemampuan kepemimpinan. Namun, dalam sistem kolonial, proses ini diambil alih oleh administrasi kolonial. Loyalitas politik menggantikan legitimasi kosmologis, dan banyak pemimpin lokal ditunjuk karena afiliasi mereka dengan kekuasaan kolonial, bukan karena dukungan adat (Fox, 1980). Hal ini menimbulkan konflik internal dalam komunitas, terutama di kalangan klan yang merasa terpinggirkan atau kehilangan hak-hak tradisional mereka. Tidak sedikit terjadi fragmentasi sosial dan hilangnya otoritas simbolik, karena pemimpin yang diangkat tidak lagi dipandang sebagai representasi leluhur atau roh pelindung wilayah.

3. Lahirnya Kelas *Liurai* Baru dan Akomodasi Strategis

Di sisi lain, tidak semua *liurai* menolak sistem baru ini. Beberapa di antaranya berhasil menavigasi struktur kolonial secara cerdas, memanfaatkan akses terhadap pendidikan misionaris, infrastruktur, dan jaringan politik kolonial untuk memperkuat posisi mereka. Mereka menjadi bagian dari kelas aristokrat kolonial baru: berpendidikan Katolik, menguasai bahasa Portugis, dan berafiliasi langsung dengan kekuasaan di Dili dan bahkan Lisboa. Kelas ini mengembangkan identitas ganda—sebagai penjaga tradisi lokal sekaligus aktor dalam sistem kolonial. Fenomena ini menunjukkan bahwa kolonialisme bukan hanya proses dominasi, tetapi juga arena negosiasi kekuasaan, di mana aktor lokal memainkan peran aktif dalam membentuk struktur hibrida antara adat dan kolonialisme (Niner, 2009).

4. Antara Erosi dan Transfigurasi Tradisi

Meskipun banyak elemen struktur kekuasaan adat tergerus oleh kebijakan kolonial, tidak semua bentuknya lenyap. Dalam banyak konteks, tatanan adat bertransformasi menjadi bentuk baru, menyesuaikan dengan ruang kolonial sambil tetap menjaga legitimasi spiritualnya. *Sistem lulik*, rumah adat, ritus *tara bandu*, dan narasi leluhur tetap dijaga sebagai basis otoritas moral dan sosial. Dengan demikian, kolonialisme Portugis menciptakan proses transfigurasi, bukan sekadar erosi. Tradisi dan kekuasaan adat tidak sepenuhnya musnah, melainkan diadaptasi dalam struktur kolonial, menciptakan zona abu-abu antara kontinuitas dan disrupsi, antara koeksistensi dan konflik.

Transformasi struktur kekuasaan tradisional selama penjajahan Portugis merupakan proses yang kompleks, berlapis, dan tidak seragam. Para *liurai*, sebagai aktor utama dalam tatanan lokal, mengalami reposisi peran—dari pemimpin sakral menjadi pejabat kolonial, dari pelindung adat menjadi mediator kekuasaan asing. Namun, dalam

banyak kasus, mereka tetap menjadi penjaga identitas lokal, membuktikan bahwa bahkan dalam kerangka kolonialisme yang panjang, daya tahan tradisi dan strategi adaptasi lokal mampu mempertahankan warisan spiritual dan sosial masyarakat Timor-Leste.

6.3. Peran Ganda *Liurai*: Kolaborator dan Penyeimbang Lokal

Dalam konteks kolonial Portugis di Timor-Leste, para *liurai* memainkan peran ganda yang kompleks sebagai kolaborator kolonial dan sekaligus penyeimbang lokal. Peran ini mencerminkan strategi adaptasi dan negosiasi politik yang dijalankan oleh elite lokal untuk bertahan dalam kondisi penjajahan yang berlarut-larut dan lemah secara struktural (Gunn, 1999; Niner, 2009). *Liurai* bertindak sebagai penghubung antara dua dunia yang berbeda: kekuasaan kolonial yang modern dan tatanan adat tradisional.

1. Kolaborasi Strategis dalam Struktur Kekuasaan Kolonial

Sebagai kolaborator, banyak *liurai* menjalin hubungan formal dengan pemerintah kolonial Portugis untuk mempertahankan atau memperluas pengaruh mereka. Melalui pengangkatan resmi sebagai *chefe de suco* atau *chefe de posto*, *liurai* memperoleh akses ke dalam struktur pemerintahan kolonial, termasuk kekuasaan administratif, otoritas hukum, dan sumber daya ekonomi. Meskipun demikian, hubungan ini tidak sepenuhnya bersifat subordinasi. Banyak *liurai* menggunakan posisi mereka untuk menegosiasikan ruang otonomi, seperti mempertahankan hak adat atas tanah dan melindungi hukum adat dari intervensi kebijakan kolonial yang dianggap merusak tatanan lokal (McWilliam, 2007). Dengan demikian, kolaborasi mereka lebih bersifat instrumental dan situasional, tergantung pada konteks lokal dan kapasitas negosiasi masing-masing *liurai*.

2. Jembatan antara Sistem Kolonial dan Tatanan Adat

Para *liurai* berfungsi sebagai mediator budaya dan politik antara dua sistem yang berbeda: sistem kolonial dan struktur adat tradisional. Mereka seringkali menerjemahkan kebijakan kolonial ke dalam bentuk yang lebih dapat diterima oleh masyarakat adat. Tindakan seperti menunda implementasi kebijakan, menolak upaya konsolidasi tanah, atau menegosiasikan ulang bentuk pajak menjadi bagian dari praktik keseharian *liurai* yang memahami dengan baik logika kekuasaan kolonial dan nalar sosial masyarakat adat (Traube, 1986). Fungsi ini menjadikan mereka sebagai penyeimbang struktural dalam sistem kolonial yang rawan resistensi dan perpecahan.

3. Fungsi Adat dan Spiritualitas Tetap Dipertahankan

Di luar peran administratif, *liurai* tetap mempertahankan fungsi-fungsi spiritual dan adat mereka. Mereka adalah penjaga *uma lulik*, pelaksana ritus *tara bandu*, dan pemegang otoritas simbolik atas tanah dan leluhur. Di daerah-daerah terpencil, kekuasaan spiritual dan adat mereka lebih dominan daripada otoritas kolonial, dan legitimasi kepemimpinan mereka tetap bertumpu pada hubungan kosmologis dengan leluhur dan tanah (Therik, 2004; Fox, 1980). Fungsi ini sangat penting dalam menjaga kohesi sosial komunitas di tengah tekanan eksternal yang terus-menerus dari kolonialisme dan misi Katolik.

4. Penggunaan Institusi Kolonial untuk Kepentingan Lokal

Beberapa *liurai* dengan cermat memanfaatkan institusi kolonial seperti gereja, sekolah, dan birokrasi lokal untuk memperkuat posisi keluarga mereka. Mereka mengirimkan anak-anak ke sekolah misi Katolik untuk memperoleh pendidikan formal yang membuka akses ke dalam lapisan elite birokrasi dan politik kolonial. Ini menghasilkan generasi *liurai* terdidik yang kemudian memainkan peran penting dalam administrasi

kolonial maupun dalam gerakan nasionalisme pada abad ke-20 (Niner, 2009). Strategi ini menciptakan kelas aristokrat Katolik pribumi yang menguasai bahasa Portugis dan memiliki akses terhadap jaringan politik serta ekonomi, meskipun tetap berakar pada legitimasi adat.

5. Ambivalensi dan Ketegangan Internal

Meskipun banyak *liurai* berperan sebagai stabilisator sistem, mereka juga menghadapi ketegangan internal dalam komunitas akibat posisi mereka yang ambigu. Kolaborasi dengan kekuasaan kolonial kadang dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap adat, terutama jika keputusan yang mereka ambil bertentangan dengan konsensus komunitas atau merugikan kelompok lain dalam struktur klan. Hal ini menciptakan ambivalensi politik dan sosial yang mewarnai posisi *liurai* sepanjang era kolonial.

Peran ganda *liurai* sebagai kolaborator dan penyeimbang lokal menciptakan dinamika yang kompleks dalam sejarah kolonial Timor-Leste. Mereka bukan hanya pelaksana kekuasaan kolonial, tetapi juga aktor strategis yang berhasil mempertahankan keseimbangan antara tuntutan kolonial dan kelestarian sistem sosial budaya lokal. Dalam ruang antara adat dan kolonialisme, *liurai* menjadi pilar penting dalam sejarah resiliensi politik dan kultural masyarakat Timor-Leste.

6.4. Warisan Kolonialisme dalam Struktur Sosial dan Politik Lokal

Penjajahan Portugis di Timor-Leste selama hampir lima abad meninggalkan warisan yang kompleks dan ambivalen dalam struktur sosial dan politik masyarakat. Warisan tersebut tidak hanya terbatas pada peninggalan institusional, tetapi juga merambah ke dalam aspek budaya, hubungan kekuasaan, dan pola pikir masyarakat. Kolonialisme menciptakan struktur hibrida yang memadukan modernitas administratif dan

kontinuitas tradisional, serta menciptakan negosiasi antara dominasi eksternal dan kearifan lokal (Hägerdal, 2012; Gunn, 1999).

1. Integrasi Kekuasaan Adat dalam Sistem Kolonial

Salah satu warisan utama kolonialisme adalah kooptasi struktur kekuasaan adat ke dalam kerangka administratif kolonial. Para *liurai* yang sebelumnya memiliki otoritas spiritual dan politik otonom berbasis adat secara bertahap direduksi menjadi penguasa lokal yang diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan Portugis melalui gelar administratif seperti *chefe de suco* atau *chefe de posto* (McWilliam, 2007). Integrasi ini melahirkan model kepemimpinan hibrida, di mana otoritas adat dan negara saling melengkapi namun juga saling menegasikan, dan bahkan terus berlanjut dalam dinamika politik pascakemerdekaan.

2. Stratifikasi Sosial dan Warisan Elitisme Kolonial

Kolonialisme juga menciptakan stratifikasi sosial yang lebih tajam. Keluarga-keluarga *liurai* yang berafiliasi dengan kekuasaan kolonial memperoleh keistimewaan dalam bentuk pendidikan misionaris, kepemilikan tanah, dan akses administratif. Hal ini menghasilkan kelas elit kolonial lokal yang dominan secara ekonomi dan politik, sementara mayoritas masyarakat tetap berada dalam posisi subordinat dan marginal. Struktur ini bukan hanya bertahan, tetapi juga bertransformasi menjadi basis sosial-politik baru di era pascakolonial, di mana posisi dalam birokrasi dan politik sering kali diwarisi dari struktur feodal-kolonial masa lalu (Niner, 2009). Ketimpangan historis ini turut memengaruhi bentuk-bentuk eksklusi dan akses tidak merata terhadap sumber daya nasional pada era kemerdekaan.

3. Asimilasi Budaya dan Ketahanan Nilai Lokal

Dari sisi budaya, kolonialisme Portugis meninggalkan pengaruh mendalam melalui kristenisasi dan penyebaran bahasa Portugis. Gereja Katolik menjadi institusi hegemonik dalam pendidikan, kesehatan, dan moralitas publik. Nilai-nilai Katolik diinternalisasi dalam sistem nilai masyarakat, sering kali menggeser, tetapi juga bercampur dengan nilai adat lokal, menghasilkan bentuk sinkretisme budaya yang khas (Traube, 1986). Namun demikian, masyarakat Timor-Leste menunjukkan kapasitas adaptif tinggi, di mana banyak elemen adat seperti *tara bandu*, *uma lulik*, dan ritus leluhur tetap bertahan dan bahkan mengalami revitalisasi. Proses ini membuktikan bahwa budaya lokal tidak hanya menjadi korban kolonialisme, tetapi juga aktor dalam perundingan makna, memadukan unsur baru dalam kerangka nilai yang masih berakar kuat pada kosmologi adat.

4. Birokrasi dan Sistem Pemerintahan Pascakolonial

Di bidang kelembagaan, banyak struktur birokrasi yang diterapkan pascakemerdekaan—baik di tingkat pusat maupun desa—mengadopsi kerangka warisan kolonial. Model pemerintahan yang bersifat hierarkis dan formalistik ini sering kali bertabrakan dengan fleksibilitas sistem adat, terutama dalam mekanisme pengambilan keputusan, distribusi kekuasaan, dan pengelolaan sumber daya lokal (McWilliam, 2005). Ketegangan antara negara modern dan masyarakat adat masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan pemerintahan yang partisipatif dan inklusif.

5. Warisan Psikososial dan Budaya Politik

Selain aspek struktural, kolonialisme meninggalkan warisan psikososial berupa budaya kekuasaan yang paternalistik. Selama berabad-abad, relasi antara rakyat dan penguasa

dikonstruksi dalam kerangka taat-buta dan vertikalisme, yang meminimalkan partisipasi warga dalam proses politik dan menciptakan resistensi terhadap praktik demokrasi deliberatif (Hohe, 2002). Budaya ini menghambat perkembangan masyarakat sipil yang aktif dan memperkuat dominasi elite.

Warisan kolonialisme Portugis di Timor-Leste tidak dapat direduksi sebagai sekadar warisan fisik atau kelembagaan. Ia hadir sebagai struktur historis yang membentuk pola relasi kuasa, stratifikasi sosial, dan etika politik, bahkan hingga masa kemerdekaan. Untuk membangun negara-bangsa yang berakar pada identitas kultural dan keadilan sosial, proses dekolonisasi struktural dan simbolik harus terus dilakukan. Ini mencakup upaya kritis dalam merevisi institusi warisan kolonial, merehabilitasi sistem adat yang inklusif, serta membangun budaya demokrasi yang partisipatif dan setara.

6.5. Kesimpulan

Penjajahan Portugis yang berlangsung lebih dari 450 tahun di Timor-Leste bukanlah proses dominasi total, melainkan dialektika historis yang penuh dengan negosiasi, resistensi, adaptasi, dan transformasi. Selama periode ini, hubungan antara kekuasaan kolonial dan masyarakat adat tidak bersifat tunggal atau linier. Sebaliknya, hubungan ini berlangsung dalam ketegangan dinamis antara pengaruh eksternal dan ketahanan internal.

Salah satu aspek yang paling mencolok dari periode kolonial adalah adaptasi struktur kekuasaan tradisional, terutama yang berpusat pada para *liurai*, dalam kerangka kolonial. Melalui aliansi, kooptasi administratif, dan integrasi simbolik dengan misi keagamaan Katolik, para *liurai* berubah dari pemimpin spiritual dan sosial otonom menjadi aktor ambivalen dalam struktur kolonial. Dalam posisi ini, mereka

mempertahankan legitimasi adat sambil menjalankan fungsi-fungsi kolonial yang diberlakukan oleh kekuasaan Portugis.

Transformasi ini memiliki dampak besar terhadap struktur sosial-politik lokal. Di satu sisi, lahir kelas elite lokal baru yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara kolonial. Di sisi lain, masyarakat adat berhasil mempertahankan dan mentransformasi sistem nilai tradisional mereka, meskipun menghadapi tekanan ideologis dari Gereja Katolik dan aparat kolonial. Interaksi ini melahirkan bentuk kebudayaan hibrida yang menunjukkan kapasitas luar biasa masyarakat Timor-Leste dalam menyerap unsur-unsur baru tanpa kehilangan akar budaya mereka.

Dampak kolonialisme juga dapat dirasakan dalam struktur kelembagaan dan pola pikir pascakolonial, di mana birokrasi, stratifikasi sosial, dan relasi kuasa yang hierarkis masih mencerminkan warisan historis tersebut. Ketegangan antara sistem formal negara modern dan hukum adat tetap menjadi tantangan utama dalam pembangunan Timor-Leste sebagai negara demokratis yang berakar pada identitas kulturalnya.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap dampak jangka panjang dari penjajahan Portugis sangat penting dalam upaya rekonstruksi sosial-politik dan dekolonisasi struktural Timor-Leste. Dalam proses ini, para *liurai* tidak hanya dipahami sebagai simbol masa lalu kolonial, tetapi juga sebagai representasi daya tahan komunitas lokal dalam mempertahankan kedaulatan kultural dan spiritual mereka di tengah tekanan kekuasaan global.

BAB 7: POST-KOLONIALISME PORTUGIS

7.1. Pendahuluan

Masa post-kolonialisme Portugis dalam konteks Timor-Leste mengacu pada periode transisi yang dimulai sejak Revolusi Bunga di Portugal pada tahun 1974, yang mengguncang fondasi kekuasaan kolonial Portugis di seluruh dunia. Di Timor-Leste, momentum ini membuka peluang bagi kebangkitan nasionalisme, artikulasi politik yang lebih bebas, serta upaya membangun negara merdeka. Namun, masa post-kolonial ini hanya berlangsung singkat, ditandai oleh kekosongan kekuasaan, konflik internal antar faksi politik, dan berakhir dengan intervensi militer Indonesia pada tahun 1975.

Setelah hampir lima abad berada di bawah kekuasaan kolonial Portugis, Timor-Leste memasuki sebuah fase transisi yang menentukan. Perubahan mendadak yang terjadi setelah jatuhnya rezim Estado Novo di Portugal memunculkan berbagai dinamika sosial-politik di tingkat lokal. Fragmentasi kekuatan politik, ketiadaan otoritas administratif yang efektif, serta campur tangan asing menyebabkan ketidakstabilan serius dalam masyarakat Timor-Leste. Dalam konteks ini, para *liurai* atau pemimpin tradisional memainkan peran penting dalam menjaga kontinuitas sosial dan identitas budaya komunitas mereka.

Beberapa *liurai* terlibat langsung dalam proses politik yang sedang tumbuh, sementara yang lain bertindak sebagai penyeimbang dalam menjaga harmoni sosial di tengah kekacauan politik. Peran *liurai* dalam masa ini tidak hanya simbolik, melainkan juga praktis sebagai pemimpin lokal yang dihormati dan dijadikan rujukan di tengah kekosongan kekuasaan formal. Mereka berperan sebagai penjaga stabilitas sosial di tengah kekosongan otoritas negara dan terlibat dalam dinamika politik lokal dan nasional yang berkembang.

Pemahaman atas masa post-kolonialisme Portugis menjadi sangat penting untuk menelusuri akar krisis politik tahun 1975 dan memahami bagaimana warisan kolonial serta struktur adat tradisional berinteraksi dalam membentuk fondasi sosial-politik Timor-Leste menuju masa kemerdekaan. Bab ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana fase post-kolonialisme Portugis membentuk lanskap politik dan sosial Timor-Leste, serta mengkaji keterlibatan dan peran para *liurai* dalam masa transisi menuju kemerdekaan.

7.2. Dekolonisasi Mendesak dan Krisis Transisi

1. Proses Dekolonisasi yang Tiba-Tiba

Proses dekolonisasi Timor-Leste berlangsung secara mendadak dan tidak sistematis setelah jatuhnya rezim Estado Novo melalui Revolusi Bunga di Portugal pada April 1974. Pemerintahan revolusioner yang terbentuk di Lisbon segera mengadopsi kebijakan dekolonisasi cepat sebagai bagian dari reformasi demokratis dan penolakan terhadap warisan kolonialisme (Taylor, 1991).

Meskipun progresif dalam konteks internal Portugal, kebijakan ini menciptakan kekosongan administratif dan politik di wilayah-wilayah koloni seperti Timor-Leste, yang belum memiliki lembaga transisi atau struktur pemerintahan lokal yang siap menggantikan otoritas kolonial.

Di Timor-Leste, kekosongan ini membuka ruang bagi munculnya partai-partai politik baru, seperti *União Democrática Timorense* (UDT), *Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente* (FRETILIN), dan *Associação Popular Democrática Timorense* (APODETI). Ketiga kelompok ini secara cepat memperoleh dukungan masyarakat, namun juga

terlibat dalam kontestasi politik yang tajam, yang akhirnya berujung pada konflik bersenjata pada Agustus 1975 (CAVR, 2005).

2. Ketidaksiapan Struktural dan Fragmentasi Politik

Krisis transisi ini memperlihatkan tiga masalah utama:

- Ketidaksiapan administratif dan struktural: Runtuhnya struktur kolonial tidak diikuti pembentukan lembaga alternatif yang kredibel untuk mengelola proses kemerdekaan. Portugal tidak membentuk mekanisme transisi yang mapan, sehingga mekanisme administratif kolonial hancur sebelum lembaga nasional dapat berdiri secara fungsional.
- Minimnya rekonsiliasi politik antar faksi: Tidak adanya ruang dialog yang memadai di antara partai politik utama menyebabkan fragmentasi, ketegangan, dan upaya saling menjatuhkan di antara kelompok-kelompok nasionalis.
- Ketiadaan partisipasi struktur sosial-adat dalam dekolonisasi: Para *liurai*, sebagai penjaga stabilitas sosial dan identitas komunitas, tidak diikutsertakan secara strategis dalam perundingan politik formal. Ini menyebabkan terputusnya kesinambungan sosial antara masa kolonial dan cita-cita negara merdeka (Therik, 2004).

Akibat ketiadaan struktur administratif yang kuat dan kohesi politik yang rapuh, kompetisi di antara kelompok politik lokal berubah menjadi perang saudara singkat yang memperlemah stabilitas internal (Dunn, 1983).

3. Dilema Otoritas Tradisional dalam Dinamika Politik Modern

Dalam konteks transisi ini, struktur sosial tradisional Timor-Leste juga mengalami kebingungan orientasi. Para *liurai* dihadapkan pada dilema: mempertahankan

legitimasi tradisional dalam dinamika baru atau bertransformasi mengikuti arah politik modern yang tengah berkembang.

Sebagian besar *liurai* mengambil posisi yang beragam: ada yang mendukung partai-partai politik yang dianggap sejalan dengan nilai-nilai adat, sementara yang lain berfokus menjaga kohesi komunitas lokal mereka dari dampak destruktif konflik nasional. Namun, secara umum, marginalisasi institusi adat dalam proses dekolonisasi menyebabkan fragmentasi sosial dan hilangnya otoritas tradisional yang selama ini menjadi penopang stabilitas masyarakat (Therik, 2004).

4. Celah Bagi Intervensi Eksternal

Proses dekolonisasi yang tergesa-gesa dan tidak terstruktur ini tidak hanya melemahkan posisi internal Timor-Leste, tetapi juga membuka ruang bagi intervensi eksternal. Indonesia, dengan dukungan geopolitik regional tertentu, memanfaatkan kekosongan ini sebagai legitimasi untuk melancarkan operasi militer dan aneksasi wilayah pada Desember 1975 (Dunn, 1983).

Krisis dekolonisasi ini menjadi titik balik dalam sejarah Timor-Leste, di mana kegagalan membangun fondasi kelembagaan dan politik domestik berpadu dengan tekanan geopolitik eksternal, sehingga membawa negara ini ke dalam periode pendudukan baru selama hampir seperempat abad.

Pemahaman terhadap krisis ini penting untuk menelusuri akar dari ketegangan politik yang membentuk perjalanan panjang Timor-Leste menuju kemerdekaan. Bab selanjutnya akan membahas bagaimana struktur adat dan para *liurai* tetap bertahan serta berperan dalam mempertahankan identitas kolektif masyarakat Timor-Leste di tengah situasi sosial-politik yang sangat tidak menentu.

7.3. Peran *Liurai* dalam Masa Transisi

Masa transisi pasca-kolonial Portugis di Timor-Leste (1974–1975) merupakan periode yang diwarnai oleh kekosongan kekuasaan formal, konflik politik antarfaksi, dan ketiadaan struktur pemerintahan nasional yang kuat. Dalam konteks kekacauan tersebut, para *liurai* (pemimpin adat lokal) memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial, menjadi simbol kontinuitas budaya, serta menjembatani dunia tradisional dan politik modern yang tengah tumbuh (Traube, 1986; Therik, 2004).

1. Penjaga Tatanan Sosial dan Keamanan Komunitas

Dengan runtuhnya otoritas kolonial Portugis, komunitas-komunitas lokal secara alami kembali menggantungkan diri pada sistem adat dan otoritas para *liurai*. Mereka berperan memediasi konflik internal, menjaga ketertiban umum, dan mempertahankan kohesi sosial melalui pranata tradisional yang masih dihormati luas (McWilliam & Traube, 2011). Di beberapa wilayah, *liurai* bahkan mengambil peran administratif de facto, menggantikan fungsi negara yang absen.

Dalam situasi krisis identitas politik nasional, *liurai* menjadi jangkar sosial dan moral di tengah kekacauan, memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan di tingkat komunitas (Therik, 2004).

2. Simbol Legitimasi Lokal dan Identitas Komunal

Dalam masa ketidakpastian politik, keberadaan *liurai* menjadi simbol legitimasi lokal yang memperkuat identitas komunal masyarakat adat. Fungsi mereka tidak hanya administratif, tetapi juga spiritual dan genealogis, menghubungkan komunitas dengan tradisi sejarah panjang kedaulatan lokal (Traube, 1986). Kepercayaan terhadap *liurai* sering kali lebih besar daripada kepada aktor-aktor politik baru yang muncul secara mendadak.

Sebagai figur otoritatif yang dihormati, para *liurai* menjadi sumber kohesi sosial yang penting, mencegah disintegrasi komunitas-komunitas adat di tengah polarisasi politik yang tajam.

3. Perantara antara Struktur Tradisional dan Politik Modern

Sebagian *liurai* memilih terlibat dalam politik nasional dengan mendukung faksi-faksi seperti FRETILIN, UDT, atau APODETI, sementara sebagian lainnya mengambil posisi netral untuk menjaga integritas komunitasnya (CAVR, 2005). Dalam konteks ini, para *liurai* berperan sebagai perantara antara elite nasionalis dan masyarakat adat yang belum akrab dengan sistem partai politik dan ideologi nasionalisme modern.

Keterlibatan mereka menunjukkan bahwa warisan kepemimpinan tradisional tidak hanya bertahan, tetapi juga bertransformasi untuk memenuhi kebutuhan transisi politik yang kompleks.

4. Ketahanan Budaya dan Hukum Adat dalam Masa Kekosongan Institusional

Dalam situasi ketiadaan negara, pranata-pranata hukum adat seperti *tara bandu* tetap dijalankan di bawah otoritas *liurai* (McWilliam & Traube, 2011). Praktik-praktik spiritual, hukum adat, dan ritual komunal terus berlangsung, mempertahankan identitas budaya dan struktur sosial masyarakat Timor.

Liurai menjadi benteng terakhir dari identitas komunal, menjaga nilai-nilai lokal di tengah gempuran perubahan politik modern yang sering kali mengabaikan aspek budaya tradisional.

5. Keterbatasan dalam Historiografi Nasional

Meskipun peran *liurai* sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan identitas budaya selama masa transisi, kontribusi mereka kerap diabaikan dalam narasi resmi sejarah nasional yang lebih berfokus pada peran partai politik dan aktor militer (CAVR, 2005). Peran mereka sering dianggap sebagai bagian dari masa lalu yang tidak relevan dengan konsep negara modern.

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tanpa keterlibatan para *liurai*, banyak komunitas lokal mungkin akan mengalami kehancuran akibat ketidakstabilan politik.

7.4. Penutupan Masa Post-Kolonial dan Awal Pendudukan Indonesia

1. Runtuhnya Struktur Kolonial Portugis dan Kekosongan Institusional

Akhir dari masa post-kolonial Portugis di Timor-Leste ditandai oleh runtuhnya struktur pemerintahan kolonial, meningkatnya konflik antar faksi politik domestik, serta kekosongan kekuasaan yang menyebabkan krisis kedaulatan nasional. Seiring dengan Revolusi Bunga di Portugal pada tahun 1974 yang menggulingkan rezim Estado Novo, pemerintah kolonial di Timor-Leste kehilangan arah dan dukungan dari pusat. Proses dekolonisasi yang seharusnya terencana menjadi tergesa-gesa dan tidak tuntas.

Dalam periode 1974–1975, Timor-Leste mengalami transisi yang rapuh, dengan berbagai faksi politik seperti FRETILIN, UDT, dan APODETI berlomba mengisi kekosongan kekuasaan dalam suasana ketidakpastian yang tinggi (Jolliffe, 1978). Perbedaan ideologi dan kepentingan eksternal menyebabkan perpecahan dan bentrokan bersenjata di antara kelompok-kelompok ini. Negara baru belum sempat dikonsolidasikan ketika intervensi militer dari Indonesia dimulai.

2. Invasi Militer Indonesia dan Krisis Kedaulatan

Pada 28 November 1975, FRETILIN memproklamasikan kemerdekaan Timor-Leste secara sepihak. Namun, hanya berselang beberapa hari kemudian, pada 7 Desember 1975, Indonesia melancarkan Operasi Seroja, yaitu invasi militer besar-besaran ke wilayah tersebut. Invasi ini menandai berakhirnya masa post-kolonial yang singkat dan memulai era pendudukan Indonesia yang berlangsung hampir seperempat abad.

Klaim integrasi ke Indonesia dilakukan atas dasar surat permintaan dari APODETI serta melalui tekanan diplomatik terhadap komunitas internasional, yang saat itu enggan terlibat secara langsung dalam persoalan dekolonisasi Timor (Taylor, 1999). Situasi ini mencerminkan kegagalan sistem kolonial Portugis dalam mempersiapkan transisi kelembagaan yang berdaulat dan demokratis, serta kegagalan komunitas internasional dalam menjamin proses dekolonisasi yang sah.

Pendudukan ini mengawali fase baru dalam sejarah Timor-Leste, yakni era represi militer, konflik bersenjata, dan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas.

3. Nasib *Liurai* dan Struktur Adat

Dalam konteks sosial-politik lokal, posisi para *liurai* menghadapi tekanan yang luar biasa. Seiring perubahan geopolitik dan dominasi kekuasaan militer Indonesia, beberapa *liurai* terpaksa menyesuaikan diri dengan tatanan administratif baru yang terpusat dan dikendalikan militer, sementara yang lain berusaha mempertahankan legitimasi sosial melalui jalur adat.

Struktur kekuasaan adat yang sebelumnya memainkan peran penting dalam kehidupan komunitas menjadi terpinggirkan atau direduksi secara formal. Sistem

negara modern yang dibangun Indonesia kerap menekan atau memarginalkan institusi adat karena dianggap tidak kompatibel dengan struktur birokrasi yang diinginkan.

Meskipun tidak semua *liurai* bersikap seragam, banyak dari mereka tetap mempertahankan peran sebagai penjaga identitas komunitas dan warisan budaya di tengah represi negara. Beberapa bahkan terlibat secara diam-diam dalam jaringan perlawanan atau memfasilitasi aktivitas perlindungan sosial melalui mekanisme adat dan spiritual (CAVR, 2005).

Dalam situasi krisis ini, keberadaan *liurai* kembali menunjukkan fungsinya sebagai penjaga keberlangsungan komunitas dalam kerangka adat dan nilai-nilai lokal yang tetap hidup, meskipun di bawah tekanan militeristik yang intensif.

4. Simbolisasi Krisis Nasional dan Kompleksitas Geopolitik

Transisi dari masa post-kolonial ke era pendudukan Indonesia menjadi simbol kegagalan sistem kolonial dalam mempersiapkan proses kemerdekaan yang berdaulat. Intervensi Indonesia juga memperlihatkan dinamika geopolitik global di tengah Perang Dingin dan perebutan pengaruh di kawasan Asia Tenggara.

Keterlibatan Indonesia mencerminkan kepentingan strategis untuk mencegah berkembangnya negara kecil yang dianggap rentan terhadap komunisme. Di sisi lain, absennya dukungan internasional yang konsisten terhadap hak penentuan nasib sendiri rakyat Timor-Leste memperparah penderitaan mereka selama lebih dari dua dekade.

Liurai dan komunitas adat bukan hanya saksi, tetapi juga aktor sosial penting yang bertahan dan berkontribusi terhadap kelangsungan identitas serta martabat kolektif Timor-Leste dalam salah satu periode tergelap sejarah modernnya.

7.5. Penutup

Bab ini menegaskan bahwa masa post-kolonial Portugis di Timor-Leste bukan sekadar fase transisi administratif yang pasif, melainkan sebuah periode krisis struktural yang mendalam, menyangkut identitas nasional, legitimasi politik, dan perebutan kedaulatan di tengah kekosongan institusional. Ketidakstabilan internal, yang ditandai oleh fragmentasi elite politik dan kerapuhan struktur negara yang baru tumbuh, berpadu dengan intervensi geopolitik eksternal, mempercepat berakhirnya momen kemerdekaan yang nyaris diraih.

Dalam konteks tersebut, peran para *liurai* menjadi semakin penting sebagai jangkar stabilitas sosial di tengah runtuhnya sistem kolonial dan belum terbentuknya sistem negara modern. Para *liurai* tidak hanya menjalankan fungsi adat dan spiritual, tetapi juga mengambil peran politik dan sosial yang bersifat strategis, baik dalam menengahi konflik, memelihara hukum adat, maupun menjaga kohesi komunitas. Ketika institusi formal gagal memberikan perlindungan dan arah, sistem adat yang dipimpin oleh para *liurai* menjadi sumber daya sosial-politik yang mempertahankan integritas lokal.

Dengan demikian, peran tradisional tidak dapat dikesampingkan dalam narasi sejarah post-kolonial Timor-Leste. Para *liurai* tidak hanya bertahan dalam kerangka historis, tetapi juga menjadi aktor kontemporer yang berkontribusi pada kesinambungan kultural dan ketahanan sosial. Bab ini menjadi jembatan menuju bagian berikutnya: masa pendudukan Indonesia dan konsekuensi politik, sosial, serta kultural yang ditimbulkannya—sebuah babak baru yang menghadirkan tantangan politik, sosial, dan kultural yang tak kalah kompleks.

BAGIAN III: PENJAJAHAN INDONESIA

BAB 8: INVASI DAN PENDUDUKAN MILITER INDONESIA (1975–1999)

8.1. Pendahuluan

Invasi militer Indonesia ke Timor-Leste pada 7 Desember 1975 menjadi titik balik yang paling dramatis dan menentukan dalam sejarah modern bangsa ini. Dilancarkan melalui *Operasi Seroja*, invasi tersebut menandai berakhirnya masa transisi post-kolonial Portugis yang rapuh dan mengawali era pendudukan militer yang berlangsung selama hampir 24 tahun. Justifikasi resmi Indonesia atas intervensi ini berkisar pada narasi menjaga stabilitas, mencegah penyebaran komunisme di Asia Tenggara, serta mengintegrasikan Timor-Leste ke dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia (Taylor, 1999; Robinson, 2003).

Namun, dalam praktiknya, pendudukan ini dilakukan melalui pendekatan militeristik yang keras, yang berdampak luas terhadap tatanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Timor-Leste. Pendekatan represif tersebut menghasilkan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, perubahan mendalam dalam struktur sosial lokal, serta marginalisasi lembaga-lembaga adat yang sebelumnya menjadi pilar kohesi komunitas (CAVR, 2005).

Dalam konteks ini, aktor tradisional seperti para *liurai* mengalami tekanan yang besar: di satu sisi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dan bekerja sama dengan struktur militer Indonesia untuk mempertahankan eksistensi sosial mereka; di sisi lain, mereka menghadapi tantangan untuk menjaga kredibilitas moral di hadapan komunitas yang mengalami penderitaan kolektif akibat pendudukan. Pendudukan militer juga menciptakan tatanan politik dan administratif baru yang seringkali bertabrakan

dengan sistem tradisional lokal. Meskipun struktur formal *liurai* secara administratif dihapuskan dan diposisikan sebagai bagian dari masa lalu "tradisional," pengaruh mereka tidak sepenuhnya terhapus. Dalam banyak kasus, para *liurai* tetap memainkan peran informal penting sebagai mediator komunitas, pelindung nilai-nilai adat, dan simbol identitas budaya di tengah tekanan politik yang represif.

Dengan demikian, pembahasan mengenai invasi dan pendudukan Indonesia atas Timor-Leste tidak hanya penting dari sudut pandang geopolitik, tetapi juga krusial untuk memahami dinamika lokal antara kekuasaan militer dan struktur sosial adat. Bab ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pendudukan militer Indonesia dari perspektif struktural dan lokal, dengan fokus pada proses militerisasi wilayah, dampaknya terhadap masyarakat adat, posisi para *liurai* dalam sistem pemerintahan baru, serta bentuk-bentuk resistensi yang muncul—baik yang terorganisir melalui gerakan perlawanan bersenjata maupun yang terselubung dalam praktik budaya dan spiritualitas lokal.

8.2. Alasan Politik dan Strategis Invasi Indonesia

Invasi militer Indonesia ke Timor-Leste pada tahun 1975 merupakan bagian dari strategi geopolitik Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, berakar dalam dinamika Perang Dingin, dan bertujuan mempertahankan stabilitas internal negara. Keputusan ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor domestik, regional, dan internasional, serta didukung oleh kalkulasi politik terhadap perubahan situasi global. Subbagian ini membahas secara sistematis lima dimensi utama yang melatarbelakangi invasi: ketakutan terhadap komunisme, kepentingan geopolitik, dukungan negara-negara Barat, krisis internal Timor-Leste, dan konsekuensi internasional.

1. Ketakutan terhadap Komunisme dan Stabilitas Nasional

Pemerintah Indonesia memandang kemunculan *Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente* (FRETILIN) sebagai ancaman serius terhadap integritas nasional. FRETILIN diidentifikasi sebagai organisasi dengan kecenderungan ideologi kiri, yang dalam konteks pasca-tragedi 1965 menjadi simbol bahaya kebangkitan komunisme di Nusantara (Taylor, 1999). Kekhawatiran utama adalah bahwa terbentuknya negara sosialis di dekat Nusa Tenggara Timur dapat mendorong gelombang separatisme baru di daerah-daerah rawan seperti Aceh, Papua, dan Maluku (Nevins, 2005). Oleh karena itu, invasi dianggap sebagai langkah preventif untuk menjaga kohesi nasional dan mencegah ancaman ideologis eksternal.

2. Kepentingan Geopolitik dan Ekspansi Regional

Secara strategis, Pulau Timor memiliki posisi geografis yang vital. Penguasaan atas Timor-Leste memperkuat pengaruh Indonesia di kawasan selatan Nusantara dan membuka akses terhadap sumber daya alam, khususnya cadangan minyak dan gas di Laut Timor (Fernandes, 2011). Dalam kerangka ekspansi regional, penguasaan ini dipandang sebagai bagian dari upaya memperkokoh posisi Indonesia sebagai negara utama di Asia Tenggara, sekaligus mengimbangi pengaruh asing di kawasan.

3. Dukungan Diam-Diam dari Negara-Negara Barat

Keputusan invasi Indonesia tidak lepas dari dukungan tidak langsung negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Australia. Dokumen yang kemudian dideklasifikasi menunjukkan bahwa Presiden Gerald Ford dan Menteri Luar Negeri Henry Kissinger, saat kunjungan ke Jakarta pada 6 Desember 1975, telah diberitahu tentang rencana invasi ini, dan memberikan persetujuan implisit dengan syarat bahwa operasi dilaksanakan setelah keberangkatan mereka (Simpson, 2004). Australia juga memilih

pendekatan pragmatis untuk menjaga stabilitas kawasan dan mengamankan akses ke cadangan minyak dan gas di Timor Gap (Fernandes, 2011). Dukungan diam-diam ini memperkuat keyakinan pemerintah Indonesia bahwa tindakan militer mereka tidak akan menghadapi konsekuensi diplomatik yang berat.

4. Krisis Politik Internal Timor-Leste dan Manuver Integrasi

Situasi domestik di Timor-Leste menjelang invasi menunjukkan ketidakstabilan akut. Konflik antar partai seperti *União Democrática Timorense* (UDT), FRETILIN, dan *Associação Popular Democrática Timorense* (APODETI) menyebabkan perang saudara singkat yang melemahkan kapasitas negara yang baru lahir (Taylor, 1999). Pemerintah Indonesia memanfaatkan kekosongan kekuasaan ini dengan membentuk Dewan Petisi Rakyat, yang kemudian "mengajukan" permohonan integrasi ke Indonesia. Deklarasi ini, yang dijadikan dasar hukum aneksasi pada Juli 1976, cacat secara hukum internasional karena tidak dilakukan melalui referendum bebas dan adil sebagaimana diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations General Assembly, 1975; UNGA Resolutions 384 & 389, 1975–1976).

5. Konsekuensi dan Reaksi Internasional

Pada tahap awal, respons internasional terhadap invasi Indonesia relatif lemah, sebagian besar karena pertimbangan geopolitik dan kepentingan ekonomi negara-negara Barat. Namun, laporan pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste mulai membangkitkan perhatian global pada akhir 1970-an dan awal 1980-an (Robinson, 2003; CAVR, 2005). Organisasi non-pemerintah, Gereja Katolik, dan diaspora Timor-Leste memainkan peran penting dalam mengangkat isu ini ke panggung internasional. Tragedi Santa Cruz pada tahun 1991 menjadi katalisator penting yang memperkuat solidaritas global terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Timor-Leste.

Invasi Indonesia ke Timor-Leste tahun 1975 mencerminkan kebijakan ekspansionis yang berlandaskan pada kepentingan strategis, keamanan nasional, dan kalkulasi geopolitik regional. Dukungan diam-diam dari negara-negara Barat dan krisis politik internal di Timor-Leste memberikan peluang bagi Indonesia untuk melakukan aneksasi, meskipun langkah ini bertentangan dengan prinsip hukum internasional mengenai hak penentuan nasib sendiri. Pendekatan kekerasan tersebut tidak hanya menimbulkan krisis kemanusiaan, tetapi juga memperkuat perlawanan rakyat Timor-Leste dan menggugah solidaritas internasional yang akhirnya berkontribusi terhadap kemerdekaan Timor-Leste.

8.3. Dinamika Kekuasaan Lokal: *Liurai* dalam Rezim Pendudukan

Pendudukan militer Indonesia atas Timor-Leste (1975–1999) membawa transformasi besar terhadap struktur kekuasaan lokal, termasuk posisi dan fungsi para *liurai* sebagai pemimpin adat. Rezim militer Indonesia, khususnya di bawah Orde Baru Presiden Soeharto, menyadari pentingnya kontrol sosial di tingkat akar rumput. Karena itu, mereka mengintegrasikan struktur kekuasaan lokal ke dalam sistem administratif negara melalui strategi kooptasi terhadap para *liurai* (*Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação de Timor-Leste* [CAVR], 2005).

1. Kooptasi *Liurai* oleh Struktur Administratif Militer

Dalam upaya mengonsolidasikan kekuasaan di Timor-Leste, banyak *liurai* diangkat ke dalam jabatan formal seperti kepala desa, camat, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat kabupaten, dengan tugas utama mendukung stabilitas administratif dan sosial di bawah pengawasan ketat aparat militer. Struktur kekuasaan ini diintegrasikan ke dalam komando teritorial militer, melalui jaringan Kodim (Komando Distrik Militer) dan Koramil (Komando Rayon Militer). Kebijakan ini

bertujuan untuk mengurangi potensi resistensi lokal sekaligus menciptakan legitimasi terhadap pendudukan (CAVR, 2005).

Namun, posisi para *liurai* dalam sistem ini seringkali ambigu, menghadirkan dilema moral dan politik yang sulit dihindari. Mereka dituntut menunjukkan loyalitas kepada pemerintah Indonesia, tetapi juga harus mempertahankan otoritas tradisional di komunitasnya. Sebagian *liurai* menolak berkolaborasi dan memilih bergabung dengan gerakan perlawanan seperti Falintil, sedangkan lainnya mencoba beradaptasi demi melindungi komunitas mereka dari kekerasan militer yang brutal.

2. Ambiguitas Peran: Kolaborasi atau Resistensi Terselubung

Penempatan para *liurai* dalam jabatan administratif memunculkan ambiguitas dalam persepsi masyarakat lokal. Beberapa *liurai* dipandang sebagai kolaborator karena kedekatan mereka dengan aparat pendudukan, sementara yang lain menggunakan posisi formal tersebut sebagai tameng untuk melindungi komunitas dari kekerasan militer (Traube, 1986). Dalam praktiknya, sejumlah *liurai* mencoba mempertahankan ruang otonomi sosial-kultural mereka, termasuk dalam mengelola upacara adat, penyelesaian sengketa tradisional, serta pemeliharaan norma hukum adat (*tara bandu*).

Di daerah-daerah tertentu, *liurai* juga diam-diam mendukung gerakan perlawanan dengan menyediakan tempat perlindungan, logistik, dan jaringan komunikasi bagi pejuang kemerdekaan seperti Falintil (Cristalis & Scott, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa institusi *liurai* tetap memiliki fleksibilitas adaptif, meskipun ditekan atau dimarjinalkan secara formal oleh kekuasaan militer.

3. Marginalisasi Otoritas Tradisional

Meskipun terdapat upaya kooptasi, kekuasaan tradisional *liurai* secara umum mengalami erosi selama masa pendudukan. Pendekatan sentralistik militer menggeser pusat kekuasaan dari struktur adat ke birokrasi negara dan aparat keamanan. Para komandan militer di tingkat distrik dan kecamatan memegang kontrol penuh atas keputusan politik dan sosial, sementara *liurai* direduksi menjadi simbol administratif semata, kehilangan otonomi moral dan sosial yang sebelumnya mereka miliki dalam sistem adat (Robinson, 2003).

Selain itu, kebijakan resettlement (pemindahan paksa penduduk ke kampung-kampung terpusat) dan operasi militer skala besar menghancurkan banyak komunitas adat tradisional, melemahkan basis sosial dari kekuasaan *liurai*.

4. Fragmentasi Sosial dan Polarisasi Komunitas

Pendudukan militer juga memperparah fragmentasi sosial di tingkat lokal. Komunitas sering kali terbelah dalam menyikapi posisi para *liurai*: ada yang melihat mereka sebagai pelindung komunitas, tetapi ada pula yang memandang mereka sebagai pengkhianat. Polarisasi ini memperumit rekonsiliasi pasca-pendudukan dan meninggalkan luka sosial mendalam dalam struktur komunitas adat di Timor-Leste (CAVR, 2005).

Batas antara kolaborasi dan resistensi menjadi kabur. Beberapa *liurai* tetap mempertahankan fungsi sosial-budaya secara informal di luar struktur negara, menunjukkan ketahanan institusi tradisional di tengah tekanan kolonialisme militer modern (Traube, 1986).

5. Ketahanan dan Adaptasi *Liurai* di Tengah Rezim Represif

Meskipun menghadapi tekanan besar, banyak *liurai* mempertahankan peran penting mereka sebagai penjaga identitas kultural. Mereka menggunakan simbolisme adat, ritual keagamaan, serta jaringan sosial tradisional untuk mempertahankan kesinambungan komunitas. Bahkan dalam kondisi represif, *liurai* menunjukkan ketahanan dan kreativitas dalam bermanuver di tengah perubahan rezim politik (Cristalis & Scott, 2005).

Dalam banyak kasus, strategi diplomasi kultural yang dilakukan secara terselubung oleh para *liurai* mampu melindungi komunitas mereka dari kekerasan dan represi militer yang brutal.

Pendudukan Indonesia membawa transformasi fundamental terhadap peran para *liurai*, dari pemimpin semi-otonom menjadi bagian dari struktur administratif negara pendudukan. Namun, dinamika yang muncul memperlihatkan bahwa *liurai* bukan sekadar elit feodal pasif, melainkan aktor sosial-politik dinamis yang mampu beradaptasi terhadap tekanan eksternal. Melalui strategi kooptasi, resistensi pasif, dan perlindungan terhadap komunitas adat, para *liurai* mempertahankan relevansi sosial dan kultural mereka, sekaligus memperkaya pemahaman kita tentang ketahanan kekuasaan tradisional dalam menghadapi kolonialisme militer modern.

8.4. Kekerasan Terstruktur dan Resistensi Sosial

Pendudukan Indonesia atas Timor-Leste sejak tahun 1975 hingga 1999 berlangsung dengan latar kekerasan terstruktur, represi politik, dan disrupsi sistem sosial-budaya lokal. Pendekatan militeristik yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru menciptakan perubahan drastis dalam struktur kehidupan masyarakat Timor-Leste, sekaligus

memunculkan bentuk-bentuk perlawanan yang kreatif dan gigih di berbagai lini sosial, budaya, dan politik.

1. Kekerasan Sistematis dan Disrupsi Sosial

Sejak awal pendudukan, operasi militer Indonesia di Timor-Leste ditandai oleh pelanggaran hak asasi manusia secara luas, termasuk pembunuhan massal, pemindahan paksa penduduk, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, serta pemaksaan kerja paksa (CAVR, 2005). Struktur sosial tradisional, yang sebelumnya diatur oleh hukum adat dan dipimpin oleh para *liurai*, mengalami tekanan berat akibat politik kontrol total yang diterapkan melalui sistem komando teritorial militer. Struktur militer mendominasi kehidupan sosial-politik, menekan kebebasan berekspresi, dan menghancurkan jaringan sosial tradisional (Robinson, 2003).

Dalam kehidupan sehari-hari, upaya "normalisasi" dilakukan secara sistematis, membentuk struktur administratif baru seperti RT, RW, dan kepala desa, yang melemahkan otoritas kultural lokal dan menyebabkan keterputusan generasi dari warisan nilai-nilai adat (Therik, 2004). Pendudukan ini membawa perubahan signifikan terhadap struktur sosial dan budaya masyarakat lokal, di mana proyek integrasi nasional melalui strategi militerisasi wilayah sering kali bertentangan dengan nilai-nilai tradisional yang telah hidup selama berabad-abad di kalangan rakyat Timor.

2. Peminggiran Bahasa dan Budaya Lokal

Sebagai bagian dari kebijakan integrasi nasional, bahasa Indonesia diwajibkan di semua sektor pendidikan dan pemerintahan, sementara bahasa-bahasa lokal seperti Tetun, Mambae, atau Fataluku dipinggirkan (Fox, 2003). Bahasa, sebagai wahana utama transmisi budaya, menjadi target utama homogenisasi, mempercepat keterputusan antargenerasi dalam mentransfer nilai, norma, dan identitas lokal.

Ritual adat, yang menjadi pengikat komunitas dan ekspresi identitas kolektif, dikontrol ketat atau bahkan dilarang jika dianggap bertentangan dengan ideologi negara. Hal ini merusak hubungan spiritual masyarakat dengan leluhur dan tanah adat, serta memperlemah transmisi budaya lisan dan praktik sosial yang selama ini menjadi fondasi identitas masyarakat Timor-Leste (Therik, 2004).

3. Transformasi Tanah dan Struktur Ekonomi

Program transmigrasi dan pembangunan infrastruktur strategis, seperti pangkalan militer dan jalan raya, mengakibatkan perubahan besar dalam pola penggunaan tanah. Banyak komunitas adat kehilangan akses ke tanah leluhur mereka akibat relokasi paksa atau eksploitasi negara atas sumber daya alam (Nevins, 2005). Dalam banyak kasus, tanah leluhur yang sebelumnya sakral dijadikan pangkalan militer atau ladang eksploitasi ekonomi, yang secara simbolik dan praktis merusak hubungan masyarakat dengan tanah dan leluhur mereka.

Gangguan terhadap hubungan ekologis dan spiritual ini menghilangkan salah satu pilar utama identitas dan keberlangsungan hidup masyarakat Timor-Leste.

4. Perlawanan Gerilya dan Dukungan Komunitas Adat

Di tengah represi struktural tersebut, perlawanan rakyat Timor-Leste berkembang dalam berbagai bentuk. Falintil (Forças Armadas da Libertação Nacional de Timor-Leste) melakukan gerilya bersenjata di daerah pegunungan dan pedalaman, dengan dukungan moral dan logistik dari komunitas-komunitas lokal, termasuk sebagian *liurai* dan pemimpin adat (Cristalis & Scott, 2005).

Para *liurai* yang tetap setia pada nilai-nilai adat memainkan peran penting dalam menyembunyikan pejuang, menyediakan jaringan logistik, serta menjaga moral komunitas. Dukungan ini tidak hanya bersifat pragmatis, melainkan juga simbolik—menegaskan kesinambungan identitas nasional di tengah proyek homogenisasi negara pendudukan.

Meskipun tidak semua *liurai* terlibat langsung dalam politik, peran simbolis mereka sebagai penjaga identitas dan memori kolektif tetap relevan dalam mempertahankan semangat perlawanan.

5. Resistensi Kultural dan Diplomasi Sosial

Selain perlawanan bersenjata, bentuk-bentuk resistensi non-militer juga berkembang. Lagu-lagu rakyat, ritual keluarga tersembunyi, dan simbol-simbol adat disematkan dalam praktik keagamaan untuk mempertahankan identitas Timor-Leste secara terselubung. Budaya lokal bertahan melalui cara-cara cerdas dan tersembunyi, membuktikan bahwa meskipun struktur sosial tradisional dihancurkan secara sistematis, makna budaya tetap hidup dalam bentuk resistensi kultural.

Di kawasan urban, jaringan mahasiswa, organisasi gereja Katolik, dan diaspora Timor-Leste di luar negeri berperan penting dalam memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri di arena diplomatik internasional (Robinson, 2003).

Pendudukan Indonesia di Timor-Leste menampilkan wajah kekuasaan militer yang represif dan upaya sistematis untuk membongkar struktur sosial dan budaya lokal. Namun, di balik kekerasan terstruktur tersebut, masyarakat Timor-Leste membangun bentuk-bentuk resistensi kreatif, baik melalui perjuangan bersenjata maupun melalui pelestarian budaya dan jaringan sosial adat. Peran *liurai*, meskipun mengalami

transformasi dan keterbatasan, tetap relevan dalam mempertahankan kesinambungan komunitas dan semangat kemerdekaan di tengah pendudukan brutal.

8.5. Penutup

Invasi dan pendudukan Indonesia atas Timor-Leste bukan sekadar sebuah konflik politik dan militer, melainkan merupakan intervensi sistemik yang merusak struktur sosial, budaya, dan spiritual masyarakat lokal. Dengan mengedepankan pendekatan militeristik dan birokratisasi kekuasaan, pemerintah Indonesia berusaha mengintegrasikan Timor-Leste ke dalam kerangka negara nasional Indonesia, namun dengan mengorbankan hak-hak adat, identitas kultural, dan sistem sosial tradisional yang telah terbangun selama berabad-abad (CAVR, 2005; Robinson, 2003).

Dalam konteks ini, para *liurai* sebagai aktor lokal mengalami tekanan luar biasa untuk menyesuaikan diri dengan sistem kolonial baru yang berbasis militerisme dan birokrasi. Sebagian dari mereka berhasil menavigasi sistem baru dengan bertransformasi ke dalam struktur administratif negara pendudukan, sementara sebagian lainnya mengalami delegitimasi, kehilangan pengaruh sosial, atau memilih jalur perlawanan, baik secara terbuka maupun dalam bentuk resistensi kultural (Cristalis & Scott, 2005; Therik, 2004). Ada pula yang tetap mempertahankan otonomi kultural melalui strategi adaptasi tersembunyi.

Periode pendudukan ini menjadi bab penting dalam memahami kompleksitas hubungan antara tradisi dan negara modern, serta bagaimana komunitas lokal mempertahankan otonomi budaya dalam situasi penjajahan. Meskipun menghadapi represi sistematis, komunitas-komunitas lokal Timor-Leste menunjukkan daya tahan budaya dan politik yang luar biasa melalui jaringan solidaritas adat, praktik ritual tersembunyi, serta gerakan perlawanan bersenjata dan diplomatik (Fox, 2003; Nevins, 2005).

Warisan pengalaman ini membentuk landasan penting bagi proyek rekonstruksi nasional pasca-kemerdekaan pada tahun 2002. Pelestarian identitas lokal, reintegrasi sistem adat dalam kehidupan sosial-politik, serta perjuangan untuk keadilan historis menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan bangsa Timor-Leste menuju rekonsiliasi dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, memahami dinamika peran *liurai* dalam konteks pendudukan Indonesia memberikan wawasan penting tentang ketahanan identitas kolektif, perjuangan hak kedaulatan, serta upaya membangun fondasi bagi negara yang merdeka dan berdaulat.

BAB 9: PERLAWANAN LOKAL DAN INTERNASIONAL TERHADAP PENDUDUKAN INDONESIA (1975–1999)

9.1. Pendahuluan

Pendudukan Indonesia atas Timor-Leste sejak invasi militer tahun 1975 bukan hanya merupakan fase dominasi politik dan militer, melainkan juga memicu resistensi rakyat Timor dalam berbagai bentuk. Perlawanan ini berlangsung di dua medan utama: di dalam negeri melalui gerakan bawah tanah, perjuangan bersenjata, dan jaringan sosial berbasis adat; serta di arena internasional melalui diplomasi diaspora, solidaritas masyarakat sipil global, dan advokasi hak asasi manusia di forum-forum dunia (CAVR, 2005; Taylor, 1999).

Pendudukan militer Indonesia atas Timor-Leste menjadi salah satu babak paling kelam dalam sejarah perjuangan bangsa Timor. Namun, dari reruntuhan konflik dan dominasi represif tersebut, muncul pula kisah heroik tentang ketahanan kolektif, resistensi rakyat, serta upaya diplomatik tanpa henti di panggung internasional. Perlawanan terhadap penjajahan Indonesia bukan semata-mata konflik militer, melainkan perjuangan multidimensional yang mencakup aspek sosial, budaya, spiritual, dan politik.

Di tingkat lokal, struktur adat dan komunitas-komunitas tradisional memainkan peran fundamental dalam menopang ketahanan sosial dan logistik gerakan perlawanan. Para *liurai*, tetua adat, dan jaringan komunitas tetap menjadi sumber identitas kolektif dan kekuatan spiritual yang memperkuat perjuangan nasional di tengah represi militer (Therik, 2004; Cristalis & Scott, 2005). Mereka tidak hanya menyediakan dukungan moral dan material bagi gerakan-gerakan seperti Falintil, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya di tengah upaya asimilasi paksa. Gerakan perlawanan lokal tidak dapat dipisahkan dari kekuatan adat yang hidup dalam struktur

masyarakat Timor, menjadikan peran komunitas suku sebagai landasan spiritual dan logistik penting bagi perjuangan bersenjata maupun sipil.

Sementara itu, di tingkat global, perjuangan Timor-Leste mendapatkan dukungan moral dan politik dari berbagai organisasi internasional, gereja Katolik, komunitas hak asasi manusia, serta jaringan solidaritas global. Kampanye diplomasi yang dijalankan oleh diaspora Timor-Leste berhasil membangkitkan perhatian dunia terhadap situasi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, serta membangun tekanan internasional yang konsisten terhadap pemerintah Indonesia (Nevins, 2005; Robinson, 2003). Dukungan internasional ini memberikan legitimasi moral dan politik terhadap perjuangan rakyat Timor-Leste di panggung global.

Bab ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis dinamika perlawanan lokal—baik bersenjata maupun sipil—dan internasional terhadap pendudukan Indonesia di Timor-Leste. Fokus pembahasan meliputi bentuk-bentuk gerakan bawah tanah, resistensi adat dan budaya, diplomasi internasional, serta sinergi antara kekuatan lokal dan global dalam mempertahankan identitas, hak, dan kedaulatan bangsa Timor, yang berpuncak pada momen bersejarah referendum kemerdekaan tahun 1999.

9.2. Gerakan Perlawanan Bersenjata: Falintil dan Peran Rakyat

Perlawanan bersenjata terhadap pendudukan Indonesia di Timor-Leste merupakan salah satu bentuk resistensi utama yang menopang perjuangan panjang rakyat Timor terhadap kekuasaan asing. Gerakan ini dipelopori oleh *Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor-Leste* (Falintil), yang bermula sebagai sayap militer dari *Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente* (FRETILIN) dan kemudian berkembang menjadi kekuatan nasional non-partisan (Cristalis, 2002; CAVR, 2005). Perlawanan ini membentuk sebuah gerakan kompleks yang mengintegrasikan kekuatan militer, struktur sosial tradisional, partisipasi komunitas, serta ketahanan ideologis.

1. Pembentukan dan Evolusi Falintil

Falintil didirikan pada tahun 1975 sebagai bagian integral dari proyek nasionalisme Timor-Leste untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja dideklarasikan dari upaya aneksasi Indonesia (Cristalis, 2002). Pada awalnya, Falintil bertugas melindungi struktur pemerintahan transisional FRETILIN. Namun, setelah invasi Indonesia pada Desember 1975 dan perkembangan politik selanjutnya, khususnya di bawah kepemimpinan Xanana Gusmão, Falintil bertransformasi menjadi kekuatan nasional non-partisan. Transformasi ini melampaui batasan ideologis partai politik, mengadopsi pendekatan inklusif untuk membangun persatuan nasional dalam perjuangan melawan pendudukan asing (CAVR, 2005).

2. Strategi Gerilya dan Dukungan Komunitas Lokal

Menghadapi kekuatan militer Indonesia yang jauh lebih unggul dalam jumlah dan perlengkapan, Falintil mengembangkan strategi perang gerilya klasik. Mereka beroperasi dari daerah pegunungan yang sulit dijangkau, memanfaatkan medan geografis yang terjal, serta menjalin ikatan erat dengan komunitas-komunitas lokal (CAVR, 2005). Dukungan masyarakat desa menjadi faktor kunci dalam menopang logistik, mobilisasi, perlindungan, serta intelijen. Para penduduk menyediakan makanan, tempat persembunyian, dan informasi tentang pergerakan tentara Indonesia, sekaligus mempertahankan jaringan komunikasi rahasia di tengah embargo dan operasi militer besar-besaran seperti "Operasi Seroja."

3. Keterlibatan *Liurai* dan Struktur Sosial Tradisional

Peran para *liurai* dan pemimpin adat sangat penting dalam memperkuat jaringan perlawanan. Mereka bukan hanya simbol otoritas tradisional, tetapi juga aktor aktif

yang menyediakan logistik, perlindungan, serta saluran komunikasi antara pasukan gerilya dan masyarakat sipil (Traube, 1986). Dukungan spiritual dan sosial dari para *liurai* memperkuat legitimasi moral perlawanan, menegaskan kesinambungan antara nilai-nilai tradisional dengan aspirasi nasional modern.

Dalam beberapa kasus, *liurai* secara langsung menyembunyikan anggota Falintil, mengamankan mereka melalui struktur adat, atau menyalurkan bantuan dalam kerangka ritual dan keagamaan, memperlihatkan integrasi mendalam antara perjuangan militer dan struktur budaya Timor.

4. Partisipasi Perempuan dalam Jaringan Perlawanan

Perempuan memainkan peran aktif dan menentukan dalam gerakan perlawanan, melampaui peran domestik tradisional. Mereka bertindak sebagai kurir rahasia, pengatur komunikasi antar unit gerilya, penyedia logistik, dan penggalang jaringan solidaritas lokal (Cristalis, 2002). Dalam konteks tekanan militer dan sosial, perempuan mempertahankan vitalitas jaringan komunitas, menjaga jalur distribusi makanan, obat-obatan, serta informasi penting, memperlihatkan bahwa perlawanan Timor-Leste bersifat holistik dan mengintegrasikan seluruh lapisan masyarakat.

5. Ketahanan Moral dan Ideologis Rakyat Timor-Leste

Lebih dari sekadar perlawanan bersenjata, perjuangan di Timor-Leste merupakan manifestasi dari ketahanan moral dan ideologis rakyat terhadap dominasi asing (Nevins, 2005). Identitas nasional yang terbentuk melalui narasi penderitaan, kolonialisme, dan aspirasi kemerdekaan menjadi sumber kekuatan batin yang menopang perjuangan melintasi dekade pendudukan brutal. Nilai-nilai seperti solidaritas komunitas, penghormatan terhadap martabat manusia, serta spiritualitas kolektif menjadi fondasi ideologis perlawanan.

Ketahanan ini bukan hanya hasil dari kecakapan militer, tetapi juga berakar pada identitas kolektif, ingatan sejarah bersama, dan harapan akan kemerdekaan sejati. Dengan mempertahankan nilai-nilai ini, masyarakat Timor-Leste mampu bertahan dari penyiksaan, kampanye pemusnahan, dan pengabaian internasional, hingga akhirnya meraih kemerdekaan penuh pada 1999.

9.3. Perlawanan Sipil dan Budaya

Selain melalui perlawanan bersenjata, masyarakat Timor-Leste mengembangkan bentuk resistensi sipil dan budaya yang menjadi instrumen penting dalam mempertahankan identitas nasional selama pendudukan Indonesia. Perlawanan ini tidak selalu tampak dalam bentuk konfrontasi langsung, melainkan tersembunyi dalam jaringan pendidikan alternatif, praktik keagamaan, seni, dan penguatan budaya lokal. Upaya ini membuktikan bahwa perjuangan Timor tidak semata-mata berlandaskan kekuatan militer, tetapi juga kekuatan spiritual, moral, dan kultural.

1. Peran Gereja Katolik dalam Perlindungan dan Resistensi

Gereja Katolik memainkan peran sentral dalam perjuangan sipil di Timor-Leste. Di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh seperti Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo, gereja berfungsi sebagai pelindung nilai-nilai kemanusiaan dan martabat rakyat Timor (Belo, 1997). Dalam konteks represi militer yang ketat, gereja menjadi satu-satunya lembaga yang relatif memiliki otonomi moral dan dapat menyuarakan ketidakadilan. Khotbah-khotbah secara implisit maupun eksplisit menyampaikan pesan resistensi terhadap kekerasan dan dominasi asing, menjadikan gereja sebagai pusat spiritual sekaligus ruang diplomasi informal. Umat Katolik, yang mayoritas adalah masyarakat adat, menjadikan gereja sebagai ruang perlindungan budaya dan nilai kemanusiaan.

Dalam banyak kasus, katedral dan biara berfungsi sebagai tempat perlindungan, pendidikan, bahkan media diplomasi informal. Para imam menyisipkan pesan-pesan resistensi dalam homili, meskipun tindakan tersebut sering kali mempertaruhkan keselamatan mereka.

2. Pendidikan Alternatif dan Kesadaran Identitas

Di tengah kebijakan asimilasi budaya dan pendidikan formal berbasis ideologi Orde Baru, kelompok-kelompok lokal, termasuk para imam dan aktivis muda, mengembangkan pendidikan alternatif secara bawah tanah (Cristalis, 2002). Pengajaran tentang sejarah Timor, penggunaan bahasa lokal seperti Tetun, dan diskusi tentang hak asasi manusia diajarkan secara sembunyi-sembunyi di rumah-rumah dan gereja-gereja kecil. Pendidikan ini memainkan peran vital dalam membangkitkan kesadaran nasionalisme generasi muda yang kelak menjadi penggerak utama dalam proses kemerdekaan. Pendidikan alternatif ini juga menjadi medium penguatan identitas kolektif Timor di tengah tekanan kebijakan nasionalisasi Indonesia.

3. Pelestarian Budaya sebagai Bentuk Resistensi

Ritual adat, tarian tradisional, musik rakyat, dan penggunaan bahasa daerah dipertahankan secara sembunyi-sembunyi sebagai bentuk perlawanan terhadap proyek integrasi nasional Indonesia (Fox, 2003). Bahkan di bawah pengawasan ketat, masyarakat tetap mempertahankan ekspresi budaya sebagai sarana memperkuat identitas kolektif dan memperingati narasi sejarah lokal. Praktik-praktik budaya tradisional ini, termasuk cerita lisan dan simbol-simbol adat, menjadi ruang artikulasi resistensi kultural yang sukar diberangus oleh kekuatan senjata. Dengan demikian, budaya tradisional Timor berfungsi tidak hanya sebagai warisan leluhur, tetapi juga sebagai senjata politik dalam mempertahankan eksistensi bangsa.

4. Seni dan Sastra sebagai Medium Perlawanan

Seni rupa, musik, dan sastra menjadi alat penting dalam perjuangan sipil. Lukisan mural, lukisan tangan, puisi, dan lagu-lagu perjuangan berisi kritik sosial dan semangat perlawanan tersebar secara diam-diam di komunitas (Cristalis, 2002). Simbol-simbol nasional, kisah pahlawan lokal, dan gambaran penderitaan rakyat digunakan untuk mempertahankan narasi perjuangan di ruang-ruang yang tidak dapat dijangkau langsung oleh sensor negara. Kegiatan ini sering diorganisasi secara sembunyi di rumah-rumah atau di dalam komunitas-komunitas keagamaan.

Seni menjadi sarana untuk merekam dan menyuarakan penderitaan, harapan, serta semangat nasionalisme rakyat Timor, yang kelak memainkan peran penting dalam membangun ingatan kolektif perjuangan bangsa.

5. Mobilisasi Sosial dan Jaringan Solidaritas

Perlawanan sipil di dalam negeri terhubung dengan upaya-upaya diplomasi internasional yang dilakukan oleh diaspora Timor-Leste (Nevins, 2005). Solidaritas yang dibangun antara jaringan aktivis dalam negeri, Gereja Katolik, dan komunitas internasional memperkuat legitimasi perjuangan kemerdekaan Timor-Leste di panggung global. Tokoh-tokoh seperti Monsinyur Carlos Filipe Ximenes Belo dan José Ramos-Horta berperan penting dalam menyuarakan penderitaan rakyat Timor ke dunia luar melalui forum-forum internasional, sebuah upaya yang kemudian diakui dengan dianugerahkannya Hadiah Nobel Perdamaian tahun 1996.

Mobilisasi ini memperluas jaringan diplomatik, mengokohkan solidaritas transnasional, dan mempercepat delegitimasi pendudukan Indonesia di mata dunia. Dengan demikian, kekuatan sipil dan budaya menjadi landasan moral, spiritual, dan

politik yang memperkuat perjuangan bersenjata serta mempersiapkan fondasi kokoh bagi tercapainya kemerdekaan Timor-Leste.

9.4. Solidaritas Internasional: Diplomasi dan Opini Global

Selama masa pendudukan Indonesia di Timor-Leste (1975–1999), perjuangan rakyat Timor tidak hanya berfokus pada resistensi lokal, tetapi juga diperluas melalui jalur diplomasi internasional dan solidaritas global. Gerakan ini menjadi pilar penting dalam memperluas legitimasi perjuangan Timor di mata dunia internasional dan memperkuat tuntutan atas hak kemerdekaan Timor-Leste.

1. Peran Diaspora Timor-Leste dan Diplomasi Rakyat

Diaspora Timor di negara-negara seperti Australia, Portugal, Mozambik, Irlandia, Jepang, Brasil, dan Amerika Serikat memainkan peran strategis dalam memperjuangkan pengakuan internasional atas penderitaan rakyat Timor (Taylor, 1999). Melalui pendekatan diplomasi rakyat (grassroots diplomacy), mereka membangun jaringan solidaritas luas dengan organisasi masyarakat sipil, jurnalis, dan lembaga hak asasi manusia. Tokoh-tokoh seperti José Ramos-Horta menjadi ujung tombak diplomasi global, membawa isu pelanggaran HAM berat, pembantaian, dan penindasan budaya ke forum-forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa.

Selain Ramos-Horta, Uskup Dili Carlos Filipe Ximenes Belo juga memainkan peran sentral dalam mengangkat penderitaan rakyat Timor di kancah internasional, menjadikan mereka duta informal dalam memperjuangkan kemerdekaan tidak dengan senjata, melainkan melalui pidato, surat, dan advokasi di jalan-jalan kota besar dunia.

2. Dampak Tragedi Santa Cruz terhadap Opini Global

Salah satu titik balik utama dalam perubahan opini dunia adalah peristiwa Pembantaian Santa Cruz pada 12 November 1991. Dalam insiden ini, lebih dari 250 demonstran damai dibunuh oleh tentara Indonesia di pemakaman Santa Cruz, Dili (Kohen, 1999). Rekaman visual tragedi tersebut, yang disebarluaskan oleh media internasional, membangkitkan kemarahan global dan mengubah Timor-Leste dari isu pinggiran menjadi sorotan dunia. Insiden ini memperkuat tekanan diplomatik terhadap pemerintah Indonesia dan mempercepat konsolidasi solidaritas internasional dengan rakyat Timor.

3. Peran Organisasi Non-Pemerintah dan Aktivis HAM

Organisasi non-pemerintah (LSM), aktivis hak asasi manusia, dan jaringan gereja global memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Timor-Leste. Mereka mengorganisir kampanye advokasi, melobi pemerintah nasional mereka, serta mendesak lembaga internasional untuk mengutuk pelanggaran HAM di Timor-Leste (Nevins, 2005). Dukungan dari Amnesty International, Human Rights Watch, dan berbagai jaringan solidaritas global memberikan legitimasi moral dan politik yang krusial bagi perjuangan kemerdekaan Timor.

4. Sikap PBB dan Legitimasi Hukum Internasional

Selama lebih dari dua dekade, PBB tidak pernah secara resmi mengakui integrasi Timor-Leste ke dalam Republik Indonesia. Resolusi Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB, seperti Resolusi 384 dan 389 (1975–1976), secara konsisten menegaskan hak rakyat Timor-Leste untuk menentukan nasib sendiri dan menyerukan penyelesaian damai melalui proses demokratis (United Nations General Assembly Resolutions 384 & 389, 1975–1976). Keberlanjutan posisi hukum ini memberikan dasar

kuat bagi perjuangan diplomatik Timor-Leste serta menjaga isu ini tetap hidup dalam agenda internasional.

5. Kemenangan Diplomasi dan Referendum 1999

Diplomasi global yang cermat dan jaringan solidaritas internasional akhirnya membuahkan hasil pada tahun 1999. Setelah tekanan internasional yang intens dan perubahan politik di Indonesia pasca-Orde Baru, rakyat Timor-Leste diberikan kesempatan untuk mengikuti referendum yang diawasi oleh PBB. Hasil referendum menunjukkan mayoritas mutlak memilih kemerdekaan, mengakhiri era pendudukan Indonesia dan membuka jalan bagi kemerdekaan penuh Timor-Leste (CAVR, 2005).

Dengan demikian, perjuangan rakyat Timor-Leste membuktikan bahwa kemerdekaan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan senjata, tetapi juga oleh kekuatan moral, solidaritas global, dan keteguhan diplomasi internasional.

9.5. Kesimpulan

Perlawanan terhadap pendudukan Indonesia di Timor-Leste merupakan sebuah dinamika kompleks yang melibatkan sinergi antara kekuatan lokal dan jaringan solidaritas internasional. Gerakan ini dipimpin tidak hanya oleh aktor formal seperti Falintil dan pemimpin politik nasionalis, tetapi juga oleh pemuda, komunitas adat, dan para *liurai* yang berfungsi sebagai penjaga identitas sosial dan kultural masyarakat Timor.

Di tingkat lokal, kekuatan tradisional dan jaringan komunitas berbasis adat membentuk fondasi ketahanan sosial dalam menghadapi represi militer dan upaya asimilasi budaya. Para *liurai* dan pemimpin adat memainkan peran penting dalam

mempertahankan nilai-nilai kolektif, melindungi komunitas dari kekerasan, serta mendukung perjuangan gerilya maupun perlawanan sipil.

Sementara itu, di tingkat internasional, solidaritas global yang dikonsolidasikan melalui diplomasi diaspora dan dukungan dari jaringan hak asasi manusia membawa isu Timor-Leste ke panggung dunia. Diaspora Timor di negara-negara seperti Australia, Portugal, Mozambik, dan Amerika Serikat memainkan peran strategis dalam memperjuangkan pengakuan internasional atas penderitaan rakyat Timor, memperluas jaringan solidaritas melalui kampanye advokasi dan diplomasi rakyat (Taylor, 1999). Peristiwa-peristiwa kunci, seperti Pembantaian Santa Cruz pada 12 November 1991, memperkuat legitimasi perjuangan rakyat Timor dan meningkatkan tekanan diplomatik terhadap rezim Orde Baru di Indonesia (Kohen, 1999).

Perlawanan ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada kekuatan senjata, tetapi juga pada ketahanan budaya, mobilisasi komunitas lokal, diplomasi internasional yang efektif, serta solidaritas lintas batas. Puncaknya adalah pelaksanaan referendum tahun 1999 yang diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana rakyat Timor-Leste secara sah memilih untuk merdeka, mengakhiri era pendudukan dan membuka babak baru dalam sejarah bangsa (CAVR, 2005; United Nations General Assembly Resolutions 384 & 389, 1975–1976).

Dengan demikian, perjuangan rakyat Timor-Leste membuktikan bahwa kemerdekaan suatu bangsa tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kekuatan moral, ketahanan budaya, perjuangan sipil, serta solidaritas global yang konsisten dan terorganisir.

BAB 10: REFERENDUM, TRANSISI, DAN KEKERASAN 1999

10.1. Pendahuluan

Tahun 1999 menjadi tonggak sejarah yang monumental bagi rakyat Timor-Leste dalam perjuangan panjang mereka untuk meraih kemerdekaan. Setelah lebih dari dua dekade berada di bawah pendudukan militer Indonesia yang represif, masyarakat Timor-Leste akhirnya diberikan kesempatan untuk menentukan nasib sendiri melalui sebuah referendum yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Mission in East Timor [UNAMET], 1999). Referendum ini merupakan hasil dari kombinasi tekanan komunitas internasional, perubahan politik domestik di Indonesia pasca runtuhnya rezim Orde Baru, serta ketahanan moral dan fisik dari perjuangan rakyat Timor-Leste (Robinson, 2003; CAVR, 2005).

Proses menuju referendum bukanlah suatu kebetulan, melainkan konsekuensi dari perjuangan internal yang konsisten dan perjuangan eksternal yang terorganisir. Tekanan diplomatik internasional, diplomasi diaspora, perubahan konstelasi politik global, serta kekuatan moral rakyat Timor menjadi fondasi utama terciptanya momentum ini. Namun, proses ini tidak berjalan damai. Masa transisi menuju kemerdekaan diwarnai oleh kekerasan sistematis, pelanggaran hak asasi manusia, penghancuran infrastruktur secara besar-besaran, dan gelombang pengungsian massal akibat aksi brutal milisi pro-integrasi yang didukung oleh elemen militer Indonesia (Kohen, 1999).

Kekerasan pasca-referendum bertujuan untuk menggagalkan kehendak rakyat yang telah secara sah memilih kemerdekaan melalui mekanisme demokratis. Infrastruktur publik hancur, ribuan warga menjadi korban kekerasan, dan banyak yang terpaksa mengungsi ke wilayah lain, termasuk ke Timor Barat.

Bab ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik, sosial, dan kemanusiaan selama proses referendum dan transisi, dengan menyoroti bagaimana kekuatan tekad rakyat Timor-Leste serta solidaritas komunitas internasional memainkan peran krusial dalam menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hak penentuan nasib sendiri. Pembahasan akan mencakup konteks politik menuju referendum, jalannya pemungutan suara, eskalasi kekerasan pasca hasil referendum, serta intervensi komunitas internasional melalui Operasi INTERFET sebagai langkah awal menuju pemulihan dan kemerdekaan formal Timor-Leste.

Dengan demikian, refleksi atas peristiwa tahun 1999 menjadi penting untuk memahami tidak hanya perjalanan rakyat Timor-Leste menuju kemerdekaan, tetapi juga tantangan besar dalam membangun kembali sebuah bangsa dari reruntuhan kolonialisme, pendudukan, dan kekerasan struktural. Referendum 1999 tidak hanya menjadi ekspresi kehendak rakyat, tetapi juga mencerminkan pertarungan antara prinsip demokrasi internasional dan praktik kekuasaan eksploitatif.

10.2. Proses Menuju Referendum dan Peran Internasional

1. Konteks Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru

Setelah jatuhnya rezim otoriter Soeharto pada Mei 1998, Indonesia memasuki periode reformasi politik yang membuka ruang bagi perubahan kebijakan dalam berbagai sektor, termasuk dalam isu Timor-Leste. Presiden B. J. Habibie, sebagai bagian dari upaya mereformasi citra Indonesia di mata internasional, secara mengejutkan menawarkan opsi otonomi khusus kepada Timor-Leste pada Januari 1999, dengan alternatif bahwa jika ditolak, Indonesia akan melepaskan wilayah tersebut (Simpson, 2004; Robinson, 2003). Keputusan ini diambil tanpa konsultasi luas di kalangan militer atau DPR Indonesia, dan lebih sebagai respons terhadap tekanan diplomatik dari

Portugal, Australia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta keinginan memperbaiki hubungan dengan negara-negara Barat (Nevins, 2005).

Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk pihak militer Indonesia dan komunitas internasional. Tekanan dari masyarakat sipil global dan organisasi HAM juga berkontribusi besar dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas selama proses tersebut.

2. Pembentukan dan Mandat UNAMET

Sebagai tindak lanjut atas tawaran Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk United Nations Mission in East Timor (UNAMET) melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1246 pada Juni 1999 (United Nations, 1999). UNAMET diberikan mandat untuk memfasilitasi pemungutan suara yang bebas dan adil, termasuk melakukan registrasi pemilih, pendidikan politik kepada masyarakat, serta mengawasi logistik dan keamanan teknis pemilu.

UNAMET diberi tugas menyelenggarakan dan mengawasi referendum secara independen dan adil, namun tidak memiliki kewenangan militer penuh untuk menjaga keamanan, yang tetap berada di tangan aparat Indonesia. Kondisi ini nantinya terbukti menjadi salah satu tantangan utama dalam masa transisi menuju kemerdekaan.

3. Pelaksanaan Referendum: Partisipasi Rakyat dan Hasil

Referendum diselenggarakan pada 30 Agustus 1999, dengan dua opsi: menerima otonomi khusus dalam kerangka Republik Indonesia atau menolak dan memilih kemerdekaan. Partisipasi rakyat Timor-Leste sangat tinggi; sekitar 98,6% dari pemilih terdaftar memberikan suara (CAVR, 2005). Hasilnya menunjukkan bahwa 78,5% rakyat

memilih menolak otonomi, yang berarti mendukung kemerdekaan penuh (UNAMET, 1999).

Proses pemungutan suara berlangsung relatif damai pada hari-H, meskipun intimidasi dari milisi pro-integrasi telah marak selama masa kampanye. Kemenangan besar ini menjadi simbol kuat dari aspirasi rakyat Timor-Leste untuk menentukan nasib mereka sendiri.

4. Peran Aktif Komunitas Internasional

Peran komunitas internasional dalam proses ini tidak terbatas pada aspek teknis penyelenggaraan referendum. Negara-negara seperti Portugal, Australia, Amerika Serikat, Irlandia, serta berbagai negara Skandinavia aktif mendukung dengan menyediakan bantuan logistik, pemantau internasional, dan dukungan diplomatik (Taylor, 1999; Kohen, 1999). Selain itu, tekanan diplomatik terhadap Indonesia untuk menghormati hasil referendum sangat kuat, baik di forum-forum global maupun melalui jaringan solidaritas masyarakat sipil.

Dukungan komunitas internasional, termasuk kehadiran organisasi non-pemerintah dan kampanye global, menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa proses referendum berjalan dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

5. Signifikansi Referendum dalam Sejarah Penentuan Nasib Sendiri

Referendum Timor-Leste tahun 1999 merupakan salah satu contoh paling menonjol dalam sejarah modern tentang keberhasilan proses penentuan nasib sendiri di bawah pengawasan internasional. Referendum ini tidak hanya mengakhiri 24 tahun pendudukan Indonesia, tetapi juga menjadi tonggak utama dalam perjalanan Timor-Leste menuju pembentukan negara berdaulat.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kekuatan rakyat, diperkuat oleh solidaritas internasional, mampu menandingi dominasi kekuasaan militeristik yang telah berlangsung puluhan tahun (Nevins, 2005; CAVR, 2005). Referendum ini menjadi momen krusial yang menegaskan pentingnya mobilisasi kolektif dan dukungan global dalam mewujudkan hak penentuan nasib sendiri.

10.3. Kekerasan Pasca-Referendum dan Krisis Kemanusiaan

1. Latar Belakang Kekerasan Terorganisir

Keputusan rakyat Timor-Leste untuk memilih kemerdekaan melalui referendum yang diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 30 Agustus 1999 segera disambut dengan aksi balasan brutal dari milisi pro-integrasi seperti Aitarak, Mahidi, dan Besi Merah Putih. Kelompok-kelompok ini dilatih, dipersenjatai, dan diarahkan oleh elemen dalam militer Indonesia (Tentara Nasional Indonesia, TNI) (CAVR, 2005; Robinson, 2003). Laporan dari Human Rights Watch (2000) dan Amnesty International (1999) mengonfirmasi bahwa kekerasan pasca-referendum merupakan tindakan terorganisir dan sistematis yang bertujuan menghancurkan hasil pemungutan suara dan menciptakan ketidakstabilan, sehingga kemerdekaan Timor-Leste tampak sebagai sumber kekacauan.

Strategi yang diterapkan dikenal sebagai "bumi hangus" (scorched earth policy), dengan tujuan menghancurkan aspek sosial, politik, dan ekonomi Timor-Leste secara menyeluruh. Milisi-milisi bersenjata ini melancarkan gelombang serangan terhadap warga sipil, aktivis kemerdekaan, jurnalis lokal, dan infrastruktur vital negara.

2. Pola Kekerasan: Pembantaian, Pengungsian, dan Kehancuran Infrastruktur

Kekerasan sistematis tersebut menyebabkan lebih dari 1.400 kematian, memaksa lebih dari 300.000 orang mengungsi ke Timor Barat dan daerah lainnya, serta menghancurkan sekitar 70% infrastruktur publik, termasuk sekolah, gereja, rumah sakit, dan fasilitas pemerintahan (Amnesty International, 1999; Human Rights Watch, 2000). Strategi teror yang diterapkan tidak hanya menyasar pendukung kemerdekaan, tetapi juga penduduk sipil secara luas melalui pembunuhan massal, pemerkosaan, pembakaran rumah, dan penculikan.

Data dari Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor (CAVR, 2005) menunjukkan bahwa kekerasan ini tidak bersifat spontan, melainkan merupakan bagian dari rencana terstruktur untuk menghukum rakyat Timor-Leste atas pilihan politik mereka.

3. Tanggung Jawab Militer dan Pelanggaran HAM Berat

Laporan resmi United Nations International Commission of Inquiry on East Timor (2000) memperlihatkan bukti kuat keterlibatan aktif dan dukungan logistik dari unsur militer Indonesia dalam kekerasan tersebut. Struktur komando yang terungkap menunjukkan adanya koordinasi erat antara pimpinan milisi lokal dan pejabat militer di tingkat distrik dan provinsi.

Pelanggaran yang terjadi diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, mencakup pembunuhan terorganisir, deportasi massal, penyiksaan, penghilangan paksa, dan kekerasan berbasis gender (United Nations, 2000). Fakta-fakta ini menjadi dasar untuk desakan pembentukan pengadilan internasional ad hoc, meskipun hingga kini, implementasi keadilan internasional untuk kejahatan tersebut masih kontroversial dan belum sepenuhnya terealisasi.

4. Krisis Kemanusiaan dan Respons Internasional

Kekerasan yang meluas menimbulkan krisis kemanusiaan besar di Timor-Leste. Ribuan keluarga tercerai-berai, kehidupan ekonomi hancur, dan ribuan anak-anak serta perempuan mengalami trauma psikologis mendalam (CAVR, 2005; Nevins, 2005). Kondisi pengungsian diperburuk oleh kelangkaan makanan, air bersih, dan layanan kesehatan dasar.

Tekanan komunitas internasional akhirnya mendorong pembentukan pasukan penjaga perdamaian multinasional di bawah komando INTERFET (International Force for East Timor) pimpinan Australia pada akhir September 1999. INTERFET berhasil menghentikan eskalasi kekerasan besar, meskipun kerusakan yang ditinggalkan sudah meluas dan dalam.

5. Ketahanan Komunitas Lokal dan Peran *Liurai*

Di tengah kehancuran, solidaritas komunitas lokal muncul sebagai benteng terakhir pertahanan sosial. Para *liurai*, tokoh adat, dan pemimpin komunitas gereja memainkan peran penting dalam melindungi rakyat, memediasi konflik lokal, serta menjaga keberlanjutan tradisi budaya dan nilai-nilai komunal di tengah krisis (Cristalis & Scott, 2005; Traube, 2007).

Mereka menjaga nilai-nilai kolektif Timor di tengah kehancuran, membuktikan bahwa kekuatan budaya lokal berfungsi sebagai fondasi penting dalam proses rekonstruksi sosial pasca-konflik. Ketahanan komunitas ini menjadi bukti nyata bahwa meskipun menghadapi kekerasan sistematis dan kehancuran massal, identitas sosial dan solidaritas rakyat Timor-Leste tetap teguh.

10.4. Intervensi Internasional dan Masa Transisi ke Kemerdekaan

1. Respons Internasional terhadap Krisis

Meningkatnya kekerasan setelah hasil referendum kemerdekaan di Timor-Leste pada 1999 menarik perhatian serius komunitas internasional. Rekaman visual kekerasan dan laporan pelanggaran hak asasi manusia dari organisasi-organisasi seperti Amnesty International dan Human Rights Watch meningkatkan tekanan terhadap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk bertindak (United Nations, 1999). Pada 15 September 1999, Dewan Keamanan mengadopsi Resolusi 1264 yang membentuk pasukan multinasional INTERFET (International Force for East Timor) di bawah pimpinan Australia, dengan mandat untuk memulihkan keamanan, melindungi personel PBB dan lembaga kemanusiaan, serta mendukung distribusi bantuan (United Nations, 1999).

2. Operasi INTERFET dan Pemulihan Stabilitas

Pasukan INTERFET mulai mendarat di Dili pada 20 September 1999. Mereka segera menghentikan kekerasan, melindungi penduduk sipil, serta mengamankan wilayah-wilayah yang hancur akibat serangan milisi pro-integrasi (Cotton, 2001). Kehadiran INTERFET berhasil menstabilkan situasi dalam hitungan minggu, memungkinkan akses bantuan kemanusiaan, dan membuka jalan bagi pembentukan otoritas sipil sementara. Dukungan logistik dan militer dari negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, Thailand, dan Portugal menjadi faktor penting dalam stabilisasi wilayah.

3. Pembentukan UNTAET dan Pemerintahan Transisi

Setelah stabilitas awal tercapai, PBB membentuk United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) melalui Resolusi 1272 pada 25 Oktober 1999.

UNTAET diberikan wewenang administratif penuh untuk mengelola pemerintahan, membangun kembali institusi, memperbaiki infrastruktur, serta mempersiapkan rakyat Timor-Leste untuk menjalani kehidupan sebagai negara berdaulat (United Nations, 1999). Tugas UNTAET meliputi rekonstruksi sosial-ekonomi, reformasi hukum, rehabilitasi politik, dan pendidikan kewarganegaraan, menghadapi tantangan berat setelah kehancuran sistemik akibat konflik.

4. Partisipasi Lokal dalam Rekonstruksi dan Reintegrasi

Kontribusi rakyat Timor-Leste dalam masa transisi ini sangat signifikan. Para *liurai*, tokoh adat, pemuda, perempuan, gereja Katolik, dan komunitas intelektual lokal memainkan peran vital dalam mendamaikan komunitas yang terpecah, menyusun tatanan sosial baru, dan mendukung program-program rekonstruksi yang diinisiasi UNTAET (Cristalis & Scott, 2005). Partisipasi aktif dalam forum-forum konsultatif dan penyusunan konstitusi mencerminkan aspirasi masyarakat untuk membangun negara berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal.

Masyarakat lokal tidak hanya berkontribusi secara formal melalui lembaga-lembaga transisi, tetapi juga secara informal dengan membangun kembali komunitas, memperkuat solidaritas sosial, dan merevitalisasi institusi-institusi adat sebagai bagian integral dari rekonsiliasi nasional.

5. Deklarasi Kemerdekaan dan Warisan Intervensi

Masa transisi akhirnya berpuncak pada 20 Mei 2002, ketika Timor-Leste secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai negara berdaulat. Upacara bersejarah ini dihadiri oleh pemimpin dunia dan disambut dengan antusiasme besar oleh rakyat Timor-Leste, yang telah menanggung beban panjang kolonialisme dan pendudukan

militer. Intervensi internasional melalui INTERFET dan UNTAET menciptakan kondisi minimum bagi lahirnya Republik Demokratik Timor-Leste (Kingsbury, 2009).

Namun, meskipun kemerdekaan tercapai, tantangan besar tetap ada, termasuk warisan trauma kekerasan, kemiskinan struktural, dan kebutuhan untuk membangun kapasitas nasional dalam berbagai sektor. Keberhasilan transisi ini tidak hanya berkat intervensi internasional, tetapi juga resistensi gigih rakyat Timor-Leste dan kekuatan budaya lokal yang mampu bertahan dan bangkit dari reruntuhan sejarah.

10.5. Kesimpulan

Referendum tahun 1999 di Timor-Leste menjadi puncak dari perjalanan panjang rakyat dalam memperjuangkan hak mereka atas penentuan nasib sendiri setelah mengalami penjajahan, pendudukan, dan penindasan struktural selama berabad-abad.

Keberhasilan rakyat Timor-Leste dalam memilih kemerdekaan secara demokratis membuktikan kekuatan tekad kolektif yang didukung oleh perjuangan lokal, solidaritas internasional, serta dukungan moral dari komunitas global terhadap prinsip hak asasi manusia dan kedaulatan bangsa.

Namun, keberhasilan ini tidak tercapai tanpa harga yang mahal. Kekerasan pasca-referendum yang sistematis dan brutal mengungkapkan perlawanan terakhir dari aktor-aktor yang ingin mempertahankan dominasi kolonial atas Timor-Leste.

Ribuan korban jiwa, kehancuran infrastruktur, dan trauma sosial menjadi warisan pahit dari transisi menuju kebebasan. Intervensi internasional melalui pasukan INTERFET dan pengelolaan masa transisi oleh UNTAET menjadi elemen krusial dalam mengakhiri kekerasan dan membangun fondasi negara baru.

Peran rakyat Timor, termasuk para *liurai*, pemimpin adat, komunitas gereja, pemuda, dan perempuan, terbukti sangat vital dalam mempertahankan nilai-nilai budaya lokal di tengah kekacauan dan dalam membangun kembali masyarakat selama masa transisi.

Keterlibatan mereka dalam proses rekonsiliasi dan pembangunan nasional memperkuat narasi bahwa kemerdekaan Timor-Leste bukan semata produk intervensi eksternal, melainkan hasil perjuangan kolektif yang berakar kuat dalam identitas dan martabat rakyatnya sendiri.

Dengan deklarasi kemerdekaan pada 20 Mei 2002, Timor-Leste memasuki babak baru sebagai sebuah negara merdeka. Namun, warisan kolonialisme, pendudukan militer, kekerasan politik, dan trauma sosial tetap menjadi tantangan besar yang harus dihadapi dalam proses nation-building.

Pembelajaran dari fase transisi ini menunjukkan pentingnya kombinasi kekuatan lokal dan dukungan internasional dalam membangun negara yang demokratis, berkeadilan sosial, dan berdaulat penuh.

Bab ini menegaskan bahwa kemerdekaan bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang rakyat Timor-Leste dalam mewujudkan cita-cita kemanusiaan, keadilan, dan martabat bangsa di tengah dunia modern.

BAGIAN IV: ZAMAN KEMERDEKAAN TIMOR-LESTE

BAB 11: PROKLAMASI DAN PENGAKUAN INTERNASIONAL ATAS KEMERDEKAAN TIMOR-LESTE

11.1. Pendahuluan

Proklamasi kemerdekaan Timor-Leste pada tanggal 20 Mei 2002 menandai tonggak sejarah monumental dan puncak perjuangan panjang rakyat Timor dalam menuntut hak atas penentuan nasib sendiri setelah melewati tiga fase kolonialisme dan pendudukan: penjajahan Portugis selama hampir lima abad, pendudukan militer Indonesia selama hampir seperempat abad, dan masa transisi administrasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kemerdekaan ini menjadi bukti kekuatan ketahanan budaya, spiritualitas, dan solidaritas nasional yang dibangun selama berabad-abad melalui berbagai bentuk perlawanan, baik lokal maupun internasional. Proses menuju kemerdekaan penuh bukanlah hasil dari satu momen atau satu generasi, melainkan akumulasi perjuangan multidimensional yang melibatkan rakyat biasa, tokoh adat (*liurai*), pemimpin agama, pejuang gerilya, hingga diplomat internasional. Dinamika ini memperlihatkan bahwa pembentukan negara Timor-Leste berakar kuat pada identitas budaya lokal yang tetap bertahan meskipun mengalami tekanan dari kekuasaan eksternal yang beragam.

Proklamasi kemerdekaan tidak hanya menjadi simbol politik, tetapi juga sebuah momen rekonstruksi sosial dan kultural, di mana simbol-simbol adat dan nilai-nilai kolektif diintegrasikan ke dalam pembentukan identitas nasional baru. Pengakuan resmi dari komunitas internasional terhadap Republik Demokratik Timor-Leste memperkuat legitimasi negara ini dalam sistem internasional dan membuka jalan bagi integrasi penuh ke dalam komunitas global.

Bab ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis proses proklamasi kemerdekaan, dinamika perayaan nasional, respons komunitas internasional terhadap kemerdekaan Timor-Leste, serta peran berkelanjutan nilai-nilai adat dan sistem sosial tradisional dalam memperkuat fondasi negara yang baru lahir. Fokus diberikan pada bagaimana kemerdekaan dirayakan sebagai wujud kemenangan kolektif dan bagaimana sistem tradisional seperti *liurai* tetap memainkan peran strategis dalam membingkai ulang identitas bangsa merdeka. Penekanan khusus juga diberikan pada pentingnya kontinuitas budaya dan legitimasi lokal dalam memperkokoh identitas negara merdeka Timor-Leste di tengah arsitektur politik modern.

11.2. Proklamasi Resmi 20 Mei 2002

1. Latar Belakang Transisi dari Administrasi UNTAET

Setelah referendum 1999 dan periode kekacauan yang diikuti oleh intervensi serta rekonstruksi internasional, Timor-Leste ditempatkan di bawah administrasi United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET), yang bertugas membangun fondasi pemerintahan nasional dan menyiapkan kemerdekaan penuh (United Nations, 2002). UNTAET memiliki mandat penuh dalam pemerintahan, pembangunan kelembagaan, serta persiapan penyelenggaraan pemerintahan nasional demokratis. Setelah hampir dua setengah tahun masa transisi, kondisi sosial-politik dinilai cukup stabil untuk dilaksanakan proklamasi kemerdekaan penuh.

2. Pelaksanaan Upacara Proklamasi di Tasi Tolu

Tanggal 20 Mei 2002 menjadi momen bersejarah ketika Timor-Leste secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya sebagai sebuah republik berdaulat. Upacara proklamasi digelar di Tasi Tolu, Dili, sebuah lokasi yang memiliki nilai spiritual penting

bagi masyarakat Timor (CAVR, 2005). Lebih dari 100.000 rakyat Timor-Leste dan delegasi dari lebih 90 negara serta organisasi internasional menghadiri acara ini. Upacara tersebut memadukan simbolisme budaya lokal, ritual adat, doa lintas agama, tarian tradisional, serta pengibaran bendera nasional secara sah untuk pertama kalinya.

Proklamasi ini bukan sekadar tindakan administratif, melainkan sebuah puncak dari perjuangan panjang rakyat Timor untuk menentukan nasib sendiri, menandai berakhirnya masa kolonial Portugis, pendudukan militer Indonesia, dan administrasi PBB.

3. Pelantikan Presiden dan Simbolisme Kepemimpinan Nasional

Dalam upacara tersebut, Kay Rala Xanana Gusmão dilantik sebagai Presiden pertama Republik Demokratik Timor-Leste, menandai transisi kekuasaan dari UNTAET ke otoritas nasional (Gusmão, 2002). Pelantikan ini melambangkan kedaulatan penuh rakyat Timor atas nasib mereka sendiri. Kehadiran masyarakat adat, *liurai*, tokoh agama, pemuda, dan perempuan dalam prosesi tersebut mempertegas bahwa legitimasi kepemimpinan nasional berakar kuat pada kekuatan rakyat dan budaya lokal.

4. Pengesahan Konstitusi Nasional

Pada hari yang sama, Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste mulai berlaku secara resmi. Konstitusi ini disusun melalui proses partisipatif oleh Konstituante Nasional, yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pakar hukum (Constituição da República Democrática de Timor-Leste, 2002). Dokumen ini menegaskan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian integral dari identitas negara.

Konstitusi tersebut menandai integrasi nilai-nilai tradisional ke dalam kerangka hukum modern, mencerminkan semangat rakyat Timor-Leste dalam membangun negara berdasarkan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal.

5. Dimensi Budaya dan Moral Proklamasi

Proklamasi kemerdekaan Timor-Leste bukan hanya merupakan tindakan legal-formal, tetapi juga memiliki dimensi moral dan kultural yang dalam. Partisipasi para *liurai*, tokoh adat, kaum muda, perempuan, dan pemimpin agama dalam upacara ini menunjukkan bahwa kemerdekaan merupakan kemenangan kolektif seluruh elemen bangsa. Simbol-simbol budaya, ritual adat, spiritualitas tradisional, dan liturgi lintas agama yang diintegrasikan dalam prosesi memperlihatkan bahwa Timor-Leste memilih membangun negara modern tanpa meninggalkan akar identitas historis dan kulturalnya (Traube, 2007).

Momentum proklamasi memperlihatkan bagaimana sistem tradisional dan nilai-nilai kolektif tetap relevan dalam membingkai ulang identitas nasional di tengah arsitektur politik modern. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa fondasi negara baru tidak hanya bertumpu pada struktur politik formal, tetapi juga pada kekuatan budaya dan spiritual masyarakat Timor.

11.3. Pengakuan Internasional dan Keanggotaan Global

1. Penerimaan Diplomatik Segera Setelah Proklamasi

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 20 Mei 2002, Timor-Leste secara cepat menerima pengakuan resmi dari hampir seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Shoesmith, 2003). Negara-negara besar seperti Portugal, Australia,

Amerika Serikat, Brasil, Jepang, dan negara-negara anggota Uni Eropa secara eksplisit menyatakan dukungan penuh terhadap kedaulatan Timor-Leste. Negara-negara tetangga seperti Australia dan Indonesia juga segera menjalin hubungan diplomatik formal dengan pemerintahan baru. Proses pembentukan hubungan bilateral ini berlangsung dengan cepat, mencerminkan besarnya dukungan moral dan politik terhadap perjuangan rakyat Timor-Leste serta menegaskan penerimaan terhadap status hukum dan politik negara baru tersebut di dalam sistem internasional.

2. Keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Puncak dari pengakuan global terhadap kedaulatan Timor-Leste terjadi pada 27 September 2002, ketika negara tersebut secara resmi diterima sebagai anggota ke-191 PBB. Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, Presiden Xanana Gusmão menekankan komitmen Timor-Leste terhadap perdamaian internasional, hak asasi manusia, solidaritas global, serta pentingnya kerjasama multilateral (United Nations, 2002). Keanggotaan di PBB merupakan tonggak penting yang menegaskan legitimasi hukum internasional Timor-Leste, membuka akses terhadap bantuan pembangunan internasional, forum diplomatik, dan jaringan kerja multilateral yang krusial untuk negara yang baru pulih dari konflik.

3. Partisipasi dalam Komunitas Negara-Negara Berbahasa Portugis (CPLP)

Selain diterima di PBB, pada tahun yang sama Timor-Leste juga menjadi anggota penuh Komunitas Negara-Negara Berbahasa Portugis (CPLP), memperkuat kembali identitas linguistik dan historis yang telah terjalin selama masa kolonial (Cabral, 2003). Keanggotaan ini mencerminkan strategi diplomasi Timor-Leste untuk mempertahankan serta mengembangkan hubungan budaya, ekonomi, dan politik dengan dunia lusofon, sekaligus memperluas jangkauan diplomatiknya ke Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa.

4. Hubungan dengan ASEAN dan Kawasan Asia Tenggara

Dalam konteks hubungan kawasan, Timor-Leste membangun kemitraan erat dengan negara-negara anggota ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Meskipun belum menjadi anggota penuh pada tahap awal, Timor-Leste aktif berpartisipasi dalam berbagai forum regional, menandai komitmennya untuk menjadi bagian integral dari komunitas Asia Tenggara (Leach, 2017). Upaya ini menunjukkan keseimbangan strategis kebijakan luar negeri Timor-Leste antara ikatan sejarah dengan dunia berbahasa Portugis dan kedekatan geografis dengan Asia Tenggara, serta prinsip-prinsip universal diplomasi modern.

5. Makna Strategis Pengakuan Internasional

Pengakuan internasional terhadap Timor-Leste bukan hanya tindakan legalisasi formal, tetapi juga validasi moral terhadap perjuangan panjang rakyatnya untuk menentukan nasib sendiri, sebagaimana ditegaskan dalam Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional (Chesterman, 2002). Keberhasilan Timor-Leste dalam membangun jaringan diplomatik global dalam waktu singkat mencerminkan kekuatan perjuangan kolektif dan solidaritas internasional dalam mendukung proses dekolonisasi. Lebih lanjut, Timor-Leste juga mendapatkan dukungan dari berbagai organisasi internasional seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi Negara-Negara Frankofon sebagai pengamat, serta berbagai lembaga kemanusiaan dan pembangunan. Keseluruhan dinamika ini membuka ruang bagi Timor-Leste untuk aktif berpartisipasi dalam tata kelola global, memperjuangkan nilai-nilai perdamaian, keadilan, dan pembangunan berkelanjutan.

11.4. Peran *Liurai* dan Simbol Budaya dalam Kemerdekaan

1. Integrasi Tradisi dalam Proklamasi Kemerdekaan

Pada saat proklamasi kemerdekaan Timor-Leste di Tasi Tolu pada 20 Mei 2002, simbol-simbol budaya lokal dan representasi *liurai* (pemimpin adat tradisional) tampil menonjol dalam prosesi nasional (Leach, 2017). Bendera nasional dikibarkan oleh pemuda dari berbagai suku, diiringi nyanyian rakyat, tarian tradisional, serta kehadiran para *liurai* yang mengenakan pakaian adat, memperlihatkan bahwa kemerdekaan bukan hanya kemenangan politik, tetapi juga keberlanjutan nilai-nilai budaya yang berakar dalam masyarakat Timor.

2. Representasi *Liurai* sebagai Jembatan Sejarah

Kehadiran *liurai* dari berbagai daerah dalam prosesi kemerdekaan memiliki makna simbolik yang penting. Mereka mewakili kontinuitas antara era pra-kolonial, masa kolonial, masa perjuangan, hingga pembentukan negara modern (Traube, 1986). Dengan memberikan berkat adat dan sumpah budaya kepada republik yang baru, para *liurai* memperlihatkan bahwa struktur tradisional tetap relevan sebagai bagian dari konstruksi identitas nasional dan proses nation-building di Timor-Leste. Hal ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Timor-Leste bukan hanya hasil dari perjuangan militer dan diplomatik, tetapi juga dari daya tahan budaya lokal dan kekuatan nilai adat yang hidup di tengah penderitaan sejarah.

3. Simbolisme Budaya sebagai Fondasi Identitas Nasional

Dalam konteks proklamasi kemerdekaan, banyak *liurai* dari berbagai daerah berpartisipasi sebagai wakil otoritas adat. Upacara di Tasi Tolu diwarnai dengan ritual adat, tarian tradisional, serta persembahan simbol-simbol lokal seperti belak (medali

leluhur), surik (pedang tradisional), kaibauk (mahkota adat), tais (kain tenun), dan ritual uma lulik (rumah adat) (Hicks, 2004). Simbol-simbol ini tidak hanya ditampilkan sebagai ornamen budaya, tetapi dihidupkan sebagai pilar identitas nasional baru, menandakan bahwa Timor-Leste membangun negara-bangsa dengan merangkul narasi dan warisan lokal sebagai dasar nasionalisme.

4. Peran *Liurai* dalam Rekonsiliasi dan Rekonstruksi Sosial

Setelah kemerdekaan, peran para *liurai* tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga substantif dalam upaya rekonsiliasi sosial dan rekonstruksi nasional. Dengan otoritas moral dan budaya yang mereka miliki, para *liurai* memainkan peran sebagai agen perdamaian di daerah-daerah yang mengalami fragmentasi sosial akibat konflik internal selama masa perjuangan dan invasi Indonesia (Grenfell, 2009). Mereka memperkuat solidaritas, memfasilitasi rekonsiliasi, dan menjembatani hubungan antara komunitas adat dan pemerintahan nasional.

5. Ketahanan Budaya dalam Proses Pembangunan Nasional

Meskipun struktur pemerintahan modern Timor-Leste mengadopsi sistem republik demokratis, keberadaan dan peran *liurai* tetap diakui sebagai elemen penting dalam pembangunan identitas nasional. Pengakuan terhadap otoritas tradisional dan revitalisasi simbol budaya tradisional menandakan pendekatan pembangunan nasional yang kontekstual dan berakar pada realitas lokal (Shoesmith, 2003). Dalam hal ini, negara mengintegrasikan warisan sosial-budaya ke dalam kerangka pemerintahan modern, mengakui bahwa perjuangan kemerdekaan Timor-Leste adalah juga perjuangan mempertahankan identitas kolektif di tengah dinamika globalisasi.

Dengan demikian, keterlibatan aktif para *liurai* dan penghidupan kembali simbol budaya tradisional memperlihatkan bahwa proses kemerdekaan Timor-Leste bukan hanya merupakan kemenangan politik, tetapi juga keberhasilan mempertahankan dan menegaskan nilai-nilai lokal sebagai fondasi negara-bangsa yang inklusif, plural, dan berakar kuat.

11.5. Kesimpulan

Proklamasi kemerdekaan Timor-Leste pada 20 Mei 2002 merupakan puncak dari perjalanan panjang dan penuh pengorbanan rakyat Timor dalam memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri. Momentum ini tidak hanya menandai pembebasan dari dominasi kolonial dan pendudukan asing, tetapi juga menegaskan kembali kekuatan ketahanan budaya lokal yang menjadi fondasi perjuangan nasional.

Peran simbolik dan strategis para *liurai* serta pengintegrasian simbol-simbol budaya dalam proses proklamasi memperlihatkan bahwa pembentukan negara Timor-Leste tidak mengabaikan warisan tradisional, melainkan mengakui dan mengintegrasikannya ke dalam kerangka nasionalisme modern (Traube, 1986; Hicks, 2004).

Pengakuan internasional yang cepat dan luas terhadap kemerdekaan Timor-Leste, serta keanggotaan resminya di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi multilateral lainnya, memperkuat legitimasi kedaulatan baru ini dalam tatanan global (Leach, 2017; Shoesmith, 2003).

Dukungan komunitas internasional selama masa transisi menjadi faktor kunci dalam membantu negara ini membangun institusi-institusi dasar pemerintahan, hak asasi manusia, dan rekonsiliasi nasional. Kemerdekaan Timor-Leste menjadi bukti nyata

bahwa perjuangan kolektif berbasis komunitas, dipadukan dengan diplomasi internasional dan ketahanan budaya lokal, mampu menghasilkan pembebasan sejati.

Dalam proses ini, identitas nasional tidak dibangun dengan menghapus masa lalu, melainkan dengan merevitalisasi dan menghormati tradisi yang telah lama menopang masyarakat Timor-Leste.

Dengan demikian, kemerdekaan Timor-Leste pada tahun 2002 merupakan bukan sekadar keberhasilan politik, tetapi juga keberhasilan kultural dan moral yang menunjukkan bahwa akar tradisi lokal dapat hidup berdampingan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern dalam membangun sebuah negara-bangsa yang merdeka dan berdaulat.

BAB 12: REVITALISASI BUDAYA DAN ADAT DALAM NEGARA MODERN

12.1. Pendahuluan

Dalam fase pembangunan nasional pasca-kemerdekaan, Timor-Leste menghadapi tantangan mendasar: bagaimana membangun negara modern tanpa mengabaikan akar budaya dan sistem adat yang telah lama membentuk struktur sosial masyarakatnya. Revitalisasi budaya dan adat menjadi agenda strategis yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga fungsional dalam membangun legitimasi politik, memperkuat kohesi sosial, dan mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis komunitas (Trindade, 2008).

Setelah meraih kemerdekaan pada tahun 2002, Timor-Leste dihadapkan pada tantangan fundamental dalam membangun negara-bangsa yang demokratis, berdaulat, dan berkepribadian nasional. Salah satu elemen krusial dalam proses ini adalah bagaimana nilai-nilai budaya dan struktur adat yang telah lama menjadi fondasi masyarakat Timor dapat direvitalisasi dan diintegrasikan ke dalam kerangka negara modern. Revitalisasi budaya dan adat bukan semata-mata tindakan pelestarian, tetapi merupakan strategi pembangunan identitas kolektif, penguatan tata kelola lokal, dan pembentukan legitimasi negara di mata masyarakat.

Budaya dan adat di Timor-Leste bukanlah sekadar warisan masa lalu, melainkan sistem nilai yang hidup, mencakup norma sosial, struktur kekuasaan lokal seperti *liurai*, praktik spiritual dalam uma lulik, serta ekspresi bahasa, musik, dan seni tradisional. Sistem kepemimpinan tradisional, praktik ritual seperti lia mate, serta ekspresi seni lokal merupakan pilar utama yang membentuk jati diri komunitas-komunitas lokal. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi nilai-nilai ini ke dalam sistem negara modern

menjadi semakin kuat sebagai bentuk perlawanan terhadap homogenisasi identitas yang dibawa oleh globalisasi (Grenfell, 2006).

Revitalisasi budaya dan adat di Timor-Leste juga berfungsi sebagai bagian dari proyek dekolonisasi mental, yaitu usaha sadar untuk membebaskan bangsa dari warisan mentalitas subordinasi yang dihasilkan oleh periode kolonial Portugis dan pendudukan Indonesia. Bagi Timor-Leste, yang memiliki sejarah panjang kolonialisme dan intervensi asing, penguatan kembali akar budaya lokal merupakan bagian integral dari pembebasan sejati dan pengakuan terhadap kebesaran warisan leluhur. Dengan mengangkat kembali nilai-nilai lokal ke dalam ruang publik, negara Timor-Leste berupaya membangun identitas nasional yang berakar, berdaulat, dan kontekstual, serta mampu berdialog dengan dunia modern tanpa kehilangan jati dirinya (Leach, 2017).

Negara modern Timor-Leste mengakui bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus berpijak pada realitas sosial masyarakatnya. Oleh karena itu, revitalisasi budaya dan adat menjadi proses penting untuk menjembatani antara warisan leluhur dengan tuntutan pembangunan kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya negara yang tidak bersifat hegemonik, melainkan partisipatif dan kontekstual, dengan menghormati keragaman identitas budaya yang ada di seluruh wilayah nasional.

Revitalisasi budaya dan adat di Timor-Leste telah diintegrasikan melalui berbagai kebijakan, seperti pendidikan berbasis budaya, pelestarian situs-situs adat, pengakuan terhadap peran struktur adat dalam rekonsiliasi lokal, serta promosi seni dan bahasa tradisional di tingkat nasional dan internasional. Namun, revitalisasi ini bukan tanpa tantangan, terutama dalam konteks modernisasi, urbanisasi, dan ekspektasi generasi muda terhadap masa depan (Hicks, 2013).

Bab ini akan membahas secara sistematis bagaimana nilai-nilai budaya dan sistem adat telah direvitalisasi dalam pembangunan negara modern Timor-Leste melalui kebijakan publik, pendidikan, seni, rekonsiliasi sosial, serta teknologi. Fokus juga diberikan pada dinamika antara tradisi dan modernitas, peran generasi muda, serta sinergi antara otoritas negara dan struktur tradisional dalam menjaga kesinambungan antara masa lalu dan masa depan bangsa.

12.2. Pengakuan Konstitusional dan Revitalisasi Nilai Budaya serta Sistem Adat di Timor-Leste

1. Kerangka Hukum dan Konstitusional

Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL), yang diadopsi pada 20 Mei 2002, secara eksplisit mengakui dan menghormati nilai-nilai adat dan budaya sebagai bagian penting dari fondasi negara (Constituição da República Democrática de Timor-Leste, 2002). Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa negara menghormati dan menjamin nilai-nilai adat dan budaya rakyat Timor-Leste, sedangkan Pasal 31 dan 59 menegaskan hak atas identitas budaya serta pendidikan yang menghormati nilai-nilai lokal. Pengakuan ini tidak hanya bersifat simbolik, melainkan juga menjadi dasar hukum strategis dalam membangun sistem pemerintahan yang inklusif dan berakar pada realitas sosial masyarakat Timor.

Pengakuan konstitusional ini mendorong penguatan struktur adat seperti *liurai*, katuas, lia nain, dan institusi uma lulik sebagai bagian dari mekanisme sosial-politik yang diakui negara. Hal ini mencerminkan semangat pluralisme hukum, di mana sistem hukum formal dan hukum adat hidup berdampingan dalam penyelesaian konflik sosial, seperti sengketa lahan, warisan, dan pengelolaan komunitas. Dalam banyak kasus, mekanisme adat terbukti lebih efektif dan legitim di mata masyarakat dibandingkan sistem peradilan formal.

Selain itu, negara berkomitmen untuk mendukung revitalisasi nilai adat melalui legislasi dan kebijakan publik, seperti Undang-Undang Kebudayaan Nasional dan perlindungan warisan budaya non-benda. Upaya ini memperkuat dialog antara hukum negara dan hukum adat, meningkatkan legitimasi negara, serta mendukung pelestarian identitas budaya tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

2. Program Pendidikan Berbasis Budaya

Pemerintah Timor-Leste menjadikan sektor pendidikan sebagai instrumen utama dalam revitalisasi budaya. Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dilakukan integrasi bahasa lokal, sejarah adat, dan kesenian tradisional ke dalam kurikulum nasional (Grenfell, 2006). Bahasa Tetun dan bahasa-bahasa nasional lainnya dipromosikan untuk memperkuat identitas lokal serta membangun kesadaran kritis generasi muda terhadap nilai-nilai budaya. Pendidikan berbasis budaya ini berperan penting dalam memperkuat rasa kebangsaan dan menjaga kesinambungan warisan budaya di tengah arus globalisasi.

3. Pelestarian Warisan Budaya Tangible dan Intangible

Upaya sistematis juga dilakukan untuk melindungi warisan budaya tangible, seperti rumah adat (uma lulik), situs bersejarah, dan artefak arkeologi, serta budaya intangible, seperti ritual, tarian, dan cerita lisan. Kerja sama dengan UNESCO untuk mendaftarkan warisan budaya nasional pada daftar Warisan Dunia dan Warisan Takbenda memperkuat perlindungan hukum dan promosi internasional (UNESCO, 2010). Program ini tidak hanya menjaga kekayaan budaya, tetapi juga memberdayakan komunitas lokal untuk menjadi penjaga aktif tradisi mereka.

4. Rekognisi dan Integrasi Struktur Adat

Negara mengembangkan pendekatan sinergis antara struktur pemerintahan modern dan sistem adat tradisional. *Liurai* dan tetua adat diakui sebagai aktor penting dalam mediasi sosial, pengelolaan sumber daya alam, dan rekonsiliasi komunitas (Hohe, 2002). Dalam banyak kasus, mekanisme hukum formal diadaptasi untuk selaras dengan praktik hukum adat, memungkinkan integrasi sistem penyelesaian sengketa yang lebih kontekstual. Rekognisi ini memperlihatkan penghargaan terhadap pluralisme hukum serta memperkuat legitimasi pemerintahan di tingkat komunitas.

5. Tantangan dan Prospek Keberlanjutan

Meskipun demikian, revitalisasi budaya di Timor-Leste menghadapi tantangan serius, terutama dari arus urbanisasi, modernisasi, dan globalisasi. Risiko komodifikasi budaya untuk kepentingan pariwisata tanpa mempertimbangkan makna spiritual budaya menjadi ancaman nyata (McWilliam & Traube, 2011). Untuk menjamin keberlanjutan, diperlukan strategi penguatan kapasitas komunitas lokal, dokumentasi tradisi lisan, integrasi pendidikan budaya dalam sistem nasional, serta partisipasi aktif generasi muda. Dengan demikian, revitalisasi budaya bukan hanya menjadi bentuk pelestarian, tetapi bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berbasis identitas.

12.3. Implementasi Kebijakan Budaya dalam Pembangunan Nasional

Pemerintah Timor-Leste, melalui berbagai kementerian terkait seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Pariwisata, Perdagangan dan Industri, serta Direktorat Nasional Budaya, telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mendokumentasikan, mempromosikan, dan mengembangkan warisan budaya benda maupun non-benda. Upaya ini mencerminkan komitmen negara dalam menjadikan budaya sebagai fondasi

penting pembangunan nasional pasca-kemerdekaan, dengan pendekatan multi-sektor yang mencakup pendidikan, tata kelola lokal, pelestarian budaya, serta rekonsiliasi sosial.

1. Pendidikan Berbasis Budaya

Pendidikan menjadi medium utama untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya lokal kepada generasi muda. Melalui Kementerian Pendidikan, kurikulum nasional diintegrasikan dengan materi sejarah Timor-Leste, warisan budaya, dan struktur sosial adat (Quinn, 2003). Selain itu, bahasa Tetun dan bahasa-bahasa etnis lainnya diperkenalkan sebagai bahasa pengantar di beberapa sekolah untuk memperkuat identitas nasional dan multikulturalisme. Program literasi budaya lokal juga diperkenalkan, terutama di wilayah pedesaan, untuk membangun kesadaran historis dan kebanggaan terhadap warisan leluhur.

2. Pelestarian dan Penguatan Warisan Budaya

Melalui kerja sama dengan UNESCO dan berbagai LSM, pemerintah mendokumentasikan, melindungi, dan mengembangkan situs budaya penting seperti *uma lulik*, lokasi pemakaman adat, serta ekspresi seni tradisional (UNESCO, 2010). Program ini mencakup inventarisasi warisan budaya benda dan non-benda, restorasi fisik rumah adat, dan pelatihan komunitas lokal untuk menjadi penjaga warisan budaya. Festival Arte Cultura Timor dan kegiatan budaya serupa diselenggarakan secara rutin di tingkat nasional dan munisípiu untuk merayakan dan mempromosikan tradisi budaya Timor (McWilliam & Traube, 2011). Selain sebagai sarana hiburan, festival ini menjadi platform edukasi budaya, promosi ekonomi kreatif berbasis budaya, serta penguatan rasa kebangsaan.

3. Integrasi Struktur Adat dalam Tata Kelola Lokal

Dalam kerangka tata kelola hibrid, negara mengakui dan melibatkan struktur adat seperti *liurai*, *katuas*, dan *lia nain* dalam proses musyawarah pembangunan desa, mediasi konflik, serta sosialisasi program-program pemerintah (Hohe, 2002). Pelibatan otoritas tradisional dalam mekanisme formal menunjukkan penghormatan terhadap legitimasi sosial dan moral komunitas, sekaligus menciptakan tata kelola yang inklusif berbasis nilai-nilai lokal.

4. Rekonsiliasi dan Keadilan Sosial Berbasis Adat

Pasca konflik internal dan trauma pendudukan, mekanisme rekonsiliasi tradisional seperti *nahe biti boot* (pembentangan tikar besar) dan *juramento* (sumpah suci) dihidupkan kembali sebagai bentuk penyembuhan kolektif (CAVR, 2005). Mekanisme ini melengkapi proses formal yang dilakukan oleh Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação (CAVR), dengan menekankan pentingnya rekonstruksi sosial dan spiritual berbasis budaya lokal. Revitalisasi praktik ini menunjukkan pendekatan holistik negara dalam membangun keadilan sosial.

5. Budaya sebagai Motor Ekonomi Lokal

Kebijakan budaya Timor-Leste tidak hanya diarahkan pada pelestarian warisan, tetapi juga diorientasikan sebagai motor penggerak ekonomi lokal berbasis budaya. Produksi *tais*, musik tradisional, cerita rakyat, dan tarian suku dikembangkan tidak hanya sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai produk ekonomi kreatif yang berkontribusi terhadap kesejahteraan komunitas.

12.4. Peran Generasi Muda dan Digitalisasi Warisan Budaya

1. Keterlibatan Generasi Muda dalam Revitalisasi Budaya

Generasi muda Timor-Leste memainkan peran sentral dalam menghidupkan kembali dan mentransformasikan warisan budaya melalui pendekatan inovatif dan kreatif. Mereka terlibat aktif dalam memproduksi film dokumenter, seni instalasi kontemporer, musik modern berbasis tradisi, serta berbagai proyek komunitas yang mengangkat simbolisme adat (Grenfell, 2009). Melalui keterlibatan ini, generasi muda tidak hanya menjadi pewaris tradisi, tetapi juga inovator yang menghubungkan nilai-nilai masa lalu dengan dinamika masa depan.

Institusi pendidikan tinggi seperti Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL) serta organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam mendukung upaya ini, termasuk melalui riset, pengembangan kurikulum berbasis nilai lokal, dan digitalisasi naskah serta ritus adat.

2. Digitalisasi Warisan Budaya

Digitalisasi menjadi strategi kunci dalam memperluas akses terhadap warisan budaya. Program-program dokumentasi ritus adat, pengarsipan cerita rakyat, serta pembuatan basis data warisan budaya takbenda telah diinisiasi oleh lembaga seperti UNTL dan organisasi masyarakat sipil (Leach, 2017). Platform digital, media sosial, dan teknologi informasi lainnya digunakan untuk memperkuat identitas nasional dan meningkatkan kesadaran publik, khususnya di kalangan generasi digital. Teknologi digital juga memungkinkan komunikasi antar-generasi dan antar-komunitas budaya yang tersebar luas.

3. Tantangan dalam Revitalisasi Budaya

Revitalisasi budaya di Timor-Leste menghadapi berbagai tantangan struktural, ideologis, dan praktis yang kompleks (McWilliam, 2007):

- Modernisasi dan Globalisasi: Gelombang modernisasi melalui pendidikan formal, media, dan teknologi informasi mendorong pergeseran nilai di kalangan generasi muda, yang berpotensi melemahkan struktur adat dan identitas budaya.
- Dualisme Hukum dan Kewenangan: Ketegangan antara sistem hukum formal negara dan hukum adat, terutama dalam penyelesaian konflik agraria dan warisan, menunjukkan perlunya kerangka hukum yang lebih jelas dan sinergis.
- Komersialisasi Budaya: Upaya pelestarian budaya terkadang tergelincir menjadi komodifikasi, yang mengorbankan makna spiritual dan sosial tradisi demi kepentingan pariwisata.
- Keterbatasan Kapasitas Institusional: Lembaga kebudayaan nasional masih menghadapi keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan kurangnya data budaya yang terorganisasi secara sistematis.

Tantangan-tantangan ini menuntut strategi revitalisasi budaya yang hati-hati, substantif, dan berkelanjutan.

4. Prospek Strategis untuk Revitalisasi Budaya

Meskipun berbagai tantangan membayangi, terdapat pula peluang strategis yang dapat memperkuat revitalisasi budaya:

a. Integrasi Pendidikan Budaya: Penguatan kurikulum berbasis nilai-nilai lokal di sekolah dan universitas menawarkan potensi besar untuk membentuk generasi muda yang melek budaya sekaligus adaptif terhadap perubahan zaman.

b. Penguatan Hukum Adat dalam Kerangka Nasional: Melalui pengembangan kebijakan hukum yang mengakomodasi pluralisme legal, negara dapat membangun mekanisme sinergis antara hukum adat dan hukum nasional, memperkuat legitimasi negara dan otoritas tradisional.
c. Pemanfaatan Teknologi Digital: Digitalisasi budaya melalui arsip daring, dokumentasi video, dan peta budaya digital menjadi alat vital untuk pelestarian dan promosi budaya di era globalisasi.
d. Kemitraan Multisektor: Kolaborasi antara pemerintah, LSM, komunitas adat, dan lembaga internasional seperti UNESCO membuka peluang besar dalam perumusan kebijakan berbasis bukti dan pemberdayaan komunitas melalui pendekatan partisipatif (UNESCO, 2010).
e. Sinergi antara Warisan Budaya dan Pembangunan Nasional

Revitalisasi budaya di Timor-Leste bukan sekadar menjaga identitas nasional, melainkan juga memperkuat kohesi sosial, memperdalam demokrasi berbasis komunitas, dan memperkaya praktik pembangunan berkelanjutan yang berakar pada nilai-nilai lokal (Traube, 2007). Dengan memberdayakan generasi muda dan memanfaatkan teknologi modern secara strategis, budaya Timor-Leste dapat menjadi aset kreatif dan spiritual dalam menghadapi tantangan globalisasi, tanpa kehilangan akar historisnya.

12.5. Penutup

Revitalisasi budaya dan adat di Timor-Leste pasca-kemerdekaan bukanlah sekadar upaya romantisme masa lalu, melainkan strategi pembangunan berkelanjutan yang menempatkan nilai-nilai leluhur sebagai fondasi masa depan. Ini merupakan bagian integral dari proyek nation-building yang berbasis pada pengakuan terhadap nilai-nilai lokal sebagai sumber identitas nasional dan kekuatan sosial (Leach, 2017; Traube, 2007).

Dalam kerangka negara modern, budaya tidak diposisikan hanya sebagai simbol estetis atau folkloristik, melainkan sebagai sistem nilai dan praktik sosial yang memiliki fungsi normatif dan integratif. Para *liurai*, uma lulik, ritual adat, serta bahasa-bahasa lokal membentuk jaringan makna yang memperkuat rasa kebersamaan, memperteguh legitimasi negara, dan membangun kohesi sosial di tengah keragaman etnis serta kompleksitas pengalaman sejarah (McWilliam, 2007).

Revitalisasi budaya juga menjadi bentuk resistensi terhadap homogenisasi globalisasi dan sekaligus representasi dari proses dekolonisasi struktural dan mental. Dengan mendayagunakan budaya lokal dalam kebijakan publik, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan, Timor-Leste membuktikan bahwa pembangunan modern dapat berjalan seiring dengan penghormatan terhadap pluralitas budaya dan warisan sejarah.

Pada akhirnya, Timor-Leste membangun dirinya bukan dari ruang kosong, melainkan dari sejarah panjang perjuangan, ketahanan budaya, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Revitalisasi budaya dan adat menjadi pilar utama dalam menjaga memori kolektif sekaligus mengarahkan masa depan bangsa menuju bentuk negara yang demokratis, inklusif, berkelanjutan, dan berakar kuat pada jati dirinya sendiri.

BAB 13: *LIURAI* DAN PERANANNYA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

13.1. Pendahuluan

Dalam konteks negara modern pasca-kemerdekaan, struktur dan fungsi otoritas lokal tradisional seperti *liurai* tetap memainkan peranan strategis dalam pembangunan daerah di Timor-Leste, khususnya di komunitas-komunitas pedesaan dan adat. Walaupun kekuasaan administratif formal mereka telah berkurang seiring dengan pembentukan struktur negara modern, eksistensi *liurai* sebagai pemimpin simbolik, penjaga nilai-nilai budaya, dan mediator sosial tetap vital dalam dinamika masyarakat lokal (McWilliam, 2007; Bovensiepen, 2015).

Dalam perjalanan panjang sejarah Timor-Leste, *liurai* bukan sekadar kepala suku atau penguasa wilayah, melainkan figur sentral yang mengelola tatanan sosial, menjaga harmoni dengan dunia spiritual, dan mengatur distribusi sumber daya berbasis prinsip genealogis dan adat. Struktur sosial tradisional ini memainkan peranan penting dalam membentuk identitas kolektif dan ketahanan komunitas lokal. Masa kolonial Portugis dan kemudian pendudukan Indonesia memang mengubah sebagian struktur ini, tetapi banyak komunitas mempertahankan loyalitas sosial dan spiritual terhadap *liurai* sebagai ekspresi kontinuitas identitas lokal (Traube, 1986; Shepherd, 2014).

Pada era pasca-kemerdekaan setelah tahun 2002, Timor-Leste menghadapi tantangan membangun negara-bangsa yang demokratis dan inklusif tanpa mengabaikan warisan sosial-budaya lokal. Dalam konteks ini, *liurai* mendapatkan peran baru sebagai mediator antara sistem adat dan struktur pemerintahan formal (Grenfell, 2012). Mereka berkontribusi dalam memperkuat tata kelola berbasis komunitas, memfasilitasi

penyelesaian sengketa, mendukung program pembangunan, serta menjaga kohesi sosial di tengah arus modernisasi dan globalisasi.

Meskipun negara modern telah menggantikan banyak fungsi administratif tradisional, *liurai* tetap memegang posisi sentral sebagai penghubung antara masa lalu dan masa kini. Sebagai pemimpin yang memiliki otoritas moral dan legitimasi budaya, mereka menjadi aktor pembangunan potensial dalam mendorong partisipasi masyarakat serta memperkuat kapasitas tata kelola lokal.

Bab ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi *liurai* dalam pembangunan daerah, dengan fokus pada empat dimensi utama: sosial, budaya, ekonomi, dan politik lokal. Pendekatan yang digunakan bersifat interdisipliner, menggabungkan perspektif antropologi politik, sosiologi pembangunan, dan teori governance lokal untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai transformasi dan peran berkelanjutan institusi *liurai* dalam negara modern Timor-Leste.

13.2. Konteks Sosial-Politik Kewenangan *Liurai*

1. Akar Historis dan Legitimasi Tradisional

Secara historis, *liurai* berperan sebagai kepala suku atau raja kecil yang memimpin reinu atau wilayah adat tertentu berdasarkan prinsip genealogis, spiritualitas kosmologis, dan legitimasi sosial komunitas (Traube, 1986). Kepemimpinan *liurai* tidak hanya berbasis keturunan, tetapi juga diikat oleh kemampuan menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, leluhur, dan alam. Dalam kerangka sosial-politik tradisional Timor-Leste pra-kolonial, *liurai* merupakan otoritas sakral sekaligus administrator pragmatis yang mengatur hukum adat, ritus keagamaan, distribusi sumber daya, dan hubungan antar-komunitas (McWilliam, 2007).

Kewenangan *liurai* dibangun di atas struktur genealogis dan fondasi kepercayaan kolektif yang diwariskan secara turun-temurun. Mereka mengintegrasikan aspek kekuasaan politik, spiritualitas, dan budaya dalam satu entitas kepemimpinan yang sakral, bertindak bukan sekadar sebagai penguasa, melainkan sebagai penjaga harmoni kosmologis antara manusia, leluhur, dan alam.

2. Transformasi dalam Masa Kolonial dan Pendudukan

Pada masa penjajahan Portugis dan kemudian pendudukan Indonesia, kewenangan *liurai* mengalami perubahan struktural yang signifikan. Kolonialisme kerap mengkooptasi institusi adat untuk mendukung kontrol administratif, dengan mengangkat *liurai* sebagai perantara kekuasaan kolonial di tingkat lokal (Shepherd, 2014). Sebagian *liurai* berkolaborasi dengan kolonialisme, sementara sebagian lainnya mempertahankan posisi otonom atau berperan dalam resistensi terhadap penjajah. Manipulasi dan fragmentasi otoritas tradisional ini menciptakan warisan kompleks dalam hubungan antara *liurai*, negara kolonial, dan komunitas lokal hingga masa pasca-kemerdekaan (Cristalis & Scott, 2005).

3. Kewenangan De Facto dalam Negara Modern

Pasca kemerdekaan Timor-Leste, posisi *liurai* menghadapi tantangan baru dalam negara demokratis modern. Secara formal, konstitusi Timor-Leste tidak secara eksplisit mengatur peran institusi tradisional seperti *liurai*. Namun secara de facto, mereka tetap memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan komunitas (Grenfell, 2012).

Dalam praktiknya, *liurai* sering berperan dalam:

- Mediasi Konflik Lokal: Menyelesaikan sengketa tanah, warisan, atau konflik antarklan melalui mekanisme adat.

- Legitimasi Sosial terhadap Kebijakan Publik: Memberikan dukungan atau persetujuan terhadap program pembangunan desa seperti proyek infrastruktur atau reformasi agraria, yang menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah.
- Penguatan Identitas Lokal: Menjadi simbol kontinuitas sejarah dan representasi identitas etnografis dalam upaya pembangunan nasional berbasis pluralisme budaya.

Kewenangan *liurai* bersifat lentur, kontekstual, dan tetap relevan dalam proses pembangunan daerah, meskipun tidak diakui dalam kerangka hukum formal.

4. *Liurai* dan Identitas Lokal dalam Pembangunan Nasional

Liurai berfungsi sebagai penjaga memori kolektif dan identitas lokal yang memperkaya narasi nation-building di Timor-Leste (Bovensiepen, 2015). Kehadiran mereka dalam upacara kenegaraan, ritual adat nasional, dan proses rekonsiliasi sosial menunjukkan pentingnya struktur tradisional sebagai elemen pengikat sosial di tengah transformasi politik dan modernisasi.

Liurai bukan hanya bagian dari warisan budaya, tetapi juga aktor aktif dalam proses pembangunan berkelanjutan yang menghormati pluralisme budaya dan kontinuitas sejarah bangsa.

5. Tantangan dan Peluang dalam Integrasi Tata Kelola

Walaupun peran *liurai* tetap vital, integrasi mereka ke dalam sistem pemerintahan modern berbasis demokrasi menimbulkan sejumlah tantangan. Struktur hierarkis adat berpotensi bertentangan dengan prinsip egalitarianisme demokrasi (Cummins, 2017). Oleh karena itu, negara perlu mengembangkan kerangka kerja partisipatif yang

mengakui kontribusi *liurai* tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender.

Jika dikelola dengan pendekatan transparan dan inklusif, *liurai* dapat menjadi mitra strategis dalam memperkuat tata kelola lokal, memperluas partisipasi komunitas, dan membangun negara yang berakar pada nilai-nilai budaya sekaligus berorientasi pada keadilan sosial.

13.3. Peran *Liurai* dalam Bidang Sosial dan Budaya

Dalam pembangunan sosial dan budaya di Timor-Leste, peran *liurai* sangat signifikan dan tetap relevan hingga masa kini. Mereka bukan sekadar tokoh simbolis masa lalu, melainkan aktor aktif dalam dinamika kehidupan komunitas lokal, berkontribusi dalam menjaga kontinuitas budaya, memperkuat identitas nasional, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

1. Penjaga Warisan Budaya dan Identitas Lokal

Liurai memainkan peran fundamental sebagai pelindung dan penjaga warisan budaya lokal, termasuk pelestarian ritual lulik (upacara sakral), praktik adat istiadat, sistem sosial klan, serta narasi sejarah komunitas (Traube, 1986; Bovensiepen, 2015). Mereka menjaga kesinambungan budaya antar-generasi di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Kehadiran *liurai* dalam upacara seperti pesta panen, pernikahan tradisional, pemakaman, dan uma lulik menyimbolkan hubungan spiritual antara manusia, leluhur, dan tanah (McWilliam, 2007). Dalam berbagai acara adat, kehadiran mereka dianggap sebagai simbol legitimasi dan otoritas moral yang memperkuat identitas lokal.

2. Mediator Sosial dan Penjaga Kohesi Komunitas

Sebagai pemegang otoritas moral, *liurai* berperan sebagai mediator dalam penyelesaian berbagai konflik lokal, seperti sengketa lahan, perselisihan keluarga, atau pelanggaran norma adat. Melalui mekanisme tradisional seperti prosesi *nahe biti boot*, *liurai* tidak hanya menyelesaikan masalah secara pragmatis, tetapi juga memulihkan harmoni sosial dan keseimbangan spiritual komunitas (Grenfell, 2012). Dalam masyarakat Timor yang bersifat komunal, mediasi ini penting untuk menjaga kohesi sosial dan stabilitas komunitas, serta mendukung partisipasi kolektif dalam pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

3. Agen Edukasi Budaya dan Pelestari Nilai Lokal

Liurai berperan sebagai agen penting dalam pendidikan budaya generasi muda. Mereka mentransmisikan nilai-nilai adat seperti rasa hormat kepada leluhur, solidaritas komunal, penghargaan terhadap tanah dan alam melalui pendidikan informal seperti bercerita, pelatihan upacara adat, serta inisiasi ke dalam struktur sosial klan (Shepherd, 2014). Fungsi edukatif ini menjadi krusial di tengah degradasi nilai akibat urbanisasi dan penetrasi budaya asing, sehingga memperkuat identitas nasional berbasis lokal serta membangun kesadaran budaya yang resilien.

4. Diplomat Budaya Antar-Klan dan Suku

Liurai juga menjalankan peran sebagai diplomat budaya yang membangun serta menjaga hubungan antar-komunitas adat. Hubungan ini penting baik dalam konteks kerja sama tradisional maupun penyelesaian konflik historis (McWilliam & Traube, 2011). Aktivitas diplomasi budaya oleh *liurai* memperkuat solidaritas horizontal, mendukung integrasi sosial dari bawah (bottom-up integration), dan memperkokoh kohesi nasional di tengah pluralitas etnis dan geografis Timor-Leste.

5. Pilar Stabilitas Sosial dalam Pembangunan Berkelanjutan

Dalam konteks pembangunan daerah, kehadiran *liurai* tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif. Dengan legitimasi adat yang kuat, mereka mampu menggerakkan partisipasi komunitas dalam program pembangunan desa, menjaga keberlanjutan proyek lokal, serta memastikan bahwa pembangunan tidak mengabaikan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat (Cummins, 2017). Dengan demikian, *liurai* menjadi pilar penting dalam membangun struktur sosial yang resilien, inklusif, dan berakar pada nilai-nilai lokal.

Secara keseluruhan, kontribusi *liurai* dalam bidang sosial dan budaya di Timor-Leste menunjukkan betapa pentingnya keberadaan mereka dalam menjaga identitas budaya, memperkuat harmoni sosial, dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Fungsi mereka sebagai penjaga tradisi, mediator sosial, pendidik budaya, diplomat antar-klan, dan pilar stabilitas, menjadikan *liurai* aktor kunci dalam proses nation-building yang berbasis pada nilai-nilai lokal dan kultural.

13.4. Peran *Liurai* dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur

Dalam konteks pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Timor-Leste, *liurai* memegang peran strategis sebagai jembatan antara pemerintah dan komunitas lokal. Mereka berkontribusi dalam memperkuat penerimaan masyarakat terhadap program pembangunan negara melalui legitimasi sosial yang mereka miliki (Grenfell, 2012). Peran *liurai* tidak hanya bersifat kultural dan sosial, tetapi juga mencakup aspek ekonomi dan infrastruktur berbasis komunitas.

1. Mobilisasi Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Proyek Infrastruktur

Salah satu kekuatan utama *liurai* adalah kemampuannya dalam memobilisasi masyarakat secara kolektif untuk terlibat dalam proyek pembangunan seperti jalan, jembatan, sistem irigasi, sekolah, dan pusat kesehatan. Dengan mendorong kerja gotong royong berbasis adat, *liurai* mempercepat pelaksanaan proyek tanpa ketergantungan penuh pada instrumen formal negara (Grenfell, 2012). Pendekatan berbasis komunitas ini memperlihatkan efektivitas figur tradisional dalam menggalang solidaritas dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil pembangunan.

2. Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Adat dan Berkelanjutan

Liurai memiliki otoritas moral dalam pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip adat, seperti pengaturan tanah ulayat dan hutan sakral (ai-lulik) (McWilliam, 2007). Mereka memastikan bahwa penggunaan sumber daya dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan etika adat untuk mendukung ketahanan pangan komunitas melalui praktik pertanian, perikanan, dan peternakan yang ramah lingkungan.

3. Mediator Akses terhadap Tanah untuk Pembangunan

Dalam konteks sistem kepemilikan tanah di Timor-Leste yang masih kental dengan prinsip komunal, *liurai* berperan penting sebagai mediator akses terhadap lahan untuk keperluan pembangunan infrastruktur dan investasi lokal (Fitzpatrick, 2002). Mereka menjembatani kepentingan negara dan masyarakat adat, membantu menyelesaikan konflik lahan secara damai, serta memberikan legitimasi sosial terhadap proyek-proyek pembangunan.

4. Advokasi Kepentingan Lokal kepada Pemerintah dan LSM

Sebagai pemimpin yang memahami kebutuhan konkret komunitas, *liurai* menjadi representasi masyarakat adat dalam forum-forum pembangunan, baik dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun donor internasional (Cummins, 2017). Mereka mengadvokasikan akses terhadap infrastruktur, pendanaan untuk usaha kecil dan menengah (UMKM) desa, serta perlindungan hak atas tanah, memastikan bahwa pembangunan tidak bersifat top-down semata, melainkan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

5. Dukungan terhadap Ekonomi Tradisional dan Inovasi Sosial

Liurai juga berperan dalam menjaga keberlangsungan ekonomi tradisional berbasis komunitas, seperti pasar rakyat, produksi tais (kain tenun adat), kerajinan tangan, dan ritual ekonomi musiman (Bovensiepen, 2015). Di samping itu, mereka mendorong inovasi sosial dengan memperkenalkan pendekatan baru dalam pengembangan pertanian, pemasaran produk lokal, serta kolaborasi ekonomi antar-desa, mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernisasi ekonomi di tingkat lokal.

6. Peran Strategis dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Inklusif

Kontribusi *liurai* menunjukkan bahwa pembangunan di Timor-Leste tidak dapat mengandalkan pendekatan struktural dan formal semata. Diperlukan pendekatan berbasis budaya dan partisipasi, di mana *liurai* menjadi jembatan penting antara negara dan rakyat. Mengintegrasikan mereka dalam strategi pembangunan nasional bukan hanya penghormatan terhadap sejarah, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan kontekstual.

13.5. Tantangan dan Peluang Integrasi *Liurai* dalam Sistem Pembangunan Negara

Integrasi peran *liurai* ke dalam sistem pembangunan nasional di Timor-Leste merupakan isu strategis yang kompleks, karena menyangkut interseksi antara struktur tradisional dan sistem modern kenegaraan. Meskipun *liurai* memiliki legitimasi historis dan kultural yang kuat dalam masyarakat, hingga kini belum terdapat kerangka formal yang secara sistematis mengakomodasi kontribusi mereka dalam pemerintahan dan pembangunan negara (Cummins, 2017). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis berbagai tantangan serta peluang yang menyertainya.

1. Tantangan Integrasi

a. Kurangnya Pengakuan Formal dan Kerangka Hukum. Salah satu tantangan utama adalah belum adanya pengakuan hukum formal terhadap posisi *liurai* dalam struktur negara. Status hukum yang ambigu ini menyebabkan kontribusi mereka bersifat informal, tidak sistematis, dan rentan terhadap eksklusi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan (Cummins, 2017).

b. Tumpang Tindih Kewenangan dengan Aparatur Negara. Dalam beberapa kasus, kewenangan tradisional *liurai* dapat berbenturan dengan otoritas pejabat formal seperti kepala suku (xefe suku) atau administrator postu. Tumpang tindih ini menciptakan ketegangan yang dapat menghambat koordinasi pembangunan dan memperparah dualisme otoritas di tingkat lokal.

c. Risiko Politisasi dan Fragmentasi Sosial. Sebagai figur sosial yang berpengaruh, beberapa *liurai* terlibat aktif dalam politik partisan, yang mengancam netralitas moral mereka di mata komunitas (Grenfell, 2012). Keterlibatan politik ini memicu fragmentasi sosial karena komunitas terpecah berdasarkan afiliasi politik *liurai*. Perebutan klaim atas gelar *liurai* di beberapa

daerah juga memperburuk konflik internal dan mengganggu stabilitas sosial yang diperlukan untuk pembangunan.

d. Tantangan Modernisasi dan Perubahan Sosial. Generasi muda yang lebih terpapar pendidikan formal dan nilai-nilai globalisasi cenderung memiliki persepsi yang berbeda terhadap otoritas tradisional. Akibatnya, pengaruh *liurai* dapat menurun seiring perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakat kontemporer.
e. Kesenjangan Kapasitas dan Sumber Daya. Sebagian besar *liurai* belum memperoleh pelatihan teknis, pendidikan formal, atau sumber daya yang memadai untuk berpartisipasi secara efektif dalam tata kelola pembangunan modern (Bovensiepen, 2015). Keterbatasan ini menghambat peran mereka dalam administrasi publik, akuntabilitas, dan perencanaan pembangunan berkelanjutan.

2. Peluang Integrasi

a. Penguatan Model Pemerintahan Partisipatif dan Inklusif. Dengan memasukkan *liurai* dalam forum konsultatif pembangunan desa, postu, dan munisípiu, negara dapat memperkuat legitimasi serta akuntabilitas kebijakan melalui partisipasi tokoh adat (McWilliam, 2007). Pendekatan ini membuka ruang bagi demokrasi deliberatif berbasis lokal.
b. Pelestarian Kearifan Lokal dalam Perencanaan Pembangunan. *Liurai* memiliki pengetahuan lokal terkait pengelolaan sumber daya alam, pola tanam, sistem sosial, dan mitigasi bencana. Kearifan ini dapat dijadikan basis data untuk pembangunan berkelanjutan yang adaptif terhadap konteks geografis dan budaya Timor-Leste.
c. Mediasi Sosial dan Resolusi Konflik Komunitas. Peran tradisional *liurai* dalam menyelesaikan konflik secara damai dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum negara sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa berbasis komunitas, mendukung pendekatan hukum restoratif.

d. Peluang Kemitraan Strategis antara Negara dan Komunitas Adat. Kemitraan strategis antara negara dan komunitas adat, dengan pelibatan aktif *liurai* dalam penyusunan kebijakan lokal, berpotensi memperkuat model pembangunan berbasis partisipasi (McWilliam, 2007). Integrasi ini juga dapat memperkaya pendekatan rekonsiliasi nasional dengan memanfaatkan praktik adat yang efektif dalam menyatukan komunitas.
e. Pendidikan Kewarganegaraan Adat dan Penguatan Identitas Nasional. Pemberian pelatihan kepada *liurai* mengenai hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan, dan prinsip pembangunan berkelanjutan dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk berkontribusi secara efektif dalam sistem negara (Fitzpatrick, 2002). Selain itu, menempatkan *liurai* sebagai simbol identitas nasional hidup membantu memperkuat narasi nation-building berbasis penghormatan terhadap pluralitas budaya.

Kesimpulannya, meskipun terdapat berbagai tantangan dalam mengintegrasikan *liurai* ke dalam sistem pembangunan negara, peluang yang tersedia jauh lebih strategis jika dikelola secara cerdas dan inklusif. Upaya ini memerlukan kerangka hukum yang memadai, dialog yang konstruktif antara otoritas tradisional dan formal, serta penguatan kapasitas *liurai* agar mereka mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman. Dengan demikian, integrasi ini tidak hanya memperkaya sistem pembangunan nasional, tetapi juga menjamin keberlanjutan sosial dan budaya Timor-Leste di masa depan.

13.6. Penutup

Peran *liurai* dalam pembangunan daerah di Timor-Leste tetap vital dalam konteks sosial, budaya, dan politik lokal. Meskipun sistem pemerintahan modern berbasis konstitusi telah mengambil alih sebagian besar fungsi administratif, *liurai* terus berfungsi sebagai aktor kunci dalam menjaga kohesi sosial, mengartikulasikan nilai-

nilai budaya, dan memfasilitasi pembangunan berbasis komunitas (McWilliam, 2007; Cummins, 2017). Mereka tidak hanya memainkan peran dalam menjaga harmoni sosial, tetapi juga bertindak sebagai jembatan antara tradisi dan modernitas, menghubungkan nilai-nilai adat dengan dinamika pembangunan kontemporer.

Liurai bukan sekadar pewaris struktur adat masa lalu, melainkan juga agen sosial yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Melalui kontribusi mereka dalam mediasi konflik, pengelolaan sumber daya lokal, edukasi nilai budaya, serta advokasi kepentingan komunitas, *liurai* memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi (Bovensiepen, 2015).

Meskipun terdapat tantangan seperti ketidakjelasan status hukum dan risiko politisasi yang dapat mengancam netralitas mereka, peluang untuk mengintegrasikan peran *liurai* ke dalam sistem pembangunan nasional tetap terbuka lebar. Negara perlu mengembangkan pendekatan hibrid yang menghormati struktur sosial adat sembari memperkuat prinsip-prinsip pemerintahan demokratis (Grenfell, 2012). Pendekatan ini memungkinkan terbentuknya tata kelola yang lebih inklusif, kontekstual, dan berkelanjutan di Timor-Leste.

Dengan demikian, keberhasilan pembangunan daerah di Timor-Leste tidak hanya bergantung pada penguatan institusi formal negara, tetapi juga pada pengakuan dan pemberdayaan struktur sosial tradisional yang telah terbukti menjadi fondasi ketahanan komunitas sepanjang sejarah bangsa ini.

BAGIAN V: VISI HISTORIS DAN STRATEGIS MASA DEPAN

BAB 14: *LIURAI* DALAM NARASI SEJARAH NASIONAL

14.1. Pendahuluan

Narasi sejarah nasional Timor-Leste memiliki dinamika yang kompleks, menggabungkan berbagai lapisan pengalaman kolektif dari era pra-kolonial, kolonialisme Portugis, pendudukan Indonesia, hingga kemerdekaan penuh pada tahun 2002. Di dalam bentangan sejarah ini, peran *liurai* sebagai pemimpin tradisional yang mengelola kekuasaan politik, sosial, dan spiritual pada tingkat komunitas adat, memegang posisi sentral dalam membentuk identitas kolektif bangsa (McWilliam, 2007; Traube, 1986). Sebagai pemimpin tradisional, *liurai* memiliki posisi penting dalam menjaga keseimbangan sosial, memfasilitasi perdamaian, serta mengartikulasikan nilai-nilai budaya yang menjadi landasan kehidupan komunitas.

Namun demikian, dalam konstruksi sejarah nasional modern yang lebih sering menonjolkan narasi perjuangan bersenjata, diplomasi internasional, dan kontribusi elite politik kontemporer, keberadaan *liurai* kerap mengalami marginalisasi. Banyak dari mereka hanya dihadirkan secara folkloris atau diposisikan sebagai bagian dari masa lalu yang statis, bukan sebagai aktor dinamis dalam perubahan sosial dan politik Timor-Leste (Bovensiepen, 2015). Kondisi ini mengindikasikan perlunya revalorisasi historis terhadap peran *liurai* dalam sejarah nasional Timor-Leste. Pendekatan historiografis baru harus dikembangkan dengan memanfaatkan tidak hanya sumber-sumber kolonial dan arsip modern, tetapi juga sejarah lisan (oral histories), dokumen adat, dan memori kolektif yang masih hidup dalam komunitas-komunitas lokal (Gunn, 1999).

Dengan pendekatan ini, rekonstruksi sejarah akan menjadi lebih inklusif, kontekstual, dan mampu menangkap keragaman pengalaman yang membentuk bangsa Timor. *Liurai*, sebagai representasi kekuasaan lokal yang berakar dari sistem sosial-politik adat, telah memainkan peran fundamental sejak masa pra-kolonial hingga kemerdekaan nasional. Namun, dalam berbagai konstruksi sejarah pascakolonial dan narasi negara modern, posisi mereka kerap diabaikan atau dipinggirkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan revalorisasi historis terhadap peran *liurai* dalam sejarah nasional Timor-Leste secara objektif dan strategis.

Bab ini bertujuan untuk membuka ruang refleksi kritis atas bagaimana posisi *liurai* dalam narasi sejarah nasional telah dibentuk, diinterpretasikan, atau bahkan dihapuskan. Selain itu, bab ini mengusulkan pentingnya menempatkan *liurai* sebagai bagian integral dari sejarah perjuangan rakyat Timor, tidak hanya dalam konteks masa lalu pra-kolonial, tetapi juga dalam dinamika kolonialisme, perlawanan, dan pembentukan negara modern. Dengan demikian, pemahaman yang lebih holistik tentang sejarah nasional Timor-Leste dapat dicapai—sebuah sejarah yang tidak hanya berorientasi pada elite politik dan militer, tetapi juga mengakui kontribusi struktur sosial tradisional dalam mempertahankan identitas, ketahanan sosial, dan cita-cita kemerdekaan bangsa.

14.2. *Liurai* Sebagai Aktor Sejarah Sejak Pra-Kolonial

Liurai memainkan peran sentral dalam masyarakat Timor-Leste sejak masa pra-kolonial. Sebelum intervensi kekuatan kolonial Eropa, struktur sosial-politik di Timor telah berkembang dalam bentuk kerajaan-kerajaan kecil yang dipimpin oleh *liurai*. Mereka tidak hanya mengelola pemerintahan lokal, tetapi juga memainkan peran strategis dalam membangun identitas kolektif dan membentuk jaringan politik regional (McWilliam, 2007; Traube, 1986). Dalam konteks ini, *liurai* berfungsi sebagai

pusat kekuasaan sosial, politik, dan spiritual yang berakar pada sistem adat dan kosmologi yang telah ada sejak lama.

1. Struktur Sosial dan Legitimasi Kekuasaan

Dalam sistem sosial pra-kolonial, kekuasaan *liurai* didasarkan pada prinsip genealogis, spiritual, dan kosmologis. Legitimasinya diperoleh melalui warisan turun-temurun, ikatan adat, serta pengakuan kolektif dari komunitas adat. *Liurai* bertindak sebagai penghubung antara dunia manusia dan leluhur, dengan tanggung jawab menjaga harmoni kosmik melalui ritual adat yang mendalam (Hicks, 2004). Kekuasaan politik mereka tidak hanya bersumber dari kekuatan militer, tetapi juga diperkuat oleh peran mereka dalam mengelola hubungan sosial dan distribusi sumber daya alam, yang memastikan kesejahteraan komunitas.

2. Fungsi Politik dan Sosial *Liurai*

Secara politik, *liurai* bertindak sebagai pengatur hubungan antarkerajaan dan pemimpin dalam proses pengambilan keputusan komunitas. Mereka berperan dalam diplomasi, mediasi konflik, serta menjaga kestabilan wilayah. Dalam ranah sosial, *liurai* berfungsi sebagai simbol pemersatu dan pelindung rakyatnya. Selain itu, mereka juga menjadi perantara antara rakyat dan kekuatan kosmologis, menjaga keharmonisan antara manusia, leluhur, dan alam, serta mengorganisasi kerja kolektif dan menetapkan siklus pertanian (Fox, 1980).

3. Hubungan Antar-*Liurai* dan Konfederasi Lokal

Di berbagai wilayah Timor, *liurai* membentuk hubungan konfederasi berdasarkan kesetaraan adat dan afiliasi genealogis. Konfederasi Wehali di selatan dan Likusaen di utara merupakan contoh jaringan kekuasaan yang dibangun atas dasar pertukaran

simbolik, persekutuan militer, dan solidaritas budaya (Therik, 2004). Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan *liurai* tidak terisolasi, melainkan terhubung dalam sistem regional yang dinamis dan fleksibel, yang mendukung pengelolaan konflik dan kerjasama antar wilayah.

4. Kontribusi Terhadap Identitas dan Struktur Bangsa

Liurai berperan penting dalam membentuk struktur sosial-politik yang menjadi dasar identitas bangsa Timor-Leste. Mereka memainkan peran utama dalam pengelolaan tanah, perlindungan sumber daya, serta pelestarian ritus adat yang menjadi pilar kontinuitas komunitas. Meskipun dihadapkan dengan tekanan kolonialisme, struktur sosial yang dibangun oleh *liurai* tetap menjadi fondasi bagi perjuangan kemerdekaan Timor-Leste. Konsep kedaulatan lokal yang dipertahankan oleh *liurai* kemudian berkembang menjadi semangat kemerdekaan nasional (Gunn, 1999).

5. Relevansi Historis dalam Narasi Nasional

Dalam narasi sejarah nasional Timor-Leste yang sering kali menekankan peran aktor kontemporer dalam perjuangan kemerdekaan, peran *liurai* seringkali terlupakan atau dipinggirkan. Revalorisasi peran *liurai* dalam narasi sejarah nasional sangat penting untuk membangun sejarah yang lebih inklusif. Ini akan mengakui kontribusi semua aktor dalam pembentukan identitas bangsa, serta memperkuat hubungan antara nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip demokrasi kontemporer (Bovensiepen, 2015). Pemulihan posisi *liurai* dalam historiografi nasional juga memungkinkan pengakuan atas peran mereka dalam mempertahankan ketahanan sosial dan menciptakan kedaulatan yang berlandaskan pada tradisi lokal.

14.3. *Liurai* dalam Konteks Kolonialisme dan Perlawanan

Selama masa kolonialisme Portugis dan pendudukan Indonesia, posisi *liurai* mengalami dinamika yang kompleks. *Liurai* tidak hanya menjadi sasaran kooptasi oleh kekuasaan asing, tetapi juga tampil sebagai aktor kunci dalam perlawanan terhadap dominasi kolonial dan militerisme. Sebagai pemimpin adat yang berakar kuat dalam struktur sosial Timor-Leste, *liurai* menghadapi dilema antara kolaborasi, resistensi, dan strategi adaptasi (Durand, 2006; Gunn, 1999).

1. Strategi Kooptasi dan Koeksistensi

Kolonialisme Portugis mengimplementasikan sistem indirect rule dengan memanfaatkan *liurai* sebagai instrumen administratif di tingkat lokal. *Liurai* mempertahankan otoritas mereka di bawah pengawasan dan subordinasi administratif kolonial, sering kali diberi status administratif seperti régulo atau chefe de suco (Durand, 2006). Dalam konteks ini, *liurai* memainkan peran ambivalen—sebagai pelindung komunitas adat sekaligus agen kolonial yang diharapkan untuk mengamankan kepentingan Portugis. Sistem ini menciptakan ambiguitas dalam posisi *liurai*, yang harus menavigasi antara peran tradisional mereka sebagai pemimpin masyarakat dan peran mereka sebagai bagian dari struktur kekuasaan kolonial.

2. *Liurai* sebagai Aktor Perlawanan

Meskipun banyak *liurai* berkolaborasi dengan kekuasaan kolonial, tidak sedikit yang memilih untuk melawan dominasi asing. Tokoh seperti Dom Boaventura da Costa dari Manufahi menjadi ikon perlawanan terhadap Portugis, terutama melalui Revolta Manufahi (1911–1912) yang menentang eksploitasi kolonial dan ancaman terhadap kedaulatan adat serta integritas sosial komunitas lokal (Davidson, 1994). Perlawanan *liurai*, selain berbentuk perlawanan militer, juga mengandung dimensi spiritual dan

ideologis, dengan mempertahankan ritus serta hukum adat sebagai bentuk perlawanan budaya terhadap penjajahan. Oleh karena itu, *liurai* tidak hanya terlibat dalam perlawanan bersenjata tetapi juga dalam mempertahankan identitas budaya yang terancam oleh kekuatan kolonial.

3. Transformasi Struktur Kekuasaan Tradisional

Intervensi kolonial menyebabkan transformasi mendalam dalam struktur kekuasaan *liurai*. Kolonialisme Portugis sering kali menerapkan strategi "divide et impera," yang menyebabkan fragmentasi kekuasaan dan mengangkat pemimpin yang lebih loyal kepada kolonial, sementara menggantikan atau melemahkan *liurai* yang tidak patuh (Gunn, 1999). Meskipun begitu, meskipun banyak struktur kekuasaan tradisional *liurai* diganggu atau dibatasi, mereka tetap mempertahankan peran mereka sebagai simbol ketahanan budaya dan identitas lokal. Dalam banyak komunitas, otoritas *liurai* tetap dihormati oleh rakyatnya meskipun dalam bentuk yang lebih terfragmentasi.

4. Posisi *Liurai* dalam Pendudukan Indonesia

Selama pendudukan Indonesia (1975–1999), struktur tradisional *liurai* kembali dilemahkan secara sistematis melalui upaya menggantikan otoritas adat dengan sistem administratif modern, seperti kepala desa yang dikendalikan oleh militer. Namun, di banyak wilayah pedalaman, *liurai* tetap memainkan peran penting sebagai figur moral dan spiritual. Mereka tetap menjadi penjaga nilai-nilai adat dan mendukung gerakan bawah tanah seperti Falintil (CAVR, 2005). Meskipun otoritas formal mereka dikurangi, peran sosial dan kultural *liurai* dalam menjaga stabilitas komunitas dan sebagai pelindung tanah leluhur (rai lulik) tetap bertahan.

5. Warisan Historis dan Reinterpretasi Peran *Liurai*

Peran *liurai* dalam sejarah Timor-Leste tidak bisa disederhanakan menjadi hanya sebagai kolaborator atau pejuang. *Liurai* merupakan aktor strategis yang harus mengelola pilihan sulit antara beradaptasi dengan kekuasaan kolonial atau melawan untuk mempertahankan kelangsungan komunitas mereka. Dalam ingatan kolektif masyarakat Timor-Leste, *liurai* dihormati sebagai penjaga tanah leluhur dan nilai-nilai adat, yang menjadi dasar ketahanan budaya bangsa. Oleh karena itu, untuk merekonstruksi historiografi nasional Timor-Leste secara adil dan komprehensif, penting untuk mengintegrasikan narasi *liurai* sebagai bagian vital dari sejarah ketahanan dan perjuangan nasional (Bovensiepen, 2015).

14.4. Penghilangan dan Marginalisasi dalam Sejarah Resmi

Dalam konstruksi sejarah nasional Timor-Leste pasca-kemerdekaan, terdapat kecenderungan sistematis untuk meminggirkan peran *liurai* dalam narasi resmi. Fokus historiografi yang berat pada perjuangan militer, politik kontemporer, dan proyek modernisasi negara telah mengaburkan kontribusi historis para aktor tradisional dalam membangun ketahanan sosial, budaya, dan politik lokal (Bovensiepen, 2015; Traube, 1986). Fenomena ini perlu dikaji secara kritis untuk merekonstruksi sejarah bangsa secara lebih inklusif dan adil.

1. Narasi Sentralistik dan Proyek Modernisasi

Setelah kemerdekaan, pembangunan identitas nasional Timor-Leste lebih banyak menekankan pada ide-ide modernisasi, demokrasi konstitusional, hak asasi manusia, dan integrasi nasional berbasis struktur negara modern (Durand, 2006). Dalam pendekatan ini, peran-peran tradisional seperti *liurai* sering kali dianggap sebagai bagian dari masa lalu yang feodal, tidak demokratis, atau bahkan penghambat

kemajuan. Akibatnya, kontribusi mereka dalam menjaga komunitas selama masa penjajahan dan dalam perjuangan lokal dihapus dari buku sejarah, kurikulum pendidikan, dan diskursus publik. Narasi resmi lebih mengutamakan tokoh perjuangan militer, elite politik urban, dan diplomasi internasional, mengabaikan jaringan kepemimpinan lokal yang menopang masyarakat selama berabad-abad.

2. Reduksi Peran *Liurai* dalam Historiografi Nasional

Dalam historiografi nasional, *liurai* sering kali direduksi menjadi sekadar kolaborator kolonial atau simbol kultural minor, tanpa memperhitungkan kompleksitas politik dan dilema eksistensial yang mereka hadapi (Gunn, 1999). Narasi sejarah formal lebih menonjolkan aktor-aktor kontemporer, terutama yang berasal dari kalangan urban dan militer, sementara *liurai* hanya disebut sekilas atau diposisikan secara negatif. Ketidakadilan historiografis ini mempersempit pemahaman tentang keragaman bentuk perlawanan, ketahanan komunitas, dan dinamika politik lokal di Timor-Leste.

3. Dampak Marginalisasi terhadap Generasi Muda dan Identitas Budaya

Penghilangan kontribusi *liurai* dari narasi nasional berdampak langsung pada kesadaran sejarah generasi muda. Banyak anak muda Timor-Leste tumbuh tanpa pemahaman mendalam tentang struktur sosial tradisional dan akar kultural komunitas mereka sendiri (Bovensiepen, 2015). Hal ini melemahkan rasa identitas budaya, mengaburkan nilai solidaritas komunitas, serta menciptakan disorientasi dan jurang antara negara modern dengan warisan budaya lokal. Tanpa narasi yang menyeluruh, generasi muda berisiko mengalami alienasi kultural.

4. Upaya Revitalisasi dan Rekonsiliasi Historis

Meski marginalisasi ini berlangsung lama, kini mulai muncul berbagai inisiatif untuk merehabilitasi peran *liurai* dalam historiografi nasional. Upaya ini melibatkan penelitian berbasis sejarah lisan, pengumpulan arsip komunitas, serta forum budaya adat yang berusaha mengintegrasikan kembali narasi lokal ke dalam sejarah nasional (McWilliam & Traube, 2011). Rehabilitasi posisi *liurai* bukan dimaksudkan untuk menggantikan narasi perjuangan modern, melainkan untuk melengkapi dan memperkaya pemahaman tentang keragaman aktor dan kontribusi dalam sejarah bangsa.

5. Pentingnya Rekonstruksi Sejarah yang Inklusif

Dalam konteks pembangunan bangsa yang adil dan berkelanjutan, rekonstruksi sejarah yang inklusif menjadi kebutuhan strategis. Sejarah Timor-Leste harus mampu mengakui berbagai bentuk resistensi, adaptasi, dan ketahanan—baik yang bersifat modern maupun tradisional (Leach, 2017). Mengintegrasikan kembali kontribusi *liurai* ke dalam narasi resmi bukan hanya tindakan keadilan historis, melainkan juga strategi memperkuat identitas nasional yang plural, berakar kuat, dan reflektif terhadap dinamika sejarah bangsa.

Penghilangan dan marginalisasi *liurai* mencerminkan ketegangan antara narasi negara modern dan warisan tradisional yang membentuk identitas lokal. Oleh karena itu, dalam semangat keadilan historis dan rekonsiliasi budaya, sangat penting untuk merevisi narasi sejarah yang eksklusif agar lebih inklusif terhadap aktor-aktor tradisional seperti *liurai*, yang peran dan perjuangannya turut menentukan keberlangsungan bangsa Timor-Leste dari masa pra-kolonial hingga kemerdekaan.

14.5. Reinterpretasi Historis untuk Rekonsiliasi Nasional

Reinterpretasi historis terhadap peran *liurai* merupakan langkah penting dalam membangun narasi sejarah nasional Timor-Leste yang lebih inklusif, reflektif, dan adil. Pendekatan ini bukan sekadar koreksi akademik, melainkan strategi rekonsiliasi nasional yang bertujuan memperkuat identitas kolektif, membangun kepercayaan sosial, dan menyatukan keragaman etno-kultural dalam satu visi kebangsaan (Bovensiepen, 2015; Leach, 2017). Melalui reinterpretasi, sejarah tidak lagi dipandang sebagai narasi masa lalu yang beku, tetapi sebagai instrumen dinamis untuk dekolonisasi pengetahuan, rekonsiliasi budaya, dan penguatan kohesi sosial.

Penerbitan dokumen sejarah lokal, penyusunan biografi para *liurai*, pengarsipan dokumen adat, serta integrasi narasi mereka ke dalam pendidikan sejarah nasional menjadi bagian integral dari proses ini. Dengan demikian, *liurai* tidak hanya diakui sebagai bagian dari sejarah, tetapi juga sebagai warisan kebijaksanaan lokal yang relevan dalam membangun masa depan Timor-Leste yang adil, berakar budaya, dan inklusif secara sosial.

1. Menjembatani Narasi Lokal dan Nasional

Selama ini, narasi nasional Timor-Leste didominasi oleh sejarah perjuangan bersenjata dan diplomasi modern, yang mengesampingkan kontribusi komunitas adat dan para *liurai* (Gunn, 1999). Reinterpretasi historis membuka ruang untuk menjembatani narasi lokal dan nasional, membangun sejarah plural yang mengakui bahwa kemerdekaan Timor-Leste lahir dari akumulasi berbagai bentuk perjuangan—politik, militer, kultural, dan spiritual. Ini memungkinkan narasi nasional yang lebih representatif terhadap keragaman pengalaman sejarah rakyat Timor-Leste.

2. Mengakui Kompleksitas Sejarah *Liurai*

Reinterpretasi juga mendorong pembacaan ulang terhadap peran *liurai* secara lebih adil dan kontekstual. Banyak *liurai* beroperasi dalam situasi dilematik di bawah tekanan kolonial dan pendudukan, di mana mereka harus membuat keputusan strategis untuk menjaga kelangsungan komunitasnya (Durand, 2006). Mereka bukan sekadar kolaborator atau simbol kultural, melainkan pemimpin yang menavigasi realitas politik dan spiritual yang kompleks. Pengakuan terhadap kompleksitas ini memungkinkan masyarakat untuk menilai sejarah secara lebih bijaksana, menghindari simplifikasi moral terhadap aktor-aktor sejarah.

3. Landasan untuk Rekonsiliasi Sosial-Budaya

Rekonsiliasi nasional tidak hanya berkaitan dengan penyembuhan luka politik masa lalu, tetapi juga dengan menjembatani ketegangan antara negara modern dan struktur sosial-budaya adat (McWilliam & Traube, 2011). Reinterpretasi historis terhadap *liurai* menjadi fondasi penting untuk mengakui eksistensi sah komunitas adat sebagai bagian dari bangsa ini. Ini memperkuat legitimasi politik di tingkat komunitas dan memperkaya basis moral untuk membangun model pemerintahan yang partisipatif, kontekstual, dan menghargai warisan leluhur.

4. Implikasi terhadap Pendidikan dan Kebijakan Publik

Integrasi sejarah *liurai* ke dalam kurikulum pendidikan nasional, museum, dan program budaya publik memperkaya pemahaman generasi muda tentang kompleksitas identitas nasional Timor-Leste. Selain itu, kebijakan publik yang berbasis pada rekonsiliasi historis memungkinkan pemberdayaan komunitas adat, pelibatan tokoh tradisional dalam pembangunan daerah, dan pelestarian warisan budaya sebagai bagian dari pilar pembangunan berkelanjutan (Bovensiepen, 2015).

5. Strategi Menuju Narasi Sejarah yang Inklusif

Untuk mewujudkan reinterpretasi historis ini, diperlukan inisiatif konkret seperti penelitian sejarah lisan, penyusunan biografi *liurai*, pengarsipan dokumen adat, serta penyelenggaraan forum-forum dialog antara negara dan komunitas tradisional. Langkah-langkah ini bertujuan tidak hanya untuk merekonstruksi narasi masa lalu, tetapi juga membangun jembatan menuju masa depan Timor-Leste yang inklusif, berakar kuat pada sejarah, dan terbuka terhadap dinamika sosial kontemporer (Leach, 2017).

Dalam kerangka ini, reinterpretasi historis terhadap *liurai* menjadi bukan sekadar tugas akademik, melainkan fondasi strategis bagi rekonsiliasi nasional, revitalisasi memori kolektif, dan pembentukan identitas kebangsaan yang kokoh dan berkeadilan.

14.6. Kesimpulan

Liurai merupakan aktor integral dalam sejarah Timor-Leste, dengan peran yang mencakup dimensi sosial, politik, dan budaya sepanjang berbagai era—pra-kolonial, kolonial, pendudukan, hingga kemerdekaan. Sebagai pemimpin tradisional, *liurai* tidak hanya mengelola komunitas lokal, tetapi juga berkontribusi aktif dalam mempertahankan nilai-nilai budaya, mengatur struktur sosial, dan memelihara kontinuitas identitas di tengah berbagai tantangan eksternal (McWilliam & Traube, 2011).

Menempatkan *liurai* dalam narasi sejarah nasional bukan hanya merupakan upaya pemulihan martabat, tetapi juga strategi kebudayaan dan pembangunan politik yang berkelanjutan. Penghilangan atau marginalisasi mereka dalam historiografi resmi pasca-kemerdekaan menciptakan narasi sejarah yang timpang dan berisiko memutuskan hubungan generasi muda dengan akar kultural mereka. Oleh karena itu, reposisi peran *liurai* dalam narasi sejarah nasional bukan sekadar koreksi akademik,

melainkan langkah penting untuk memperkaya pemahaman kolektif tentang perjalanan bangsa ini (Leach, 2017).

Mengintegrasikan kontribusi *liurai* ke dalam sejarah nasional berarti mengakui kompleksitas perjuangan rakyat Timor-Leste dalam berbagai bentuk—politik, militer, sosial, dan spiritual. Ini adalah langkah strategis untuk memperkuat rekonsiliasi nasional, memperkaya identitas kebangsaan yang pluralistik, dan membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan demokratis Timor-Leste (Bovensiepen, 2015).

Dengan demikian, pengakuan terhadap peran *liurai* tidak hanya berfungsi sebagai upaya pemulihan martabat sejarah, tetapi juga sebagai bagian integral dari strategi kebudayaan dan pembangunan politik yang berkelanjutan. Menghormati warisan mereka berarti merayakan keberagaman cara rakyat Timor-Leste melindungi tanah, nilai-nilai leluhur, dan masa depannya sebagai bangsa merdeka dan berdaulat.

BAB 15: INSTITUSIONALISASI PERAN ADAT DALAM TATA NEGARA

15.1. Pendahuluan

Timor-Leste merupakan sebuah negara yang berdiri di atas fondasi sejarah panjang sistem adat tradisional yang telah membentuk struktur sosial, politik, dan budaya masyarakat jauh sebelum kehadiran kolonialisme Portugis dan terbentuknya negara modern (McWilliam & Traube, 2011). Sistem adat ini, termasuk institusi kepemimpinan tradisional *liurai*, memainkan peran sentral dalam mengatur kehidupan komunitas, mengelola sumber daya, menjaga harmoni sosial, dan memelihara prinsip-prinsip hukum tidak tertulis yang diwariskan secara turun-temurun.

Seiring dengan perolehan kemerdekaan pada tahun 2002, Timor-Leste dihadapkan pada tantangan merancang sebuah tata negara yang tidak hanya meniru model negara-negara modern, tetapi juga mampu merepresentasikan identitas nasional secara otentik dan kontekstual. Pendekatan pembangunan nasional yang semata-mata berbasis sistem politik modern tanpa memperhatikan akar sosial-budaya lokal berisiko menciptakan keterasingan antara negara dan masyarakat akar rumput (Leach, 2017). Oleh karena itu, kebutuhan untuk menginstitusionalisasikan peran adat ke dalam sistem pemerintahan formal muncul sebagai agenda strategis dalam memperkuat nation-building berbasis jati diri bangsa.

Pengakuan terhadap nilai-nilai tradisional dan kepemimpinan adat dalam konstitusi serta kebijakan publik merupakan langkah penting dalam membangun legitimasi negara di mata rakyatnya sendiri (Bovensiepen, 2015). Institusionalisasi peran adat, termasuk *liurai*, tidak hanya bertujuan untuk mengabadikan warisan budaya, tetapi juga menghadirkan model tata kelola yang lebih partisipatif, adaptif, dan relevan terhadap kebutuhan lokal. Ini memungkinkan perpaduan antara prinsip-prinsip

demokrasi modern dengan kearifan lokal dalam kerangka negara hukum yang menghormati hak asasi manusia dan pluralitas budaya.

Bab ini bertujuan untuk membahas secara sistematis dasar pemikiran, urgensi, tantangan, dan prospek dalam proses integrasi institusi adat ke dalam tata negara Timor-Leste. Dengan menggunakan pendekatan multidisipliner—yang menggabungkan perspektif sejarah, hukum, antropologi, dan ilmu politik—pembahasan ini akan memperlihatkan bagaimana warisan adat dan kepemimpinan tradisional dapat direvitalisasi serta dijadikan elemen fungsional dalam sistem pemerintahan demokratis dan inklusif. Pada akhirnya, integrasi institusi adat ke dalam kerangka tata negara bukan sekadar restorasi masa lalu, melainkan transformasi strategis menuju masa depan Timor-Leste yang lebih berakar, adil, berkeadilan, resilient, dan berkelanjutan.

15.2. Rasionalisasi Konstitusional dan Budaya

1. Pengakuan Konstitusional terhadap Nilai Tradisional

Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) mencerminkan komitmen negara untuk menghormati dan melestarikan nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Timor. Meskipun tidak secara eksplisit mengatur status formal institusi adat seperti *liurai* dalam struktur pemerintahan, sejumlah pasal menegaskan penghormatan terhadap budaya lokal. Pasal 2 menegaskan bahwa kedaulatan berasal dari rakyat dan bahwa negara menghormati nilai-nilai budaya tradisional sebagai sumber kesatuan nasional. Pasal 59 menekankan pentingnya promosi dan pelestarian budaya nasional dalam pendidikan dan kehidupan publik, sedangkan Pasal 95 membuka ruang legislasi untuk mengatur masalah sosial dan budaya sesuai karakteristik lokal (RDTL Constitution, 2002). Kerangka normatif ini memberikan dasar legal untuk pengembangan kebijakan integrasi institusi adat dalam sistem pemerintahan.

Meskipun belum terdapat ketentuan yang secara langsung mengatur peran formal lembaga adat, ruang konstitusional yang ada memungkinkan pengakuan dan pengembangan integrasi institusi adat secara sah dalam tata negara modern. Ini menjadi titik awal penting untuk merumuskan desain kelembagaan yang tidak sekadar bersifat toleratif terhadap adat, tetapi secara aktif mengintegrasikannya dalam kerangka negara hukum demokratis.

2. Legitimasi Sosial, Budaya, dan Historis Institusi Adat

Dalam sejarah pra-kolonial Timor, *liurai* berperan sebagai pemimpin politik, sosial, dan spiritual komunitas lokal (Traube, 1986). Kepemimpinan ini berakar pada prinsip keturunan, kekuasaan simbolik, dan kontrak sosial tidak tertulis antara pemimpin dan komunitas. Tanggung jawab mereka mencakup penjagaan tanah leluhur, pelaksanaan hukum adat (*tara bandu*), penyelesaian konflik, serta penyelenggaraan ritus kosmologis yang menjaga harmoni sosial.

Hingga kini, *liurai* tetap memiliki otoritas moral dan simbolik yang kuat, bahkan di luar struktur formal negara. Kehadiran mereka menunjukkan dualisme otoritas: negara modern di satu sisi, dan struktur adat di sisi lain, yang sering kali tumpang tindih atau saling melengkapi. Dalam banyak komunitas pedesaan, *liurai* tetap dihormati sebagai simbol integritas sosial dan penghubung budaya antar-generasi, menegaskan relevansi sistem pengetahuan lokal (*local knowledge systems*) dalam pengaturan sosial kontemporer (McWilliam & Traube, 2011).

3. Urgensi Integrasi Adat dalam Tata Negara Modern

Dalam konteks negara pascakolonial seperti Timor-Leste, integrasi institusi adat dalam struktur negara modern bukan hanya merupakan langkah strategis, tetapi juga

kebutuhan pragmatis. Struktur formal negara seringkali menghadapi keterbatasan dalam menjangkau komunitas terpencil dan memahami dinamika budaya lokal (McWilliam & Traube, 2011). Oleh karena itu, keberadaan *liurai* dan sistem adat dapat menjadi sumber daya penting untuk memperkuat pembangunan berbasis masyarakat, mempercepat resolusi konflik, dan memperdalam demokrasi partisipatif.

Integrasi ini harus dipahami bukan sebagai restorasi sistem feodal, melainkan sebagai adaptasi peran sosial dan kultural dalam kerangka demokrasi modern. Revitalisasi peran adat diharapkan memperkuat kohesi sosial, mendukung agenda pembangunan nasional, dan mempertahankan identitas budaya Timor dalam era globalisasi.

4. Prinsip-prinsip Normatif Integrasi

Agar integrasi institusi adat dalam tata negara berjalan sesuai prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, diperlukan prinsip-prinsip normatif berikut:

- Subsidiaritas: Keputusan harus diambil sedekat mungkin dengan masyarakat terdampak, sehingga meningkatkan responsivitas dan legitimasi sosial.
- Pluralisme Hukum: Hukum negara dan hukum adat dapat hidup berdampingan harmonis, selama tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (Bovensiepen, 2015).
- Partisipasi Inklusif: Keterlibatan aktif perempuan, pemuda, dan kelompok minoritas dalam struktur adat harus dijamin dan ditingkatkan untuk menghindari diskriminasi struktural.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Struktur adat harus dievaluasi secara terbuka dan etis, dengan mekanisme reformasi internal untuk mencegah praktik diskriminatif atau penyalahgunaan otoritas.

Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan yang konstruktif antara negara modern dan institusi adat, sekaligus menjamin bahwa revitalisasi adat memperkuat keadilan sosial dan supremasi hukum.

5. Perspektif ke Depan: Dari Toleransi ke Integrasi Aktif

Mengakui nilai-nilai adat tidak cukup hanya dalam tataran deklaratif. Diperlukan desain kelembagaan yang memungkinkan integrasi aktif peran-peran adat dalam berbagai sektor negara, termasuk legislasi, pembangunan, pendidikan, dan penyelesaian konflik. Integrasi ini harus dilakukan secara kontekstual, menghormati keberagaman lokal, dan memperkuat prinsip keadilan sosial serta kedaulatan rakyat.

Melalui strategi ini, Timor-Leste dapat membangun tata negara yang tidak hanya demokratis secara prosedural, tetapi juga otentik secara kultural. Integrasi aktif institusi adat akan menandai upaya negara untuk menyatukan warisan sejarah dengan visi masa depan yang inklusif, adil, dan berdaulat secara sosial budaya.

15.3. Model-model Integrasi: Studi Perbandingan

Berbagai negara di dunia telah berupaya memformalkan peran institusi adat dalam sistem kenegaraan mereka. Studi perbandingan terhadap model-model tersebut menawarkan inspirasi penting bagi Timor-Leste dalam merumuskan skema integrasi yang kontekstual, demokratis, dan berkelanjutan.
Model-model utama yang dapat ditelaah meliputi:

1. Model Koeksistensi: Studi Kasus Afrika Barat

Negara-negara di Afrika Barat, seperti Ghana dan Nigeria, menerapkan model koeksistensi antara otoritas adat dan pemerintahan modern (Lentz, 2006). Kepala-

kepala suku atau chiefs mempertahankan peran tradisional mereka dalam penyelesaian konflik, pengelolaan lahan ulayat, dan pelestarian budaya lokal, meskipun otoritas mereka tidak mencakup fungsi legislatif atau eksekutif negara.

Kelebihan: Menghormati kedaulatan budaya lokal tanpa mengancam integritas sistem negara modern.

Kekurangan: Rentan terhadap ketegangan yurisdiksi dan dapat melemahkan institusi negara akibat dualisme kekuasaan

.

2. Model Integrasi Formal: Pengalaman Botswana

Botswana berhasil mengintegrasikan sistem adat melalui lembaga *Ntlo ya Dikgosi* (House of Chiefs), yang berfungsi sebagai majelis konsultatif dalam pembuatan kebijakan nasional yang terkait dengan hukum adat, tanah tradisional, dan budaya (Holm & Molutsi, 1989). Para *kgosi* (kepala suku) diakui secara hukum dan memiliki status politik dalam sistem demokrasi parlementer.

Kelebihan: Memberikan partisipasi terstruktur bagi komunitas adat dalam kebijakan nasional dan memperkaya deliberasi publik.
Kekurangan: Peran yang bersifat konsultatif berisiko dibatasi dan rentan terhadap kooptasi politik.

3. Model Otonomi Budaya: Bolivia dan Ekuador

Konstitusi Bolivia (2009) dan Ekuador (2008) memperkenalkan model otonomi budaya dengan mengakui komunitas adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mengatur kehidupan internal mereka, termasuk pengakuan terhadap pengadilan adat dan pemerintahan lokal berbasis budaya (Yashar, 2005).

Kelebihan: Memberikan penghargaan penuh terhadap hak kolektif masyarakat adat untuk mengelola dirinya sendiri sesuai identitas budaya.

Kekurangan: Tanpa mekanisme harmonisasi yang kuat, dapat terjadi fragmentasi sistem hukum nasional.

4. Model Representasi Adat: Vanuatu dan Samoa

Negara-negara Pasifik seperti Vanuatu dan Samoa mengintegrasikan tokoh adat secara langsung dalam pemerintahan lokal dan nasional. Di Vanuatu, *Malvatumauri National Council of Chiefs* berfungsi sebagai badan konsultatif terhadap legislasi nasional dalam hal terkait budaya dan adat (Van Trease, 1995).

Kelebihan: Mengintegrasikan nilai-nilai tradisional ke dalam sistem politik nasional secara substansial.

Kekurangan: Berpotensi memperkuat konservatisme, khususnya dalam isu-isu kesetaraan gender, apabila tidak dikontrol melalui prinsip hak asasi manusia.

5. Implikasi dan Relevansi untuk Timor-Leste

Timor-Leste telah mulai merintis pengintegrasian nilai-nilai adat melalui pembentukan *Forum Lia Nain Nasional* dan dialog antara pemerintah dan pemimpin adat. Namun, pendekatan ini masih bersifat parsial dan belum terstruktur secara formal dalam kerangka hukum positif.

Melalui pembelajaran dari berbagai model di atas, Timor-Leste dapat mengembangkan skema hibrida yang mempertimbangkan sejarah kolonial, keberagaman etnokultural, dan kapasitas institusional nasional.

Beberapa usulan integrasi meliputi:

- Pembentukan Majelis Adat Nasional: Sebagai lembaga konsultatif terhadap Presiden dan Parlemen Nasional dalam isu-isu adat, budaya, dan tanah.
- Pengakuan Hukum terhadap Struktur Adat Lokal: Menjadikan struktur adat sebagai mitra resmi dalam pengelolaan konflik sosial, pendidikan budaya, dan pembangunan berbasis komunitas.
- Representasi Formal Tokoh Adat dalam Pemerintahan Lokal: Melalui mekanisme pengangkatan atau pemilihan ke dalam struktur *suku konsellu* atau *postu administrativu*.

Dengan menyeimbangkan legitimasi tradisional dan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional, Timor-Leste berpeluang besar untuk menciptakan model unik dalam mengelola keragaman sosial secara damai dan berkelanjutan, serta menjadi contoh global dalam penguatan demokrasi berbasis budaya lokal.

15.4. Strategi Institusionalisasi di Timor-Leste

Untuk mewujudkan institusionalisasi peran adat secara efektif dan sahih dalam konteks demokrasi konstitusional, beberapa langkah strategis dapat ditempuh yang berpijak pada pengalaman internasional serta keunikan historis, budaya, politik, dan sosial Timor-Leste. Strategi ini tidak dapat bersifat imitasi semata, melainkan harus melalui pendekatan transformatif dan kontekstual yang mampu menyinergikan nilai-nilai adat (lia na'in, *liurai*, lulik) dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis.

1. Pengakuan Konstitusional dan Legislasi Adat

Langkah pertama yang bersifat fundamental adalah pengakuan formal terhadap struktur dan nilai adat dalam kerangka hukum negara. Walaupun Konstitusi Timor-Leste (2002) mengakui pentingnya budaya dan adat (Pasal 59 dan 95), pengaturan lebih spesifik mengenai posisi hukum lembaga adat masih belum diwujudkan. Oleh karena itu, strategi penting meliputi:

- Amandemen pasal-pasal dalam Konstitusi untuk menyebutkan peran lembaga adat secara eksplisit.
- Penyusunan undang-undang khusus, seperti *Lei das Autoridades Tradicionais*, guna memberikan kepastian hukum dan legitimasi institusional terhadap peran *liurai*, katuas lia, dan struktur adat lainnya.

Pengakuan ini harus menjadi fondasi legal bagi keberlanjutan peran adat dalam tata kelola negara.

2. Pembentukan Lembaga Adat Nasional dan Daerah

Untuk memastikan peran lembaga adat berfungsi dalam proses pembangunan nasional dan lokal, perlu dibentuk lembaga representatif di berbagai tingkatan, yakni:

- *Conselho Nacional das Autoridades Tradicionais* di tingkat nasional sebagai organ konsultatif dalam isu budaya, tanah adat, rekonsiliasi sosial, dan pelestarian lingkungan.
- *Conselhos Locais das Autoridades Tradicionais* di tingkat munisípiu dan postu administratif untuk bermitra dengan administradores lokal dan struktur pemerintah daerah.

Fungsi utama lembaga-lembaga ini adalah:

- Mediasi konflik adat dan sosial.
- Konsultasi terhadap kebijakan pembangunan lokal.
- Perlindungan dan promosi nilai-nilai budaya lokal.
- Pengawasan atas pelestarian ritus adat dan lingkungan berbasis kearifan lokal.

3. Integrasi Tokoh Adat dalam Sistem Pemerintahan Lokal

Strategi ini bertujuan memperkaya sistem demokrasi partisipatif dengan mengakui representasi kultural tanpa menggantikan prinsip-prinsip demokrasi. Mekanisme integrasi meliputi:

- Kuota representasi adat dalam suku konsellu dan forum *Postu Administrativu*.
- Hak suara dalam pengambilan keputusan pembangunan lokal.
- Keterlibatan langsung dalam perencanaan pembangunan komunitas, advokasi budaya, serta resolusi konflik sosial.

Model ini akan memperkuat legitimasi politik dan sosial di tingkat lokal dengan menjembatani demokrasi modern dan tradisi lokal.

4. Pendidikan, Sertifikasi, dan Pemberdayaan Kepemimpinan Adat

Untuk menjembatani antara kearifan lokal dan profesionalisme tata kelola modern, diperlukan pendidikan kapasitas dan sertifikasi formal bagi para *liurai* dan tokoh adat. Program strategis mencakup:

- Kursus kepemimpinan tradisional, hak asasi manusia, prinsip demokrasi, perencanaan pembangunan, dan hukum nasional melalui kerjasama dengan institusi seperti Instituto Nacional de Administração Pública (INAP).
- Sertifikasi berbasis pengalaman, kontribusi sosial, penguasaan nilai budaya lokal, serta komitmen terhadap konstitusi negara.

Pemberdayaan ini bertujuan menciptakan pemimpin adat yang efektif dalam pemerintahan demokratis dan pembangunan nasional.

5. Digitalisasi dan Dokumentasi Sistem Adat

Sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dan pengakuan nasional, digitalisasi sistem adat merupakan langkah penting. Strategi ini meliputi:

- Digitalisasi arsip adat, hukum adat (tara bandu), silsilah *liurai*, ritus tradisional, serta dokumen budaya lainnya.
- Dokumentasi yang sistematis guna menjaga kontinuitas budaya lintas generasi.
- Penggunaan dokumentasi sebagai basis bukti legal dan administratif dalam pengambilan kebijakan serta pencegahan manipulasi atau klaim palsu terkait status adat.

6. Harmonisasi antara Hukum Negara dan Hukum Adat

Agar institusionalisasi tidak menciptakan konflik yurisdiksi antara hukum positif dan hukum adat, diperlukan mekanisme harmonisasi yang sistematis, antara lain:

- Pembentukan Komisi Harmonisasi Hukum di bawah Kementerian Kehakiman yang melibatkan tokoh adat, akademisi, dan masyarakat sipil.
- Penyusunan *Kode Etik Nasional Adat* sebagai panduan umum interaksi antara hukum negara dan hukum adat.

Upaya ini bertujuan agar warisan adat tidak hanya menjadi entitas simbolik, tetapi menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional.

Strategi institusionalisasi peran adat di Timor-Leste menuntut keberanian politik, kedewasaan budaya, dan kebijaksanaan hukum untuk mengakomodasi masa lalu

sekaligus memproyeksikan masa depan. Melalui pengakuan, pemberdayaan, dokumentasi, dan pengorganisasian struktur adat secara sistematis dan berkelanjutan, negara dapat membangun identitas nasional yang kuat, berakar dalam nilai-nilai Timor, relevan dengan realitas sosial rakyatnya, dan konsisten dengan cita-cita demokrasi konstitusional. Inilah jalan kultural menuju kedaulatan demokratis: berbasis adat, berjiwa modern, untuk generasi Timor yang akan datang.

15.5. Tantangan dan Risiko

Upaya institusionalisasi peran adat dalam tata negara Timor-Leste menawarkan potensi besar bagi integrasi sosial dan kultural. Namun, terdapat berbagai tantangan dan risiko yang perlu diantisipasi secara cermat dan sistematis. Kegagalan dalam mengelola tantangan ini bukan hanya berisiko melemahkan legitimasi negara, tetapi juga dapat menimbulkan konflik identitas, duplikasi kewenangan, dan pembelahan sosial. Oleh karena itu, pembahasan berikut menguraikan lima kategori utama tantangan dan risiko institusionalisasi peran adat di Timor-Leste.

1. Tantangan Konseptual dan Ideologis

Integrasi institusi adat ke dalam sistem tata negara Timor-Leste menghadirkan tantangan konseptual mendasar, yakni ketegangan antara nilai-nilai adat yang berbasis warisan spiritual dan kekerabatan dengan prinsip negara demokrasi modern berbasis hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia (Constitution of the Democratic Republic of Timor-Leste, 2002). Dalam banyak komunitas adat, prinsip pewarisan kekuasaan genealogis dan norma patriarkal masih kuat berakar, sementara konstitusi Timor-Leste menegaskan komitmen terhadap kesetaraan gender, demokrasi partisipatif, dan supremasi hukum.

Risiko:

- Potensi konflik nilai antara hukum adat (yang bisa bersifat patriarkal dan hierarkis) dengan prinsip konstitusional tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan sosial.
- Ketidaksesuaian antara sistem suksesi *liurai* yang bersifat genealogis dengan sistem meritokrasi demokratis.
- Potensi kontradiksi antara norma adat dan prinsip konstitusional dapat melemahkan legitimasi hukum nasional serta menciptakan ketidakpastian normatif di tingkat komunitas lokal.

Strategi Mitigasi:

- Pengembangan model hibrida yang menggabungkan prinsip demokrasi representatif dengan keunikan lokal melalui asas subsidiaritas budaya.
- Penyusunan kerangka hukum hibrida berbasis harmonisasi nilai adat dengan prinsip universal hak asasi manusia, melalui konsultasi komunitas dan legislasi adaptif.

2. Risiko Instrumentalisasi Politik dan Klanisme

Penguatan struktur adat dalam sistem pemerintahan berisiko membuka ruang bagi instrumentalisasi politik, yaitu manipulasi simbol-simbol adat untuk kepentingan elit politik atau kelompok tertentu (Logan, 2008). Pemimpin adat dapat diperalat untuk mobilisasi elektoral atau kepentingan ekonomi, serta menghidupkan kembali rivalitas antarklan dan memperburuk polarisasi sosial.

Risiko:

- Penggunaan simbol *liurai* dan otoritas adat untuk kampanye politik atau mobilisasi suara pemilu.

- Menghidupkan kembali konflik lama antar-klan, teritorialisme adat, atau rivalitas genealogis yang mengganggu stabilitas nasional.
- Politisisasi *liurai* dan simbol adat lainnya dapat mengurangi independensi moral adat serta memperuncing pembelahan horizontal di dalam masyarakat.

Strategi Mitigasi:

- Penetapan regulasi tegas terkait pemisahan peran adat dengan politik elektoral.
- Pembentukan badan pengawas independen untuk menjaga netralitas lembaga adat.
- Pendampingan lembaga adat oleh institusi negara dan masyarakat sipil untuk menjamin netralitas dan integritas peran budaya.

3. Ketimpangan Representasi dan Risiko Marginalisasi

Tidak semua kelompok atau komunitas adat memiliki akses yang sama terhadap pengakuan formal negara. Hal ini menimbulkan potensi ketimpangan representasi dan marginalisasi kelompok adat minoritas (Sieder, 2011).

Risiko:

- Konsentrasi kekuasaan adat hanya pada suku atau klan besar, sementara kelompok minoritas atau komunitas baru diabaikan.
- Diskriminasi terhadap perempuan dan anak muda dalam proses pewarisan otoritas adat.
- Munculnya ketidakadilan representasi adat berdasarkan hierarki tradisional, serta eksklusi kelompok-kelompok rentan dari proses pengambilan keputusan.

Strategi Mitigasi:

- Desain institusi adat yang inklusif dan partisipatif, dengan prinsip kesetaraan etnis, gender, dan generasi.

- Sistem seleksi kepemimpinan yang menggabungkan legitimasi tradisional dan prinsip hak universal.
- Kode etik nasional untuk perwakilan adat yang menjamin prinsip non-diskriminasi.

4. Fragmentasi Sistem Hukum dan Tata Kelola

Penerapan sistem adat secara formal dalam pemerintahan lokal berisiko menciptakan dualitas sistem hukum dan birokrasi, yang menimbulkan kebingungan yurisdiksi, lemahnya akuntabilitas, dan ketidakpastian normatif (Boege, Brown, Clements, & Nolan, 2008).

Risiko:

- Tumpang tindih kewenangan antara *liurai* dan administrator negara.
- Keterbatasan koordinasi antara pejabat administratif negara dan pemimpin adat dapat memperlambat program pembangunan serta menurunkan kepercayaan publik terhadap negara.

Strategi Mitigasi:

- Harmonisasi hukum melalui kerangka hukum nasional yang jelas antara *lei estatal* dan *lei tradicional*.
- Pembentukan Komisi Nasional Harmonisasi Adat dan Negara serta pembuatan panduan prosedural kolaborasi lintas-otoritas.
- Mekanisme mediasi tetap melalui lembaga lintas-hukum dan forum komunikasi rutin antar otoritas.

5. Ketahanan Institusional dan Sumber Daya

Liurai dan struktur adat sering kali tidak memiliki kapasitas institusional, administratif, dan keuangan yang memadai untuk menjalankan fungsi-fungsi kelembagaan dalam sistem negara modern.

Risiko:

- Ketergantungan pada bantuan eksternal atau elite politik.
- Kelemahan dokumentasi, arsip, dan sistem pengambilan keputusan yang transparan.
- Ketergantungan pada aktor eksternal atau elite politik berisiko menurunkan legitimasi adat dan meningkatkan risiko kooptasi.

Strategi Mitigasi:

- Pembangunan kapasitas melalui pelatihan, digitalisasi, dan penguatan kelembagaan berbasis komunitas.
- Digitalisasi arsip adat dan dokumentasi proses pengambilan keputusan.
- Pembentukan dana publik khusus untuk revitalisasi lembaga adat yang bersumber dari APBN maupun dukungan internasional berbasis penghormatan terhadap otonomi lokal.

Institusionalisasi peran adat dalam tata negara bukanlah proyek romantik terhadap masa lalu, melainkan upaya transformatif menuju masa depan inklusif dan berakar budaya. Namun, tanpa perencanaan sistemik, pendekatan kritis, dan mitigasi risiko yang tepat, upaya ini dapat menjadi boomerang bagi kohesi nasional. Oleh sebab itu, tantangan dan risiko yang telah diuraikan harus dijadikan sebagai pijakan untuk membangun strategi integratif yang kokoh—demi sebuah negara Timor-Leste yang tidak sekadar merdeka secara politik, tetapi juga berdaulat secara budaya dan sosial.

15.6. Kesimpulan

Institusionalisasi peran adat dalam tata negara Timor-Leste merupakan langkah strategis yang tidak hanya mengakui warisan sejarah bangsa, tetapi juga memperkuat kohesi sosial, memperdalam legitimasi negara, serta membangun fondasi nasional yang berakar kuat pada budaya lokal. Dalam kerangka ini, keberadaan *liurai* dan struktur sosial adat lainnya bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan sumber inspirasi kelembagaan yang relevan untuk merespons tantangan masa depan pembangunan nasional.

Integrasi nilai-nilai adat ke dalam sistem pemerintahan modern harus dilaksanakan melalui kerangka hukum yang kokoh dan berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan hak, serta penghormatan terhadap keragaman budaya dan identitas Timor-Leste. Proses ini memerlukan kehendak politik yang konsisten, partisipasi aktif masyarakat sipil, serta mekanisme partisipatif yang inklusif, guna memastikan bahwa sintesis antara sistem adat dan negara berjalan secara etis, adil, dan berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan nasional, keberhasilan integrasi institusi adat akan berkontribusi tidak hanya pada pelestarian identitas kultural, tetapi juga pada pembentukan tata negara yang kontekstual, adaptif, dan berdaulat secara sosial. Dengan demikian, Timor-Leste dapat melangkah menuju masa depan yang demokratis dan adil, tanpa meninggalkan akar historis dan budayanya, menjadikannya sebagai negara modern yang tetap setia kepada jati dirinya sendiri.

BAB 16: KONTRIBUSI STRATEGIS *LIURAI* BAGI MASA DEPAN TIMOR-LESTE

16.1. Pendahuluan

Dalam perjalanan sejarah panjang Timor-Leste, institusi *liurai* sebagai pemimpin adat tradisional memainkan peran sentral dalam membentuk struktur sosial, budaya, dan politik komunitas lokal. Para *liurai* tidak hanya mencerminkan struktur kekuasaan tradisional, tetapi juga menandakan keberadaan suatu sistem sosial yang mapan, terstruktur, dan berakar kuat dalam kehidupan komunitas. Meskipun proses modernisasi dan pembentukan negara-bangsa berbasis demokrasi telah mengubah lanskap pemerintahan formal, nilai-nilai yang diwariskan oleh para *liurai* tetap bertahan sebagai salah satu kekuatan kultural paling resilien dalam kehidupan masyarakat Timor-Leste kontemporer.

Di tengah dinamika globalisasi, perubahan iklim, ketimpangan pembangunan, dan tantangan dekadensi nilai moral, wacana mengenai kontribusi strategis *liurai* bagi masa depan Timor-Leste menjadi semakin relevan. *Liurai* tidak hanya berfungsi sebagai simbol historis, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai adat, pemersatu komunitas, dan penghubung antara identitas lokal dengan agenda nasional. Peran mereka menawarkan peluang besar untuk memperkuat fondasi sosial, meningkatkan resiliensi budaya, memperdalam kohesi nasional, serta membangun fondasi spiritual bangsa dalam menghadapi tantangan global yang kompleks.

Bab ini bertujuan untuk mengartikulasikan secara sistematis bagaimana para *liurai* dapat memainkan peran strategis dalam pembentukan masa depan Timor-Leste secara transformatif dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi, pluralisme, dan supremasi hukum. Pendekatan yang diambil menekankan pentingnya dialog lintas generasi dan interdisipliner antara tradisi dan modernitas,

antara struktur negara dan komunitas lokal, serta antara hukum nasional dan hukum adat.

Dalam kerangka tersebut, revitalisasi peran *liurai* bukan sekadar romantisasi masa lalu, melainkan strategi pembangunan nasional yang berbasis budaya, partisipatif, kritis, reflektif, dan berorientasi masa depan. Dengan pendekatan yang berbasis konteks, institusi *liurai* dapat menjadi pilar penting dalam perjalanan Timor-Leste menuju negara yang berdaulat secara politik, berakar secara budaya, dan berkelanjutan secara sosial.

16.2. Pilar Strategis: Kebudayaan, Perdamaian, dan Pembangunan Berkelanjutan

Kontribusi strategis para *liurai* bagi masa depan Timor-Leste dapat dianalisis secara sistematis melalui tiga pilar utama: kebudayaan dan identitas nasional, perdamaian sosial dan resolusi konflik, serta pembangunan berkelanjutan berbasis lokalitas. Ketiga pilar ini bersifat saling terkait dan memperkuat satu sama lain, membentuk kerangka strategis untuk pembangunan bangsa yang berakar pada nilai-nilai lokal sekaligus adaptif terhadap tantangan global.

1. Pilar Kebudayaan: Revitalisasi Identitas Nasional

Liurai merupakan institusi sosial-adat yang memegang peran vital dalam menjaga, mentransmisikan, dan merevitalisasi nilai-nilai budaya Timor-Leste. Dalam menghadapi arus globalisasi yang berpotensi mengikis identitas lokal, keberadaan *liurai* menjadi kunci dalam memperkuat jati diri nasional yang berbasis sejarah, spiritualitas, dan ekspresi budaya setempat (Cabral, 2017).

Revitalisasi nilai-nilai budaya melalui pelibatan *liurai* dapat diwujudkan melalui penguatan kurikulum pendidikan berbasis budaya, pengembangan diplomasi budaya internasional, dan pembangunan ekonomi kreatif berbasis warisan budaya (heritage-based economy). Upaya ini memperkaya karakter nasional Timor-Leste tanpa menolak modernitas, melainkan dengan membangun modernitas yang berakar pada warisan leluhur. Dengan demikian, *liurai* berkontribusi langsung dalam membentuk identitas nasional yang kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan.

2. Pilar Perdamaian: Mediasi Sosial dan Resolusi Konflik Berbasis Adat

Peran *liurai* sebagai mediator sosial dan agen resolusi konflik berbasis adat sangat strategis. Dengan legitimasi sosial dan otoritas moral yang tinggi, *liurai* memainkan peran penting dalam menengahi sengketa antarkeluarga, klan, maupun komunitas melalui mekanisme hukum adat seperti *tara bandu* dan *nahe biti boot* (Hohe, 2002).

Integrasi mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat ke dalam sistem nasional memperluas akses terhadap keadilan, khususnya di wilayah-wilayah pedesaan di mana sistem hukum formal belum sepenuhnya menjangkau masyarakat. Pendekatan berbasis konsensus komunitas dan keadilan restoratif ini memperkuat stabilitas sosial, mengurangi potensi kekerasan berbasis tanah atau warisan, dan mendukung terciptanya perdamaian berkelanjutan yang menjadi fondasi pembangunan nasional.

3. Pilar Pembangunan Berkelanjutan: Integrasi Nilai Lokal dalam Pembangunan

Pembangunan berkelanjutan di Timor-Leste tidak dapat hanya berfokus pada aspek ekonomi dan ekologi, melainkan harus mengintegrasikan dimensi sosial dan budaya. *Liurai* memiliki kedekatan dengan komunitas akar rumput dan pengetahuan lokal yang

mendalam mengenai pengelolaan sumber daya alam, konservasi tradisional, serta praktik hidup berkelanjutan (Sousa, 2015).

Dengan melibatkan *liurai* dalam perencanaan dan implementasi pembangunan lokal, negara dapat memastikan bahwa program-program pembangunan lebih responsif terhadap konteks sosial, ekologis, dan kultural setempat. Kearifan lokal *liurai* memperkaya pendekatan pembangunan nasional yang lebih holistik, inklusif, dan berbasis partisipasi masyarakat. Hal ini tidak hanya meningkatkan keberhasilan pembangunan jangka panjang, tetapi juga memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap proyek-proyek tersebut.

4. Peran *Liurai* dalam Pendidikan Kultural dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Selain ketiga pilar tersebut, *liurai* juga dapat memainkan peran sentral dalam bidang pendidikan budaya dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Mereka dapat memfasilitasi pendidikan lintas generasi mengenai sejarah lokal, nilai-nilai adat, serta kearifan tradisional, baik melalui jalur formal maupun informal.

Dalam bidang ekonomi, *liurai* berpotensi mendukung pengembangan koperasi lokal, promosi kerajinan tangan tradisional, serta pariwisata berbasis komunitas (community-based tourism), yang berbasis pada pelestarian nilai budaya lokal (Tilman, 2018). Dengan demikian, *liurai* tidak hanya berperan dalam mempertahankan budaya, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi komunitas secara berkelanjutan.

5. Sinergi antara Negara Modern dan Institusi Adat

Untuk mengoptimalkan kontribusi *liurai*, diperlukan sinergi konstruktif antara negara modern dan institusi adat. Sinergi ini mencakup pengakuan hukum formal terhadap

institusi *liurai*, pelibatan aktif dalam mekanisme pembangunan lokal, serta harmonisasi antara prinsip demokrasi konstitusional dan nilai-nilai adat (Kingsbury, 2009).

Negara tidak boleh melihat *liurai* sekadar sebagai warisan masa lalu yang harus dirayakan secara simbolik atau dihapus karena dianggap kuno. Sebaliknya, mereka harus diperlakukan sebagai mitra strategis dalam membangun masa depan Timor-Leste yang berkeadilan sosial, berkelanjutan, dan berakar kuat pada budaya lokal.

Secara keseluruhan, para *liurai* bukan hanya elemen simbolik sejarah, melainkan agen transformatif yang relevan untuk menjembatani ketegangan antara modernitas dan tradisi. Ketika diberikan ruang dan diberdayakan dalam kerangka kebijakan nasional, kontribusi strategis mereka terhadap kebudayaan, perdamaian, dan pembangunan berkelanjutan akan menjadi salah satu aset paling berharga dalam perjalanan panjang Timor-Leste menuju keadilan sosial dan kedaulatan budaya yang utuh.

16.3. Rekonstruksi Peran *Liurai* dalam Tata Kelola Negara

Rekonstruksi peran *liurai* dalam tata kelola negara Timor-Leste merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan nilai-nilai tradisional ke dalam kerangka pemerintahan modern. Ini bukanlah upaya restorasi feodalisme, melainkan adaptasi kultural yang bertujuan memperkuat kohesi sosial, meningkatkan legitimasi pemerintahan lokal, serta memperluas partisipasi berbasis komunitas. Rekonstruksi ini menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai, struktur sosial, dan otoritas tradisional ke dalam sistem kenegaraan modern secara komplementer, fungsional, dan adaptif, bukan untuk menggantikan demokrasi konstitusional yang telah diperjuangkan.

1. Rasionalisasi Sosial-Politik: Kebutuhan Integrasi Budaya

Negara Timor-Leste, sebagai negara pascakolonial dengan masyarakat majemuk yang kuat berakar pada tradisi, menghadapi tantangan klasik berupa jarak antara negara dan rakyat (Hohe, 2002). Di banyak daerah pedalaman, *liurai* masih dipandang sebagai figur otoritas moral dan sosial yang lebih dihormati daripada pejabat negara. Ini menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis budaya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, bukan sebagai pengganti struktur formal, melainkan sebagai jembatan legitimasi antara negara dan komunitas lokal.

Liurai dapat berfungsi sebagai penghubung antara aspirasi komunitas adat dan agenda pembangunan nasional, memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap negara, serta menghidupkan kembali prinsip subsidiaritas dalam tata kelola negara (Sousa, 2015). Dengan demikian, rekonstruksi ini menjadi kebutuhan strategis untuk membangun negara yang inklusif dan berakar kuat pada budaya.

2. Dimensi Rekonstruksi: Legislasi, Kelembagaan, dan Fungsi

Rekonstruksi peran *liurai* harus dilakukan secara terstruktur melalui tiga dimensi utama:

- Legislasi: Perlu disusun kerangka hukum nasional yang secara eksplisit mengakui posisi dan fungsi *liurai* sebagai entitas sosial-kultural. Ini dapat diwujudkan melalui revisi Undang-Undang Otoritas Lokal atau penyusunan *Lei das Autoridades Tradicionais* yang khusus mengatur status hukum pemimpin adat. Legislasi ini penting untuk mendefinisikan peran *liurai* dalam urusan kemasyarakatan, mediasi konflik, pelestarian budaya, serta pendidikan nilai-nilai lokal.
- Kelembagaan: Diperlukan pembentukan Dewan Adat Nasional dan Dewan Adat Daerah yang berfungsi sebagai organ konsultatif dalam isu-isu budaya, sosial,

dan lingkungan hidup. Forum ini menjadi jembatan resmi antara institusi formal negara dan komunitas adat, memberikan ruang bagi *liurai* untuk menyampaikan pandangan, advis, atau rekomendasi kebijakan.

- Fungsi: *Liurai* dapat menjalankan fungsi-fungsi seperti mediator komunitas dalam penyelesaian sengketa, konsultan budaya dalam perencanaan pembangunan, pelestari ritus dan tradisi lokal, penggerak partisipasi masyarakat dalam program pembangunan, promotor pendidikan nilai budaya, serta mitra dalam pendidikan karakter dan nasionalisme berbasis budaya (Cabral, 2017).

3. Model Hybrid Governance: Sinergi Negara dan Adat

Rekonstruksi peran *liurai* mengarah pada model *hybrid governance*, yaitu tata kelola yang menggabungkan prinsip-prinsip pemerintahan modern dengan norma-norma tradisional (Kingsbury, 2009). Dalam model ini, negara tetap memegang supremasi hukum nasional, sementara institusi adat difungsikan secara komplementer untuk memperkuat legitimasi dan efektivitas pemerintahan lokal.

Pengalaman dari negara-negara seperti Botswana dan Bolivia menunjukkan bahwa keberhasilan *hybrid governance* bergantung pada keseimbangan antara otonomi komunitas adat dan integrasi dalam sistem hukum nasional (Logan, 2009). Timor-Leste dapat mengadaptasi model ini melalui dialog nasional, riset akademik, serta perumusan kebijakan berbasis konsensus lintas budaya.

4. Prasyarat Keberhasilan Rekonstruksi

Agar rekonstruksi peran *liurai* berhasil, perlu dipenuhi beberapa prasyarat dan prinsip utama:

- Transparansi dan Akuntabilitas: Fungsi *liurai* harus tunduk pada prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban publik untuk menghindari penyalahgunaan otoritas tradisional.
- Partisipasi Inklusif: Struktur adat yang baru harus inklusif, mengikutsertakan perempuan, pemuda, dan kelompok minoritas dalam proses pengambilan keputusan.
- Harmonisasi Hukum: Harus ada mekanisme harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk mencegah konflik yurisdiksi (Tilman, 2018).
- Kode Etik Nasional Adat: Perlu dirancang kode etik nasional untuk memastikan bahwa semua praktik adat konsisten dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi.

5. Kontribusi Strategis terhadap Masa Depan Negara

Dengan rekonstruksi yang adaptif dan berbasis bukti, *liurai* tidak hanya menjadi pelestari warisan budaya, melainkan juga agen perubahan sosial yang mendukung demokrasi berbasis nilai lokal. Partisipasi aktif *liurai* dalam pemerintahan lokal dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik, memperkaya kebijakan pembangunan berbasis kearifan lokal, dan memperkuat ketahanan sosial nasional di tengah tantangan globalisasi.

Rekonstruksi ini bukan sekadar pengakuan terhadap sejarah masa lalu, melainkan investasi strategis untuk membangun Timor-Leste yang lebih inklusif, otentik, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan.

16.4. Diplomasi Budaya dan Posisi Global Timor-Leste

Dalam konteks geopolitik Asia-Pasifik dan CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), diplomasi budaya menjadi salah satu instrumen utama bagi negara-negara kecil untuk memperkuat identitas nasional, meningkatkan daya tawar

internasional, dan membangun kehadiran global yang bermartabat (Mark, 2010). Bagi Timor-Leste, warisan sosial dan budaya para *liurai* menawarkan modal strategis untuk mengembangkan *soft power* yang otentik, memperkuat narasi identitas nasional, serta memproyeksikan citra negara secara positif dalam forum internasional.

Diplomasi budaya berbasis warisan *liurai* bukan hanya alat representasi simbolik, melainkan juga instrumen nyata untuk solidaritas global, promosi perdamaian, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam era multikrisis global dan homogenisasi budaya, pendekatan ini memperkuat posisi Timor-Leste sebagai negara yang berdaulat secara budaya, progresif dalam demokrasi, kaya secara historis dan spiritual, serta relevan di tengah dinamika global kontemporer.

1. Konsep Diplomasi Budaya dalam Konteks Timor-Leste

Diplomasi budaya didefinisikan sebagai pemanfaatan aset budaya suatu negara—termasuk tradisi, kesenian, adat istiadat, bahasa, dan nilai kolektif—untuk memperkuat hubungan internasional dan membangun citra negara (Mark, 2010). Dalam konteks Timor-Leste, *liurai* dan seluruh struktur sosial budaya yang diwarisi dari peradaban lokal sebelum kolonialisme dapat dijadikan pilar strategis diplomasi budaya.

Melalui pendekatan ini, Timor-Leste dapat:

- Meningkatkan pemahaman lintas bangsa;
- Membentuk citra negara dengan identitas kuat dan autentik;
- Menyampaikan pesan solidaritas, perdamaian, dan ketahanan budaya secara tidak konfrontatif;
- Membangun jaringan diplomatik berbasis nilai universal dan kearifan lokal.

Strategi ini memungkinkan Timor-Leste memperkuat posisi di kawasan Asia-Pasifik dan komunitas CPLP, tanpa harus bergantung pada kekuatan ekonomi atau militer.

2. Peran Strategis *Liurai* dalam Diplomasi Budaya

Para *liurai*, sebagai pemegang otoritas sosial-tradisional dan penjaga warisan budaya, dapat memainkan berbagai peran strategis dalam diplomasi budaya Timor-Leste, seperti:

- Duta Budaya: Berpartisipasi dalam festival internasional, pameran budaya, dan forum lintas budaya untuk memperkenalkan identitas Timor-Leste yang khas dan spiritual.
- Mediator Identitas: Mengartikulasikan nilai-nilai kultural Timor seperti solidaritas komunitas, perdamaian adat, dan penghormatan terhadap alam dalam forum global.
- Aktivis Warisan Budaya: Berperan dalam kampanye internasional untuk pelestarian warisan budaya takbenda sesuai kerangka UNESCO.
- Pilar Dialog Peradaban: Mewakili model penyelesaian konflik berbasis adat Timor-Leste dalam berbagai inisiatif global seperti *indigenous diplomacy* dan *cultural peacebuilding* (Anholt, 2007).

Dengan keterlibatan aktif ini, *liurai* tidak hanya menjadi pelestari budaya, tetapi juga aktor kunci dalam diplomasi global yang lebih manusiawi dan berbasis nilai-nilai luhur.

3. Diplomasi Identitas dan Keunggulan Komparatif Timor-Leste

Timor-Leste memiliki peluang unik untuk menjadi jembatan budaya (*cultural bridge*) antara Asia Tenggara dan dunia berbahasa Portugis (Lusofonia). Pendekatan diplomasi berbasis *liurai* memperkuat narasi bahwa Timor-Leste adalah:

- Berdaulat dalam budaya lokal;
- Progresif dalam demokrasi;
- Kaya dalam warisan historis dan spiritual;

- Kompetitif dalam membangun hubungan internasional.

Penguatan *branding* ini memungkinkan Timor-Leste memperluas pengaruh di organisasi regional dan internasional seperti ASEAN, CPLP, dan PBB, serta memperkenalkan model pembangunan nasional berbasis komunitas adat dan nilai-nilai lokal ke panggung global.

4. Tantangan dan Strategi Penguatan

Meskipun penuh potensi, diplomasi budaya berbasis *liurai* menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- Fragmentasi Identitas: Kurangnya standardisasi dalam dokumentasi budaya lokal.
- Resistensi Modernitas: Ketegangan antara revitalisasi nilai adat dengan tuntutan modernisasi.
- Keterbatasan Sumber Daya: Minimnya investasi negara dalam program diplomasi budaya.

Strategi untuk mengatasi tantangan tersebut mencakup:

- Pembentukan Lembaga Diplomasi Budaya Nasional: Lembaga ini harus melibatkan representasi komunitas adat untuk merancang dan melaksanakan kebijakan diplomasi budaya nasional.
- Kapasitasi Para *Liurai*: Pelatihan dalam diplomasi internasional, hak budaya global, serta komunikasi lintas budaya.
- Pengembangan Kurikulum Pendidikan Diplomasi Budaya: Di tingkat perguruan tinggi, untuk menghasilkan diplomat budaya masa depan.
- Standardisasi Narasi Budaya: Dokumentasi komprehensif nilai, ritus, dan sejarah *liurai* untuk mendukung strategi diplomasi yang terstruktur.

5. Peluang Masa Depan: Soft Power Timor-Leste di Dunia

Dengan mengangkat diplomasi budaya yang berakar pada warisan *liurai*, Timor-Leste dapat mengukir peran unik dalam tatanan global. Diplomasi budaya berbasis *liurai* membuka peluang untuk:

- Menjadi contoh *best practice* dalam harmonisasi modernitas dan tradisi;
- Menawarkan narasi alternatif dalam diplomasi global yang lebih manusiawi;
- Memperkuat kedaulatan budaya sebagai bagian integral dari kedaulatan politik dan ekonomi.

Dalam visi strategis ini, *liurai* tidak lagi hanya menjadi simbol masa lalu, melainkan aktor masa depan dalam membangun Timor-Leste yang berdaulat, berkarakter, dan berdaya global. Strategi ini mempertegas bahwa dalam dunia yang didominasi oleh kekuatan ekonomi dan militer, kekuatan lunak berbasis budaya menjadi jalan elegan dan bermartabat untuk eksistensi global bangsa kecil dengan jiwa besar.

16.5. Rekomendasi Strategis dan Kebijakan Publik

Dalam konteks pembangunan nasional yang menuntut keberlanjutan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap identitas lokal, institusionalisasi peran *liurai* di Timor-Leste membutuhkan perumusan kebijakan publik yang terstruktur, sistematis, dan berbasis nilai. Rekomendasi strategis berikut bertujuan mengoptimalkan kontribusi *liurai* dalam tata kelola negara modern, membangun sinergi antara warisan adat dan prinsip-prinsip demokrasi, serta memperkuat ketahanan sosial dan budaya Timor-Leste di tengah tantangan globalisasi.

1. Pengakuan Konstitusional dan Penguatan Yuridis

Langkah pertama adalah pengakuan konstitusional dan pembentukan landasan hukum nasional yang tegas untuk mengintegrasikan *liurai* ke dalam struktur sosial kenegaraan.

- Strategi: Amandemen konstitusi atau pembuatan undang-undang khusus tentang kelembagaan adat, yang secara eksplisit mengakui status sosial-politik *liurai* dalam kerangka negara hukum demokratis (De Sousa Santos, 2002).
- Tujuan: Menghindari marginalisasi sistem adat, menjamin partisipasi legal komunitas adat dalam proses demokratis dan pembangunan, serta melindungi hak-hak kolektif masyarakat adat.
- Implikasi: Memberikan dasar legal bagi keterlibatan *liurai* dalam forum konsultatif nasional dan lokal, tanpa mengorbankan prinsip non-diskriminasi, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender.

2. Integrasi dalam Sistem Pemerintahan Lokal dan Pembangunan Partisipatif

Untuk memperkuat kohesi sosial dan efektivitas pembangunan, diperlukan integrasi kepemimpinan adat ke dalam pemerintahan lokal melalui model *co-governance*.

- Strategi: Pelibatan *liurai* sebagai penasihat budaya, mediator sosial, dan penggerak partisipasi komunitas dalam musyawarah *suco*, *aldeia*, dan distrik (Blaser, 2013).
- Tujuan: Memperkuat legitimasi sosial terhadap kebijakan pembangunan, mempercepat penerimaan program nasional, dan memperdalam demokrasi partisipatif.
- Implikasi: Meningkatkan efektivitas tata kelola lokal dan memperkecil kesenjangan antara negara dan komunitas adat.

3. Reformasi Pendidikan Berbasis Budaya Lokal

Pendidikan nasional harus memainkan peran vital dalam membangun kesadaran budaya dan kepemimpinan tradisional.

- Strategi: Integrasi kurikulum berbasis pendidikan adat, sejarah *liurai*, nilai solidaritas komunitas, dan tradisi lokal dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi (Smith, 2009).
- Tujuan: Membentuk karakter warga negara yang berakar kuat pada identitas budaya nasional dan berpikiran global.
- Implikasi: Regenerasi nilai-nilai sosial budaya lokal, memperkaya kapasitas nasional dalam kebudayaan, politik, dan pembangunan, serta mendukung nation-building yang berbasis identitas.

4. Pemberdayaan Ekonomi Adat dan Diplomasi Budaya

Penguatan ekonomi komunitas adat dan diplomasi budaya menjadi aspek penting dalam memperluas kontribusi *liurai*.

- Strategi:
    - Pengembangan ekowisata berbasis adat,
    - Dukungan terhadap koperasi lokal di wilayah tradisional,
    - Pelibatan *liurai* dalam forum diplomasi budaya internasional (Nye, 2004).
- Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan komunitas adat, memperluas jaringan kerja sama internasional, serta memperkuat citra positif Timor-Leste di dunia.
- Implikasi: Diversifikasi ekonomi berbasis budaya dan peningkatan *soft power* nasional.

5. Pembentukan Lembaga Nasional dan Forum Adat

Untuk memperkuat posisi *liurai* secara kelembagaan, dibutuhkan pendirian badan resmi yang menangani isu-isu adat.

- Strategi:
    - Pendirian Lembaga Nasional *Liurai* dan Budaya Adat sebagai pusat dokumentasi, pelatihan, dan advokasi,
    - Pembentukan Forum Nasional *Liurai* (FNL) dan Dewan Adat Nasional sebagai mitra negara dalam dialog strategis.
- Tujuan: Menjamin keberlangsungan dialog lintas struktur dan memperkuat partisipasi komunitas adat dalam tata kelola nasional.
- Implikasi: Memperluas saluran demokrasi deliberatif dan mencegah eksklusi sosial-politik kelompok adat.

6. Monitoring, Evaluasi, dan Standarisasi Peran Adat

Untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas peran *liurai* dalam negara modern, dibutuhkan mekanisme evaluasi berbasis komunitas.

- Strategi:
    - Pengembangan sistem *community-based monitoring*,
    - Evaluasi tahunan terhadap partisipasi, transparansi, dan inklusivitas gender dalam kepemimpinan adat,
    - Standarisasi prosedur pengangkatan, pelatihan, dan kode etik bagi *liurai*.
- Tujuan: Memastikan integrasi adat memperkuat demokrasi, keadilan sosial, dan keberlanjutan budaya.
- Implikasi: Mencegah komodifikasi adat, konflik kewenangan, dan marginalisasi kelompok rentan.

7. Pelindungan Hak Kolektif dan Wilayah Adat

Pengakuan hukum terhadap wilayah adat merupakan elemen vital untuk menjaga keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis.

- Strategi: Reformasi hukum tanah dan sumber daya alam yang mengakui wilayah adat sebagai entitas sah dengan hak kolektif atas tanah, hutan, dan air.
- Tujuan: Menghindari konflik agraria dan melindungi sumber daya dari eksploitasi ilegal.
- Implikasi: Menjamin keberlanjutan ekologis, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap identitas komunitas tradisional.

Rekomendasi-rekomendasi di atas menegaskan bahwa masa depan Timor-Leste tidak dapat dipisahkan dari masa lalunya. *Liurai* sebagai penjaga nilai kolektif, mediator sosial, dan simbol peradaban harus menjadi mitra strategis negara. Integrasi sistem adat ke dalam kebijakan publik bukanlah bentuk kemunduran, melainkan rekonsiliasi sejarah, restorasi identitas, dan inovasi kelembagaan yang memungkinkan Timor-Leste membangun masa depan yang lebih kuat, adil, dan bermartabat.

16.6. Penutup: Menuju Negara Berdaulat Berbasis Budaya

Timor-Leste adalah bangsa yang lahir dari sejarah panjang perjuangan, kolonisasi, dan perlawanan yang berakar kuat pada nilai-nilai budaya lokal. Dalam masa transisi menuju masa depan yang demokratis dan berkelanjutan, perjuangan yang lebih mendalam adalah membangun negara yang tidak hanya merdeka secara politik, tetapi juga berdaulat secara budaya, adil secara sosial, dan tangguh secara ekologis. Dalam konteks ini, para *liurai* tidak hanya merupakan warisan sejarah, tetapi juga aktor strategis yang menjembatani kontinuitas antara masa lalu dan masa depan bangsa.

1. *Liurai* sebagai Pilar Rekonsiliasi Sejarah dan Fondasi Identitas Nasional

Para *liurai* adalah manifestasi dari kontinuitas sejarah dan kekayaan budaya lokal Timor-Leste. Mereka tidak hanya berperan sebagai penjaga adat istiadat dan pranata sosial, tetapi juga sebagai pemimpin moral dan spiritual masyarakat yang telah melalui tekanan kolonialisme Portugis dan pendudukan Indonesia (Trindade & Castro, 2007). Dalam sejarah, mereka telah memainkan peran vital sebagai mediator konflik, pengatur hubungan sosial dan sumber daya, serta pemimpin dalam perjuangan dan rekonsiliasi.

Dengan demikian, rekonstruksi peran *liurai* dalam sistem kenegaraan bukanlah sebatas romantisasi masa lalu, melainkan langkah strategis untuk memperkuat identitas nasional dan mewujudkan keadilan historis. Narasi sejarah nasional ke depan harus lebih inklusif dan adil, memberi tempat yang layak bagi kontribusi mereka, sehingga proses rekonsiliasi sejarah dan restorasi identitas bangsa dapat berlangsung secara menyeluruh.

2. Negara Adat-Demokratis: Paradigma Kedaulatan Baru

Membangun Timor-Leste yang berdaulat berbasis budaya menuntut paradigma baru yang bersifat transformatif dan integratif—yaitu *negara adat-demokratis*. Model ini tidak memisahkan nilai-nilai adat dari prinsip demokrasi, tetapi mengintegrasikannya secara institusional dalam kerangka negara hukum modern (Santos, 2006).

Dalam paradigma ini, *liurai* dan struktur adat difasilitasi untuk berperan aktif dalam:

- Tata kelola lokal yang partisipatif dan berkeadilan;
- Penguatan nilai-nilai solidaritas, toleransi, dan rekonsiliasi;
- Pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- Pendidikan karakter dan regenerasi identitas budaya;

- Diplomasi budaya di kancah internasional.

Negara yang mengabaikan akar budayanya akan mengalami keterputusan antara institusi dan masyarakat. Sebaliknya, negara yang membangun dari dalam—berlandaskan identitas budaya—akan lebih tahan menghadapi krisis dan lebih berkelanjutan secara sosial.

3. Integrasi Strategis: Dari Dokumentasi Menuju Transformasi

Langkah selanjutnya bagi Timor-Leste bukanlah sekadar mendokumentasikan sejarah atau melestarikan kebudayaan dalam bentuk simbolik, melainkan mentransformasikan visi budaya menjadi strategi kebijakan negara. Ini mencakup:

- Pembaruan kebijakan publik yang mengakui struktur adat sebagai pilar pembangunan sosial;
- Reformasi pendidikan nasional dengan mengintegrasikan kurikulum berbasis budaya dan sejarah lokal;
- Pemberdayaan ekonomi komunitas adat sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan;
- Diplomasi budaya internasional yang menempatkan *liurai* sebagai duta budaya bangsa.

Integrasi *liurai* dalam kerangka negara modern harus disertai prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum.

4. Menuju Timor-Leste yang Merdeka, Adil, no Berbuday

Timor-Leste tidak akan menjadi negara yang utuh, merdeka, dan bermartabat tanpa merekonstruksi fondasi budayanya secara sistematis. Keberadaan dan kontribusi *liurai* adalah bagian integral dari fondasi tersebut yang tidak dapat digantikan oleh sistem politik atau ekonomi semata. Seperti dikemukakan oleh Almeida (2025),

"Menuju negara berdaulat berbasis budaya adalah jalan panjang yang membutuhkan kebijakan yang bijaksana, pemimpin yang visioner, dan rakyat yang sadar akan jati dirinya."

Dengan kesadaran historis, visi strategis, dan komitmen kolektif, Timor-Leste memiliki potensi menjadi contoh global tentang bagaimana negara kecil dapat membangun kedaulatan dan keberlanjutan melalui akar budayanya sendiri. Hanya melalui proses rekonsiliasi sejarah, restorasi identitas, dan pengakuan terhadap sistem nilai lokal, cita-cita menjadi bangsa merdeka, adil, dan berbudaya akan benar-benar terwujud.

GLOSARIUM

Istilah	Kategori	Definisi	Fungsi dalam Buku
Liurai	Lembaga Lokal	Pemimpin tradisional atau raja dari suatu wilayah adat (*reinu*) di Timor-Leste. Mewakili kekuasaan politik, spiritual, dan genealogis berdasarkan hukum adat.	Tokoh sentral dalam sistem pemerintahan adat dan rekonsiliasi nasional; subjek utama rekonstruksi pascakemerdekaan.
Uma Lulik	Arsitektur Sakral	Rumah leluhur sakral yang menjadi pusat spiritual dan sosial klan. Menyimpan pusaka dan menghubungkan dunia leluhur dengan kehidupan komunitas.	Simbol identitas klan dan otoritas ritus; digunakan dalam pelestarian budaya dan pendidikan.
Lulik	Konsep Kosmologis	Kekuatan metafisik yang menyimbolkan yang sakral dan terlarang; menjadi landasan moral, hukum, dan ekologi dalam kosmologi Timor.	Kerangka nilai adat dalam etika, hukum, dan ekologi; penting dalam penyelesaian konflik dan keseimbangan sosial.
Reinu (Kerajaan)	Wilayah Adat	Entitas politik tradisional yang dipimpin oleh *liurai*, sering terhubung melalui konfederasi dan ikatan kekerabatan.	Dasar analisis sistem pemerintahan pra-kolonial dan dampaknya di era kolonialisme.
Tara Bandu	Hukum Adat	Sistem hukum adat berbasis larangan sakral yang mengatur tata guna tanah,	Digunakan sebagai model perdamaian restoratif dan tata kelola hibrida.

Istilah	Kategori	Definisi	Fungsi dalam Buku
		hubungan sosial, dan perlindungan lingkungan.	
Nahe Biti Boot	Mekanisme Rekonsiliasi	Upacara adat dengan membentangkan tikar besar sebagai ruang dialog kolektif, perdamaian, dan pemulihan konflik.	Ditekankan dalam pemulihan pascakonflik dan keadilan transisional.
Matebian	Prinsip Spiritual	Dunia roh leluhur; secara harfiah berarti "yang mati", namun secara konseptual merujuk pada otoritas ilahi dan keadilan kosmis.	Sumber legitimasi spiritual bagi *liurai*; dasar hukum adat dan ritus suci.
Dato / Nai Lulik	Pemuka Spiritual	Penjaga lulik dan penghubung dengan roh leluhur; bertanggung jawab atas pengetahuan sakral dan ritus adat.	Penasihat spiritual *liurai*; penjaga legitimasi kosmologis.
Katuas Lia	Petugas Adat	Sesepuh adat yang berfungsi sebagai juru bicara hukum adat, pewaris sejarah lisan, dan pengawas ritus sosial.	Perantara hukum dan tradisi; penyampai narasi adat antar generasi.
Moro	Pemimpin Militer Adat	Panglima perang tradisional yang melindungi komunitas dan wilayah dalam sistem adat.	Menunjukkan dimensi militer dan spiritual dalam kepemimpinan adat.
Aifoho	Utusan Diplomatik Adat	Duta adat yang mengatur hubungan antarklan, membangun aliansi, dan merundingkan konsensus.	Agen diplomasi antar-reinu dalam sistem pra-modern.

Istilah	Kategori	Definisi	Fungsi dalam Buku
Sala ho Tulun	Keadilan Restoratif	Konsep keadilan adat yang menekankan pemulihan hubungan melalui dialog, permintaan maaf, dan ganti rugi.	Diangkat sebagai basis epistemologis untuk keadilan komunitarian.
Juramento	Sumpah Suci	Ritual pengambilan sumpah dengan implikasi spiritual untuk menjamin kebenaran dan kesetiaan.	Digunakan dalam sistem kepercayaan, diplomasi budaya, dan penyelesaian konflik.
Reino	Istilah Kolonial	Istilah Portugis untuk menyebut kerajaan adat yang diformalkan dalam sistem administratif kolonial.	Alat analisis kolonialisasi struktur kekuasaan lokal.
Hybrid Governance	Model Politik	Sistem pemerintahan gabungan antara negara formal dan otoritas adat dalam konteks pluralisme hukum dan sosial.	Model konseptual utama dalam integrasi *liurai* ke dalam sistem negara modern.
Diplomasi Adat	Hubungan Internasional	Pendekatan diplomatik berbasis ritus adat, nilai budaya, dan kearifan lokal untuk memperkuat posisi negara di tingkat internasional.	Diusulkan sebagai strategi soft power Timor-Leste melalui peran *liurai*.
Wilayah Adat	Konsep Hukum	Tanah dan ruang spiritual yang diatur oleh hukum adat dan diwariskan secara kolektif melalui sistem kekerabatan.	Dibahas dalam konteks pengakuan legal, reformasi agraria, dan pelestarian lingkungan.

Istilah	Kategori	Definisi	Fungsi dalam Buku
Konstitusi Adat	Kerangka Normatif	Sistem pemerintahan adat yang tidak tertulis, berbasis pada ritus, kekerabatan, spiritualitas, dan musyawarah komunitas.	Fondasi model pluralisme konstitusional dan tata kelola partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Almeida, F. (2025). Transforming Culture into State Strategy: A Vision for Timor-Leste. Dili: Instituto Nacional de Cultura.
- Amnesty International. (1999). East Timor: Violence continues. London: Amnesty International Publications.
- Anderson, A. (2017). Seafaring in the Prehistoric Pacific Islands: A View from the Archaeology. Cambridge University Press.
- Anholt, S. (2007). Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions. Palgrave Macmillan.
- Audley-Charles, M. G. (1986). Timor: A collision zone on the Australian margin. Geological Society, London, Special Publications, 19(1), 91–102.
- Bellwood, P. (2005). First Farmers: The Origins of Agricultural Societies. Blackwell Publishing.
- Bellwood, P. (2007). Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago (3rd ed.). ANU E Press.
- Bellwood, P. (2007). Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago. ANU E Press.
- Belo, C. F. X. (1997). Testimony of suffering and hope: The Church and human rights in East Timor. Pastoral Press.
- Blaser, M. (2013). Ontology and indigeneity: on the political ontology of heterogeneous assemblages. Cultural Geographies, 20(1), 55–74.
- Boege, V., Brown, A., Clements, K., & Nolan, A. (2008). On hybrid political orders and emerging states: State formation in the context of 'fragility'. Berghof Research Center for Constructive Conflict Management.
- Bovensiepen, J. (2015). The Land of Gold: Post-Conflict Recovery and Cultural Revival in Independent Timor-Leste. Cornell University Press.
- Boxer, C. R. (1947). The Portuguese seaborne empire, 1415–1825. Hutchinson.
- Boxer, C. R. (1947). The Topasses of Timor. Journal of the Royal Asiatic Society, 79(3–4), 150–161.
- Boxer, C. R. (1965). The Portuguese Seaborne Empire 1415–1825. Hutchinson.
- Cabral, G. (2017). Culture and identity in Timor-Leste. Routledge.
- Cabral, N. (2003). The Politics of Language Policy in Timor-Leste: Competing Discourses of National Identity. Asian Social Science, 5(10), 35–42.
- CAVR. (2005). Chega!: The Report of the Commission for Reception, Truth and Reconciliation in Timor-Leste.
- Charlton, T. R. (2000). Tectonics of the Indonesian region. Geological Research and Development Centre (GRDC).

- Charlton, T. R. (2002). The petroleum potential of the Banda Arc. Journal of Asian Earth Sciences, 20(8), 909–926.
- Chesterman, S. (2002). East Timor in Transition: From Conflict Prevention to State-Building. International Peace Academy.
- Christie, J. W. (1995). State Formation in Early Maritime Southeast Asia: A Consideration of the Theories and the Data. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 151(2), 235–288.
- Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação de Timor-Leste (CAVR). (2005). Chega! Final Report of the Commission for Reception, Truth, and Reconciliation in East Timor. Dili, Timor-Leste.
- Constituição da República Democrática de Timor-Leste. (2002).
- Cotton, J. (2001). East Timor, Australia and Regional Order: Intervention and its Aftermath in Southeast Asia. London: Routledge.
- Cristalis, I. (2002). East Timor: A nation's bitter dawn. London: Zed Books.
- Cristalis, I., & Scott, C. (2005). Independent Women: The Story of Women's Activism in East Timor. London: Catholic Institute for International Relations.
- Cummins, D. (2017). Local Governance in Timor-Leste: Lessons in Postcolonial Statebuilding. Routledge.
- Davidson, B. (1994). The Portuguese Colonies in Southeast Asia. Macmillan.
- De Sousa Santos, B. (2002). Toward a New Legal Common Sense: Law, Globalization, and Emancipation. Butterworths LexisNexis.
- Dunn, J. (1983). Timor: A people betrayed. Sydney: Jacaranda Press.
- Durand, F. (2006). History of Timor-Leste. Silkworm Books.
- Fernandes, C. (2011). The Independence of East Timor: Multilateral Diplomacy and the UN. Sussex Academic Press.
- Fitzpatrick, D. (2002). Land Claims in East Timor. Asia Pacific Press.
- Fox, J. J. (1980). The Flow of Life: Essays on Eastern Indonesia. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Fox, J. J. (1980). The Flow of Life: Essays on Eastern Indonesia. Harvard University Press.
- Fox, J. J. (1980). The flow of the river: The meaning of the life of the rivers in the context of the Timor world. In P. R. P. M. D. (Ed.), The continuity of tradition: Essays in the anthropology of Southeast Asia. Macmillan.
- Fox, J. J. (1988). To Speak in Pairs: Essays on the Ritual Languages of Eastern Indonesia. Cambridge University Press.
- Fox, J. J. (1993). Comparative Perspectives on Austronesian Houses: An Introductory Essay. In J. J. Fox (Ed.), Inside Austronesian Houses (pp. 1–29). ANU Press.

- Fox, J. J. (1996). The Austronesians: Historical and Comparative Perspectives. ANU Press.
- Fox, J. J. (2003). Drawing from the past to prepare for the future: Responding to the challenges of governance in East Timor. In H. Hill & J. Saldanha (Eds.), East Timor: Development challenges for the world's newest nation (pp. 15–30). Asia Pacific Press.
- Fox, J. J. (2003). Out of the ashes: Destruction and reconstruction of East Timor. ANU E Press.
- Fox, J. J. (2003). Tracing the Path, Recounting the Past: Historical Perspectives on Timor. In J. J. Fox & D. Babo-Soares (Eds.), Out of the Ashes: Destruction and Reconstruction of East Timor (pp. 1–30). ANU Press.
- Grenfell, D. (2006). Post-Conflict Reconstruction and Rebuilding the State: Lessons from Timor-Leste. Routledge.
- Grenfell, D. (2009). Promoting a Culture of Peace: Building Social Cohesion through Cultural Expression in East Timor. The Asia Pacific Journal of Anthropology, 10(4), 291–307.
- Grenfell, D. (2009). Promoting peace: Virtues of peacebuilding strategies in East Timor. Contemporary Politics, 15(2), 135–152.
- Grenfell, L. (2012). Promoting the Rule of Law in Post-Conflict States. Cambridge University Press.
- Grenfell, L. (2012). Promoting the Rule of Law in Post-Conflict States: Critical Evaluations of Hybrid Political Orders. Cambridge University Press.
- Gunn, G. (1999). The History of Timor-Leste: A Brief Overview of its Social and Political Systems. Oxford University Press.
- Gunn, G. C. (1999). Timor Loro Sae: 500 Years. Livros do Oriente.
- Gusmão, K. R. X. (2002). To Resist is to Win: The Autobiography of Xanana Gusmão. Aurora Books.
- Hägerdal, H. (2012). Lords of the Land, Lords of the Sea: Conflict and Adaptation in Early Colonial Timor, 1600–1800. KITLV Press.
- Hägerdal, H. (2012). Timor and the Portuguese presence in the Indian Ocean: A review of the Portuguese colonization. Modern Asian Studies, 46(2), 237–275.
- Hall, R. (2002). Cenozoic geological and plate tectonic evolution of SE Asia and the SW Pacific: Computer-based reconstructions, model and animations. Journal of Asian Earth Sciences, 20(4), 353–431.
- Harris, R. A. (2011). Rifting and collision in the Banda Arc: The transition from subduction to arc-continent collision. Geological Society, London, Special Publications, 355(1), 391–414.

- Hicks, D. (2004). Tetum ghosts and kin: Fertility and gender in East Timor. Waveland Press.
- Hohe, T. (2002). The Clash of Paradigms: International Administration and Local Political Legitimacy in East Timor. Contemporary Southeast Asia, 24(3), 569–589.
- Holm, J. D., & Molutsi, P. P. (1989). Development, democracy, and civil society in Botswana. Boulder, CO: Westview Press.
- Hull, G. (2004). The Languages of Timor-Leste: A Partial Inventory. Universidade Nacional Timor Lorosa'e.
- Human Rights Watch. (2000). East Timor: Unfinished Business: Justice for East Timor. New York: Human Rights Watch.
- Jolliffe, J. (1978). East Timor: Nationalism and colonialism. University of Queensland Press.
- Kingsbury, D. (2009). East Timor: The Price of Liberty. New York: Palgrave Macmillan.
- Kohen, A. S. (1999). From the Place of the Dead: The Epic Struggles of Bishop Belo of East Timor. New York: St. Martin's Press.
- Leach, M. (2017). Nation-Building and National Identity in Timor-Leste. Routledge.
- Lentz, C. (2006). Land and the politics of belonging in West Africa. Leiden: Brill.
- Logan, C. (2008). Traditional leaders in modern Africa: Can democracy and the chief coexist? Afrobarometer Working Paper No. 93.
- Logan, C. (2009). Selected chiefs, elected councillors and hybrid democrats: Popular perspectives on the co-existence of democracy and traditional authority in Africa. The Journal of Modern African Studies, 47(1), 101–128.
- Mark, S. (2010). A Greater Role for Cultural Diplomacy. Clingendael Diplomacy Papers No. 12.
- McWilliam, A. (2003). Environment, development, and change in Timor-Leste: A critique of Timorese ecological policies. Australian Journal of Environmental Studies, 21(4), 431–450.
- McWilliam, A. (2003). Paths of Origin, Gates of Life: A Study of Place and Precedence in East Timor. Brill.
- McWilliam, A. (2005). Houses of Resistance in East Timor: Structuring Sociality in the New Nation. Anthropological Forum, 15(1), 27–44.
- McWilliam, A. (2007). A Plural Society: Land, Power and Social Exchange in East Timor. ANU Press.
- McWilliam, A. (2007). Austronesians in the Timor Sea: Immigration, Trade and Cultural Influence. In Ancestors, Power and History in Madagascar and Timor (pp. 127–148). Brill.

- McWilliam, A. (2007). Customary governance in Timor-Leste. Asian Survey, 47(2), 276–296.
- McWilliam, A. (2007). Harvester and Hierarchies: Ritual Agriculture and the Re-invention of Kingship in Timor. In Ancestors, Power and History in Madagascar and Timor (pp. 41–63). Brill.
- McWilliam, A. (2007). Looking for the *Liurai*: Oral Histories of Timorese Indigenous Authority Structures. Ethnohistory, 54(3), 571–603.
- McWilliam, A. (2007). Ritual Alliance and Mutual Recognition: Negotiating Kinship and Status in Timor-Leste. Australian Journal of Anthropology, 18(2), 127–144.
- McWilliam, A. (2007). The history of the Timor islands and their role in regional development. Journal of Southeast Asian History, 35(3), 265–283.
- McWilliam, A., & Traube, E. G. (2011). Land and life in Timor-Leste: Ethnographic essays. Canberra: ANU Press.
- Monk, K. A., de Fretes, Y., & Reksodiharjo-Lilley, G. (1997). The Ecology of Nusa Tenggara and Maluku. Oxford University Press.
- Nevins, J. (2005). A Not-So-Distant Horror: Mass Violence in East Timor. Ithaca: Cornell University Press.
- Niner, S. (2009). *Liurai* and the Legacy of Power in Timor-Leste: Traditions and Transitions. Anthropological Forum, 19(1), 55–72.
- Niner, S. (2009). Traditional knowledge and environmental sustainability in Timor-Leste: The role of customary law. Environmental Conservation, 36(2), 155–165.
- Nye, J. S. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. Public Affairs.
- O'Connor, S. (2003). Nine new Late Pleistocene radiocarbon dates from Timor-Leste. Archaeology in Oceania, 38(3), 122–129.
- O'Connor, S. (2007). New Evidence from East Timor Contributes to Our Understanding of Earliest Modern Human Colonisation East of the Sunda Shelf. Antiquity, 81(313), 523–535.
- O'Connor, S., & Veth, P. (2000). Early Holocene Shell Fish Hooks from Lene Hara Cave, East Timor. Antiquity, 74(286), 279–285.
- O'Connor, S., Ono, R., & Clarkson, C. (2011). Pelagic Fishing at 42,000 Years Before the Present and the Maritime Skills of Modern Humans. Science, 334(6059), 1117–1121.
- Quinn, M. (2003). Language and education in East Timor: Past, present, and future. Current Issues in Language Planning, 4(1), 69–97.
- RDTL Constitution. (2002). Constituição da República Democrática de Timor-Leste. Dili: Government of Timor-Leste.
- Robinson, G. (2003). East Timor 1999: Crimes Against Humanity. Jakarta: ELSAM.

- Robinson, G. (2003). If You Leave Us Here, We Will Die: How Genocide Was Stopped in East Timor. Princeton University Press.
- Santos, B. de S. (2006). The Rise of the Global Left: The World Social Forum and Beyond. Zed Books.
- Schapper, A. (2021). The Papuan Languages of Timor, Alor, and Pantar. In B. Palmer (Ed.), The Languages and Linguistics of the New Guinea Area (pp. 431–472). De Gruyter Mouton.
- Shepherd, C. J. (2014). Development and Environmental Politics Unmasked: Authority, Participation and Equity in East Timor. Routledge.
- Shoesmith, D. (2003). Timor-Leste: Divided Leadership in a Semi-Presidential System. Asian Survey, 43(2), 231–252.
- Sieder, R. (2011). Legal pluralism and indigenous rights in Latin America: The challenges of institutionalizing indigenous justice systems. Journal of Latin American Studies, 43(3), 481–509.
- Simpson, B. (2004). Indonesia's 1969 Takeover of West Papua: "The United Nations' Temporary Executive Authority" (UNTEA) and the Disintegration of the New Guinea Council. Indonesia, (78), 67–83.
- Simpson, B. (2004). Indonesia's 1975 Invasion of East Timor: "Green Light" and "Double Deal"?. Journal of Contemporary Asia, 34(1), 59–74.
- Smith, A. D. (2009). Ethno-symbolism and Nationalism: A Cultural Approach. Routledge.
- Sousa, M. (2015). Customary land tenure and sustainable development in Timor-Leste. The Asia Pacific Journal of Anthropology, 16(5), 485–502.
- Spriggs, M. (2011). Archaeology and the Austronesian Expansion: Where are we now? Antiquity, 85(328), 510–528.
- Taylor, J. G. (1991). Indonesia’s forgotten war: The hidden history of East Timor. London: Zed Books.
- Taylor, J. G. (1999). East Timor: The Price of Freedom. London: Zed Books.
- Therik, G. (2004). Wehali: The Female Land—Tradition and Change in the Domain of Wehali, South West Timor. Canberra: ANU Press.
- Therik, S. (2004). Uma Lulik and the power of sacred spaces: Timorese cosmology and cultural identity. Australian Journal of Anthropology, 15(1), 45–62.
- Therik, T. (2004). Wehali: The Female Land: Traditions of a Timorese Ritual Centre. Pandanus Books.
- Tilman, R. (2018). Community-Based Economic Development and Traditional Leadership in Timor-Leste. Journal of Southeast Asian Studies, 49(1), 89–107.
- Tilman, R. (2018). Community-based economic development and traditional leadership in Timor-Leste. Journal of Southeast Asian Studies, 49(1), 89–107.

- Traube, E. (1986). Cosmology, authority, and ritual in Timor. Journal of Anthropological Research, 42(3), 267–279.
- Traube, E. (1986). Political Systems and Cultural Narratives in Timor-Leste. Cambridge University Press.
- Traube, E. G. (1986). Cosmology and social life: Ritual exchange among the Mambai of East Timor. Chicago: University of Chicago Press.
- Traube, E. G. (2007). Daughter of the Mountain: The Cultural Construction of the Nation in East Timor. Anthropological Quarterly, 80(2), 383–416.
- Traube, E. G. (2007). Daughters of the Crocodile: Women, Culture, and Change in East Timor. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Traube, E. G. (2007). Unpaid Wages: Local Narratives and the Imagination of the Nation. The Asia Pacific Journal of Anthropology, 8(1), 9–25.
- Trindade, J., & Castro, B. (2007). Rethinking Timorese Identity as a Peacebuilding Strategy: The Lorosa'e–Loromonu Conflict from a Traditional Perspective. European University Center for Peace Studies.
- UNESCO. (2010). Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage.
- United Nations General Assembly. (1975). Resolution 384 (XXX) and 389 (XXXV) on the Question of East Timor. New York, NY: United Nations.
- United Nations. (1999). Report of the Secretary-General on the Question of East Timor (S/1999/595).
- United Nations. (1999). Security Council Resolution 1264 (1999) and 1272 (1999). New York: United Nations.
- United Nations. (2000). Report of the International Commission of Inquiry on East Timor. New York: United Nations.
- United Nations. (2002). Report of the Secretary-General on the United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET).
- United Nations. (2002). Speech by H.E. Kay Rala Xanana Gusmão at the 57th Session of the UN General Assembly.
- Van Trease, H. (1995). Melanesian Politics: Stael Blong Vanuatu. Christchurch: Macmillan Brown Centre for Pacific Studies.
- Yashar, D. J. (2005). Contesting Citizenship in Latin America: The Rise of Indigenous Movements and the Postliberal Challenge. Cambridge: Cambridge University Press.